

Bagian 4: Rezim Pendudukan

Bagian 4: Rezim Pendudukan	1
Bagian 4: Rezim Pendudukan	2
4.1 Pendahuluan	2
4.2 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Perannya di Timor Leste	3
Pendahuluan	3
Latar Belakang ABRI	4
Struktur Organisasi ABRI di Timor Timur	9
4.3 Militerisasi Masyarakat Timor Timur	18
Pendahuluan	18
Militerisasi Timor Timur Pra-Indonesia	20
Militerisasi partai-partai politik Timor Timur oleh Indonesia sebelum pendudukan	21
Pembentukan batalyon tempur ABRI beranggotakan orang Timor Timur	22
Berbagai kelompok paramiliter awal, 1976-1981	23
Paramiliter tahun 1980-an	23
Pasukan pertahanan sipil	24
"Anggota militer triwulan", <i>Milsas</i> 1989 - 1992	26
Tenaga Bantuan Operasi (TBO)	27
'Intel'—Mata-mata orang Timor Timur	28
1990-an dan perhatian pada pemuda	29
Pasukan Pembunuh	30
Milisi, 1998-1999	30
4.4 Pemerintahan Sipil	39
Pemerintahan Sementara di Timor Timur	39

Bagian 4: Rezim Pendudukan

4.1 Pendahuluan

1. Dari sejak awal proses dekolonisasi oleh Portugal menyusul Revolusi Bunga bulan April 1974, militer Indonesia menjadi terlibat dalam masa depan Timor-Leste. ABRI menerapkan solusi militer untuk masalah-masalah politik. ABRI memaksakan penyelesaian militer atas masalah politik yang sedang berkembang, yang berakibat bencana bagi rakyat Timor-Leste. Kekhawatiran Indonesia atas Timor-Leste pasca kolonial yang baru muncul tidak perlu berakibat pada intervensi militer jika pemimpin militer garis keras tidak memiliki posisi yang demikian dominan dalam rezim Orde Baru Presiden Soeharto. Begitu terjun dengan intervensi militer, ABRI mengambil peran utama dalam masa-masa awal pendudukan. Mereka meningkatkan kekerasan militer untuk mencapai tujuan politik penaklukan dan integrasi. Untuk melakukan hal ini, mereka membawa konflik ke setiap tingkatan masyarakat Timor-Leste, melibatkan pria, wanita dan anak-anak Timor-Leste dalam peran-peran tempur, intelijen, penyiksaan dan pembunuhan untuk menguasai penduduk. Pada tahun 1980-an, ketika konflik militer besar-besaran bergeser menjadi perlawanan bawah tanah oleh generasi baru pemuda Timor-Leste, militer Indonesia sekali lagi mengupayakan solusi kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Pasukan pembunuh dan paramiliter pada pertengahan 1990-an menjadi pendahulu milisi-milisi yang merajalela setelah dibentuk pada tahun 1998-99. Sejak 1974 sampai 1999, hal ini sesuai dengan pola tetap membangun pasukan paramiliter Timor-Leste bersenjata yang beroperasi dengan dukungan ABRI dan dengan impunitas total.

2. Strategi militer ini memiliki dampak yang luas dan bersifat jangka panjang bagi rakyat Timor-Leste. Skala kekerasan berlipat ganda, dan bahkan masuk sampai ke desa-desa terkecil di seluruh wilayah. Ketakutan dan kecurigaan menyebar di masyarakat, ketika sesama orang Timor-Leste diadu, khususnya dalam operasi-operasi intelijen dan pemantauan. Masalah impunitas dan ketiadaan sistem efektif apapun untuk menegakkan supremasi hukum berarti bahwa rakyat Timor-Leste tidak dapat mempercayai polisi serta mekanisme pemerintahan sipil untuk melindungi mereka. Pemerintahan sipil benar-benar tunduk pada militer sebagai institusi dan pada masing-masing komandan yang sangat berkuasa sepanjang masa pendudukan. Banyak pos-pos sipil penting diisi oleh tokoh-tokoh militer atau mantan militer, dari tingkat nasional sampai kabupaten. Hal ini mengabaikan kemampuan pemerintahan sipil untuk berjalan dan menerapkan tujuan-tujuan pembangunan nasional.

3. Bab ini memberi latar belakang mengenai sistem militer dan pemerintahan Indonesia sebagaimana yang berlaku di Timor-Leste selama masa pendudukan. Ini menjadi referensi untuk membantu memahami konteks pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan dalam bab-bab lain.

* Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dikenal dengan ABRI hingga April 1999, ketika polisi dipisahkan dari angkatan lainnya, yaitu angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara yang kemudian dikenal bersama sebagai Tentara Nasional Indonesia, TNI.

4.2 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Perannya di Timor Leste*

Pendahuluan

4. ABRI memainkan peran penting dalam campur tangan dan pendudukan Indonesia di Timor Leste selama 24 tahun. Tahun 1974-1975, setelah Revolusi Bunga (*Carnation Revolution*) di Portugal yang membuka jalan bagi terjadinya dekolonisasi di Timor Portugis, adalah BAKIN atau Badan Koordinasi Intelijen Nasional dan pemikir-pemikir sipil yang berhubungan dekat dengan lembaga tersebut, yakni *Center for Strategic and International Studies* atau CSIS, yang mendalangi operasi rahasia dan kampanye untuk menciptakan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Sejak akhir 1974, kelompok-kelompok ini mulai mempersenjatai dan melatih rakyat Timor-Leste di Timor Barat, dengan akibat konflik menyebar masuk ke dalam masyarakat Timor-Leste, hal mana berlanjut hingga 1999.

5. Menurut kesaksian salah seorang staf senior CSIS, Yusuf Wanandi, yang didengar oleh Komisi ini, pada tahun 1975 ketika Indonesia memutuskan untuk melakukan intervensi penuh dan invasi ke Timor-Leste, perdebatan ketika itu didominasi oleh tokoh-tokoh militer garis keras. Sejak awal mereka telah menggambarkan intervensi ke Timor-Leste sebagai perang suci antikomunis yang heroik, agar sesuai dengan ideologi dan sejarah masa lalu rezim Orde Baru dan dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dunia barat dalam suasana perang dingin yang berkelanjutan. Invasi ke Timor-Leste itu merupakan gerakan militer besar-besaran. Tokoh militer garis keras telah meyakinkan pemerintah Indonesia dan para pendukung internasional mereka, bahwa mencaplok Timor-Leste akan menjadi langkah yang cepat dan sederhana. Kredibilitas ABRI dipertaruhkan dalam usaha tersebut. Ketika kemenangan militer ternyata tak secepat dan semudah yang diharapkan, ABRI mencari dan mendapat bantuan militer internasional yang memungkinkannya untuk memperkuat operasinya.¹

6. Sementara ABRI boleh mengaku telah berhasil menanamkan kontrol militer di Timor-Leste sejak akhir 1970-an, perlawanan bersenjata tak pernah benar-benar dapat dipadamkan. Ketika perlawanan tersebut kemudian mengubah strategi hingga kebanyakannya bergantung pada jaringan bawah tanah, protes masyarakat perkotaan serta kampanye diplomasi internasional, ABRI melakukan sejumlah tindakan opresif untuk menghentikan perlawanan tersebut. ABRI membuat kehadirannya di bumi Timor-Leste dapat benar-benar dirasakan baik secara sosial maupun ekonomi. Struktur teritorialnya merambah masuk hingga ke tingkat desa, menyejajari dan mendominasi struktur pemerintahan sipil. ABRI mempertahankan jaringan intelijen di seluruh negeri dan memobilisasi masyarakat sipil Timor-Leste untuk bergabung dalam berbagai macam kekuatan paramiliter selama 24 tahun masa pendudukan, yang berpuncak pada terbentuknya milisi pada tahun 1999. ABRI mempertahankan kendalinya terhadap polisi hingga April 1999. Selain itu, ABRI juga membangun kepentingan dan monopoli bisnis yang sangat kuat di wilayah tersebut, yang seperti kegiatannya yang lain, telah membawa dampak yang merusak sendi kehidupan sehari-hari masyarakat Timor-Leste (lihat 7.10: Pelanggaran Hak-Hak Ekonomi dan Sosial). Invasi ke Timor-Leste dan kemudian diikuti oleh ketidakmampuan ABRI untuk menghancurkan perlawanan di wilayah yang didudukinya, membuat wilayah tersebut menjadi ajang untuk memperoleh pengalaman perang dan menumpas pemberontakan bagi para prajurit Indonesia selama 24 tahun masa pendudukan. Angkatan demi angkatan perwira menggunakan pengalaman tempur yang diperolehnya di Timor-Leste untuk membangun karir mereka. Beroperasi di provinsi yang teramat jauh, di batas wilayah kepulauan Indonesia, ABRI melaksanakan tugasnya tanpa ada pengawasan dari pihak luar dan dalam suatu sistem yang

¹ Bagian ini menekankan pada peran militer ABRI yang lazim atau normal. Pembahasan tentang peran sosial politik ABRI dapat dilihat di bagian 4.4 Pemerintahan Sipil.

pemerintahan sipilnya tidak memiliki kekuatan untuk mengimbangi ataupun mengendalikan tindakan-tindakan militer. ABRI menikmati impunitas penuh atas semua tindakannya.

7. Dalam bab-bab pada Bagian 7 dalam laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia ini akan disusun segala dampak yang ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan ABRI terhadap masyarakat Timor-Leste, serta pengalaman masyarakat Timor-Leste hidup di bawah sistem yang didominasi oleh militer Indonesia. Bagian ini berisi informasi tentang ABRI secara umum dan operasi ABRI di Timor-Leste secara khusus, agar seluruh bab yang membahas masalah pelanggaran dapat dipahami sebagaimana mestinya.

Latar Belakang ABRI

Latar belakang sejarah ABRI dan TNI²

8. Baik pihak Belanda maupun kemudian pihak Jepang telah merekrut orang Indonesia masuk ke dalam angkatan bersenjata mereka. Perwira dalam Tentara Kerajaan Hindia Belanda (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, KNIL) kebanyakan berkebangsaan Belanda, tetapi prajurit biasa adalah orang Indonesia yang dilatih Belanda. Jepang menginvasi bulan Maret 1942, dan menjelang akhir tahun itu mereka telah membentuk Heiho sebagai satuan pembantu dengan tugas penjagaan. Pada tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk pasukan tempur yang lebih formal bernama PETA (Pasukan Sukarela untuk Membela Tanah Air), dengan tugas mendukung Jepang jika pasukan sekutu mendarat. Pada masa transisi dari kekuasaan Jepang menuju pengakuan Indonesia sebagai negara berdaulat penuh, sejumlah organisasi bersenjata bermunculan. Kelompok-kelompok ini mencerminkan beragamnya ideologi di Indonesia mulai dari Muslim yang memperjuangkan negara Islam, sampai nasionalis radikal serta Komunis yang menginginkan negara sekuler. Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dulu kebanyakan anggota serta perwira PETA. Setelah kedatangan pasukan sekutu akhir bulan September 1945, BKR pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), di bawah satu komando pusat. Melalui dekrit Presiden Sukarno tanggal 26 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat dijadikan Tentara Republik Indonesia (TRI). TRI berhasil dikonsolidasi pertengahan Mei 1946, hingga kemudian pada tanggal 26 Juni 1946 baik angkatan udara maupun angkatan laut ditempatkan di bawah komando Panglima TRI Sudirman, dan tidak lagi di bawah Menteri Pertahanan. Pada tanggal 5 Mei 1947, Sukarno menggabungkan TRI dengan laskar-laskar bersenjata yang lain untuk membentuk Tentara Nasional Indonesia, TNI. Selama tahun-tahun 1950-an panglima-panglima angkatan darat, angkatan udara maupun angkatan laut masing-masing berada di bawah komando Presiden, namun menyusul gejolak politik dan pembunuhan secara luas pada tahun 1965, ketiga angkatan tersebut dikonsolidasi bersama dengan kepolisian pada bulan Desember 1965 hingga menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), di bawah komando Panglima ABRI. Pada bulan April 1999, setelah polisi berpisah dari angkatan bersenjata, ABRI kembali diberi nama TNI.

ABRI sebagai penyelamat bangsa

9. Indonesia telah melalui perjuangan yang panjang dan rumit untuk merebut kemerdekaan dari cengkeraman pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa-masa mengangkat senjata, setelah Perang Dunia II, seluruh masyarakat Indonesia bergerak secara meluas untuk mengusir penjajah Belanda, yang mencoba untuk menanamkan kembali kekuasaannya setelah Jepang menyerah. Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk untuk memimpin perjuangan ini, dan memainkan peran penting dalam memaksa Belanda untuk hengkang dari Indonesia setelah revolusi tahun 1945-1949. Selama masa ini, hubungan tentara dengan para politisi dan berbagai laskar rakyat yang marak ketika itu, untuk memperjuangkan apa yang disebut dengan Revolusi, tidaklah selalu mulus. Sementara pimpinan

sipil Indonesia mengadopsi undang-undang dasar 1950 yang demokratis, pihak militer telah sejak awal merasa memiliki andil yang besar dalam masa depan perpolitikan Indonesia.

10. Tahun-tahun berikutnya, terjadi sejumlah peristiwa penting yang memperkuat kekuasaan militer dan membuatnya dapat mengangkat diri sendiri sebagai penyelamat bangsa. Selama tahun 1950-an, TNI telah memerangi berbagai gerakan separatist maupun gerakan-gerakan Islam. Pada tahun 1957-1958 Indonesia menghadapi dua pemberontakan kelompok federal yaitu satu di Sumatera (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI) dan satu lagi di Sulawesi (Perjuangan Semesta, Permesta). Dua-duanya mendapat dukungan kuat termasuk dari beberapa elemen militer. Presiden Sukarno menyatakan diberlakukannya darurat militer pada tahun 1957 dan militer, yang ketika itu dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, menghancurkan pemberontakan tersebut. Merasa mendapat angin dari kedua kemenangan tersebut, berikut keberhasilannya mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi pada kurun waktu yang hampir sama, menjelang akhir tahun 1950-an TNI mulai menunjukkan sikap politik yang semakin agresif. Pertama mereka melawan partai-partai politik dan kemudian melawan sistem demokrasi itu sendiri. Pada tahun 1959, dengan dukungan militer, Sukarno pun membuang demokrasi parlementer. Ia kembali pada UUD 1945 dan memulai apa yang disebut dengan Demokrasi Terpimpin, yang memberi presiden kekuasaan lebih besar. Demokrasi Terpimpin juga memberikan hak untuk ikut berpolitik kepada militer, sebagai salah satu dari apa yang disebut dengan "kelompok-kelompok fungsional"³

11. Setelah masa kekacauan pada awal 1960, yaitu selama Sukarno memimpin Indonesia yang semakin terpecah belah, angkatan darat di bawah kepemimpinan Major-Jendral Soeharto, pada hakikatnya mendongkel presiden dan melancarkan gerakan pembersihan yang penuh kekerasan untuk melawan saingan politiknya yang utama, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan dukungan aktif dari militer, pada tahun 1965-1966 antara 250.000 hingga 1 juta orang yang dicurigai sebagai komunis dibunuh dan lebih banyak lagi orang berhaluan kiri dan para pendukung Sukarno ditahan di penjara dan kamp tahanan.⁴ Pada masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto, militer kembali ditampilkan sebagai penyelamat bangsa, kali ini dari ancaman komunisme.

12. Pada tahun 1974, tentara Indonesia mempergunakan ancaman komunisme untuk membenarkan keterlibatannya di dalam operasi rahasia di Timor-Leste (lihat Bab 3: Sejarah Konflik). Pada puncak Perang Dingin, komunisme merupakan simbol yang ampuh untuk menggagalkan persekutuan dengan negara-negara lain, khususnya karena Amerika Serikat berupaya untuk mengendalikan penyebaran paham komunis di Asia Tenggara. Meskipun tak ada bukti yang menunjukkan bahwa komunisme merupakan kekuatan utama dalam peta perpolitikan di Timor-Leste, atau bahwa negara-negara komunis secara aktif memanas-manasi para pimpinan politiknya, ABRI menggambarkan kemungkinan Timor-Leste yang merdeka sebagai sebuah ancaman terhadap stabilitas Indonesia. Bertahun-tahun setelah invasi yang terjadi pada tahun 1975, ABRI tetap berkeras bahwa komunislah yang mereka lawan di Timor-Leste.⁵

Doktrin ABRI

13. Doktrin dasar ABRI dikenal dengan nama Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata, yang mengajarkan bahwa seluruh warga negara harus berperan dalam pertahanan nasional. Konsep ini berasal dari pengalaman selama perang kemerdekaan, yang ketika itu TNI bergantung pada dukungan rakyat.⁶ Awalnya konsep ini murni merupakan konsep pertahanan yang berdasarkan pada gagasan bahwa seluruh bangsa perlu melawan musuh yang datang dari luar jika musuh tersebut telah berhasil menaklukkan militer yang ada. Lama kelamaan, konsep ini berubah karena militer mulai melihat ancaman terhadap keamanan nasional yang terbesar justru datang dari dalam.

14. Peranan ABRI dalam kehidupan perpolitikan nasional berubah secara signifikan ketika pada tahun 1959 Presiden Sukarno mendeklarasikan "Demokrasi Terpimpin" dan memberikan

Tentara Nasional Indonesia hak untuk ikut serta dalam politik. Di bawah kepemimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution, ABRI membuat kebijakan Dwifungsi ABRI, yang mengakui bahwa ABRI memiliki dua fungsi yaitu fungsi keamanan dan fungsi sosial politik.

15. Sejak tahun 1965 dan munculnya Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, ABRI secara eksklusif lebih banyak berkonsentrasi pada keamanan nasional. Perolehan kembali hak tersebut dikejawantahkan dalam berbagai kebijakan dan konsep, yang lebih jauh membenarkan keterlibatannya dalam seluruh peri kehidupan berbangsa. Pada tahun 1966, misalnya, ABRI menganut konsep yang merangkul semua bidang, yaitu Ipoleksos- ideologi, politik, ekonomi dan sosial.⁷ Penyatuan struktur teritorial, yang menciptakan keberadaan ABRI secara geografis di seluruh wilayah Indonesia (lihat di bawah), mencerminkan keinginan yang kuat tersebut untuk menguasai situasi ke dalam.

16. Selama rezim Orde Baru berkuasa, perbedaan pendapat semakin tidak ditoleransi, hingga pada puncaknya ketika setiap kritik yang ditujukan kepada rezim tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap negara. UU Pertahanan tahun 1982 menyebutkan peran sosial-politik ABRI, yang berbunyi:

Pertahanan dan keamanan nasional mencakup pertahanan melawan ancaman-ancaman baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam, dan ancaman-ancaman ini dapat diarahkan terhadap kedaulatan, persatuan dan solidaritas nasional, keutuhan bangsa dan hukum nasional, dan nilai-nilai falsafah bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar.⁸

Struktur Teritorial angkatan bersenjata Indonesia

17. Struktur teritorial militer Indonesia dibagi menjadi dua bidang operasional yang luas, yaitu komando tempur dan komando teritorial. Struktur teritorial merupakan ciri khusus militer Indonesia, yang berawal dari zaman perang kemerdekaan, ketika tentara Indonesia masih terbentuk atas satuan-satuan non-profesional yang bersifat lokal, yang melakukan perang gerilya melawan Belanda. Struktur-struktur lokal ini berkembang menjadi struktur teritorial resmi yang ada hingga sekarang, yang menjadi bayang-bayang dan menyejajari struktur pemerintahan sipil. Secara operasional, pada puncak struktur ini terdapat Komando Daerah Militer atau Kodam, yang mengawasi sejumlah Komando Resort Militer atau Korem.^{*} Pada tingkat ini, komando militer tidak selalu sama dengan tingkatan administratif di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi-provinsi yang padat penduduknya, seperti Jakarta, Jawa Barat, Tengah dan Timur, memiliki Kodam sendiri dan dalam hal ini Korem di ketiga wilayah tersebut meliputi sejumlah kabupaten. Akan tetapi, sebagian besar Kodam meliputi lebih dari satu provinsi dan Korem meliputi wilayah-wilayah seluas satu provinsi. Inilah yang terjadi di Timor Timur hampir sepanjang masa pendudukan (lihat di bawah). Di bawah Korem, struktur teritorial selalu sejajar dengan satuan-satuan pemerintahan sipil: setiap kabupaten memiliki satu Komando Distrik Militer atau Kodim dan setiap kecamatan memiliki Komando Rayon Militer atau Koramil. Hampir di setiap desa terdapat Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Militer Indonesia juga memiliki angkatan pertahanan sipil yang dikenal dengan nama Perlawanan Rakyat (Wanra) dan Rakyat Terlatih (Ratih), yang berada di bawah komandonya. Kelompok-kelompok paramiliter ini direkrut dari masyarakat sipil di desa, cara yang murah untuk memperluas kontrol ABRI dan mengerahkan masyarakat umum untuk melakukan tugas-tugas pengamanan (lihat bagian mengenai militerisasi masyarakat Timor Timur di bawah). Hasilnya adalah sebuah lembaga yang mampu menanamkan kekuasaan baik pada pemerintah maupun masyarakat di semua lapisan, serta barisan pasukan tetap dalam jumlah besar yang pada tahun 1993 mampu menugaskan seorang prajurit untuk setiap 900 orang penduduk.⁹

^{*} Hingga 1985 kelompok-kelompok Kodam berada di bawah komando satuan teritorial yang lebih tinggi, yaitu Kowilhan (Komando Wilayah Pertahanan). Kowilhan kemudian dihapus karena dianggap melebihi kebutuhan.

18. Pada tahun-tahun pertama kepemimpinan rezim Orde Baru oleh Presiden Soeharto, struktur teritorial ini digabungkan dan diperluas. ABRI menjadi tulang punggung rezim itu, dan melalui struktur teritorialnya ABRI mampu menggunakan sejumlah cara untuk memastikan dominasinya. Jaringan musyawarahnya yang terlembaga dan dianggotai oleh para pejabat tingkat tinggi baik dari kalangan sipil maupun kepolisian yang disebut dengan Musyawarah Pimpinan Daerah atau Muspida, ada di tingkat provinsi dan kabupaten serta Tripika (Tiga Pimpinan Kecamatan) di tingkat kecamatan. Di bidang lain, rezim Orde Baru lebih banyak menampilkan wajah sipil pada dunia. Misalnya, Orde Baru mendorong rakyat untuk bersumpah setia kepada negara dengan cara memastikan keikutsertaan mereka dalam aspek-aspek seremonial nasionalisme Indonesia. ABRI juga menerapkan proyek-proyek kerja untuk masyarakat seperti program 'ABRI Masuk Desa', dalam rangka menjaga dwifungsi ABRI.

ABRI dan Polisi

19. Polisi Republik Indonesia secara lembaga merupakan bagian dari militer selama masa Orde Baru. Sejarah panjang pengabdian polisi pada kepemimpinan angkatan darat sangat berpengaruh pada kemandirian polisi berikut kapasitas mereka untuk menegakkan hukum dan peraturan. Kekebalan hukum yang selama ini dinikmati oleh angkatan darat dan mereka yang bekerja untuknya, juga merupakan dampak dari pengabdian tersebut. Polisi memiliki doktrin yang serupa dengan ABRI, didirikan atas dasar keyakinan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab seluruh rakyat. Di bawah Sistem Keamanan Keliling atau Siskamling anggota masyarakat berperan untuk menjaga keamanan wilayah mereka.¹⁰ Seperti tentara, polisi juga memiliki struktur wilayah, termasuk di tingkat desa (Bintara Polisi Daerah, *Binpolda*). Selain dari tugas-tugas kepolisian yang normal, polisi memiliki satuan bersenjata khusus yang disebut Brigade Mobil atau Brimob. Awalnya Brimob bertanggung jawab atas keamanan internal, dan karena peran ini telah diambil alih oleh tentara selama masa Orde Baru, Brimob kemudian dikhususkan untuk mengendalikan kerusuhan dan banyak digunakan untuk tujuan ini.

Pendanaan ABRI dan perannya dalam perekonomian Indonesia

20. Sejak terbentuknya, ABRI telah memainkan peranannya dalam perekonomian Indonesia, yang umumnya disebabkan oleh alokasi dana yang tak memadai untuk angkatan bersenjata,¹¹ dan sebagai akibatnya ABRI terpaksa harus mengumpulkan dana sendiri.¹² Praktek 'Anggaran Non-Bujeter' ini akhirnya menjadi berurat berakar secara kelembagaan.¹³

21. Proses ini dimulai pada zaman Revolusi, ketika TNI harus melakukan improvisasi untuk menyediakan kebutuhan prajuritnya serta kebutuhan negara yang sedang berjuang. Tetapi keterlibatan mereka yang mendalam dalam perekonomian baru dimulai pada akhir 1950-an, ketika tentara mengambil peran sentral dalam semua aspek kehidupan bernegara. Nasionalisasi yang terjadi pada tahun 1957 memberikan tentara kontrol terhadap sejumlah aset negara, yang digunakannya untuk kepentingan lembaga dan perorangan. Para prajurit ABRI juga menduduki posisi-posisi yang kuat di lembaga-lembaga penting milik negara, seperti Badan Urusan Logistik atau Bulog, yang bertanggungjawab atas pembagian bahan makanan pokok.¹⁴ Ini merupakan awal dari peran terlembaga ABRI sebagai kekuatan ekonomi yang besar dalam negara.

22. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto mengurangi alokasi anggaran untuk militer dari hampir 30% menjadi kurang dari 10% dari APBN.¹⁵ Ia menuai pujian atas apa yang tampak seperti pengurangan peran militer dalam masyarakat. Namun, pada saat yang sama ABRI telah menjadi lebih besar, baik dalam hal ukuran maupun jangkauan wilayah. ABRI juga telah mengembangkan perannya dalam berbagai urusan negara. Segala kekurangan yang diderita oleh ABRI dapat dibayar dengan berbagai usaha yang dilakukannya.¹⁶

23. Tujuan pembangunan rezim Orde Baru membenarkan peran ekonomi ABRI.¹⁷ Konsep *kekayaan* (di mana orang militer diberi jabatan sipil di berbagai instansi dan perusahaan negara) membenarkan peran ABRI dalam perekonomian negarai.¹⁸ Ini berkaitan erat dengan konsep

militer penting lainnya, yaitu pembinaan, suatu gagasan bahwa disiplin dan ketaatan militer adalah vital untuk kemajuan seluruh bangsa. Untuk menggabungkan fungsi-fungsi tersebut, ABRI membentuk kantor pusat masalah sosial politik (*Kasospol*).¹⁹ Hasilnya adalah sejumlah besar perwira yang hanya mengurus hal sipil, yang pada tahun 1992 telah berjumlah 14.000 orang (lihat bagian mengenai pemerintahan sipil di bawah).²⁰

24. Kontrol ABRI terhadap aset-aset negara membuatnya dapat memastikan bahwa semua bisnis yang bertalian dengan ABRI mendapat kontrak yang menguntungkan. Hal ini seringkali menyebabkan terjadinya operasi yang tidak efisien pada lembaga-lembaga negara demi kepentingan ABRI. Contoh paling nyata adalah Pertamina, konglomerat minyak milik negara yang hampir bangkrut pada pertengahan 1970-an, setelah terjadi penumpukan hutang besar-besaran dan menjadi “negara dalam negara”, yang penanggungjawabannya hanya kepada Presiden Soeharto sendiri.²¹ Krisis di Pertamina terjadi bertepatan dengan persiapan menuju intervensi di Timor-Leste dan untuk beberapa saat krisis itu sempat membuat TNI ragu mengenai kelayakan melancarkan invasi penuh di wilayah tersebut.²²

25. Selain dari peran formal mereka dalam birokrasi dan perusahaan milik negara, para perwira ABRI juga beroperasi dalam berbagai kapasitas di luar batasan hukum yang berlaku. Mereka dapat menggunakan posisi mereka sebagai perantara untuk para pengusaha yang mau membayar demi mendapat jalur istimewa. Banyak dari para pengusaha itu adalah orang Indonesia keturunan Cina yang menyiapkan modal dan kemampuan mengelola keuangan sementara perwira ABRI menyediakan pengaruh politis dan, bila perlu, kekuatan militer.²³ Salah satu anggota kelompok ini yang banyak dikenal adalah Liem Sioe Liong, teman dekat Soeharto sejak Orde Baru belum berkuasa. Banyak investor asing yang masuk melalui hubungan serupa.²⁴ Misalnya, PT Freeport, sebuah tambang emas dan tembaga di Papua Barat. Di sana ABRI dikontrak untuk memberikan jasa pengamanan sebagai bagian dari transaksinya dengan perusahaan tambang tersebut.

Reorganisasi ABRI pada masa Orde Baru

26. Pada zaman Soekarno, keempat angkatan bersenjata (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi) telah bersaing satu sama lain, dan pimpinan staf gabungan ketika itu tidak efektif untuk mengkoordinasi tugas-tugas pengamanan.²⁵ Pada akhir tahun 1950-an dan 1960-an, penyatuan dan pemusatan yang lebih besar dapat dicapai, dan pada tahun 1967 Presiden Soeharto dengan Orde Barunya menempatkan tugas-tugas militer di bawah komando sebuah kementerian, yaitu Departmen Pertahanan dan Keamanan atau Hankam.²⁶ Sejak 1967 hingga akhir kekuasaan Orde Baru, Panglima ABRI atau Pangab selalu dipegang oleh seorang jenderal angkatan darat. Kewenangan operasional dialihkan dari kepala staf angkatan masing-masing kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, yang cenderung dirangkap oleh Pangab. Perubahan-perubahan ini menegaskan dominasi angkatan darat secara *de facto* di atas ABRI.

27. Di bawah kepemimpinan Soeharto, sektor intelijen ABRI berkembang menjadi suatu posisi yang memiliki kekuatan sangat besar dalam militer. Intelijen menjadi salah satu aspek inti operasi keamanan internal, yang juga mencakup operasi wilayah, operasi tempur serta hukum dan ketertiban.²⁷ Penekanan terhadap setiap perbedaan pendapat di dalam negeri merupakan

¹⁹ Tulisan di *The Jakarta Post*, 13 Maret 2003, menyebut bahwa Freeport-McMoran Copper and Gold Inc. telah mengirim “dokumen konfidensial kepada kantor pengawas pemerintah di Kota New York serta kepada US Security and Exchange Commission, yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2001 perusahaan tersebut telah membayar AS \$4,7 juta untuk mempekerjakan sekitar 2.300 pegawai keamanan pemerintah Indonesia.” *The Australian Herald* (tulisan Sian Powell) pada tanggal 15 Maret 2003 melaporkan, Freeport mengungkapkan telah melakukan pembayaran sebesar AS \$11 juta kepada TNI selama dua tahun yang baru lewat. Freeport menyatakan bahwa “Tambang Grasberg telah dinyatakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu kepentingan nasional yang vital. Pernyataan ini berarti bahwa militer memainkan peran penting untuk mengamankan wilayah di mana perusahaan bekerja.” Pernyataan Freeport menerangkan bahwa ia telah membayar onkos untuk “pengamanan yang berkaitan dengan pemerintah” untuk operasi tambang ini sebesar AS \$5,8 juta pada tahun 2001 dan AS \$5,6 juta pada tahun 2002 (lihat <http://www.minesandcommunities.org/Action/press127.htm>).

fungsi utama angkatan bersenjata. Ketika dipadukan dengan struktur komando terpusat yang baru, sektor intelijen yang semakin berkembang ini membawa dampak yang signifikan pada kebijakan dan sikap ABRI.

28. Presiden Soeharto mulai berkuasa pada masa-masa yang bergolak, dan salah satu dari struktur pertama yang dibentuknya untuk melindungi posisinya adalah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib. Ia memiliki kendali langsung terhadap lembaga yang berada di luar konstitusi dan sangat kuat ini.²⁸ Lembaga ini sangat anti komunis dalam tujuannya, dan misinya adalah:

Memulihkan keamanan dan ketertiban sebagai akibat pemberontakan G30S/PKI [yaitu 'kup' 1965] serta kegiatan-kegiatan ekstrimis dan subversif lainnya.²⁹

29. Pada tahun 1966, BPI atau Badan Pusat Intelijen diganti namanya menjadi Koordinasi Intelijen Nasional atau KIN dan dibawah oleh Presiden Soeharto melalui Kopkamtib. Sebuah lembaga lebih informal yang memainkan peran penting pada masa-masa awal pemerintahan Orde Baru di Indonesia adalah Satuan Operasi Khusus atau Opsus yang dipimpin oleh Jenderal Ali Moertopo. Badan ini membantu mengatur pemilu tahun 1971 dan secara rahasia menjawab berbagai tantangan seperti mengakhiri 'Konfrontasi' dengan Malaysia dan merekayasa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua Barat pada tahun 1969.³⁰ Pada tahun 1974, Opsus erat dikaitkan dengan *think-thank* sipil, Centre for International Strategic Studies atau CSIS, dalam membangun strategi yang berujung pada pengambilalihan Timor-Leste (lihat bab 3 mengenai sejarah konflik).

30. Pada tahun 1974, setelah kerusuhan besar yang dikenal dengan Malari yang menyingkap adanya ketidakpuasan yang meluas pada Orde Baru dan terjadinya perpecahan yang serius dalam tubuh militer sendiri, Soeharto melakukan konsolidasi dan pemusatan aparat intelijen dan keamanan dalam negeri. Kekuatan yang besar dipusatkan pada Mayor Jenderal Benny Moerdani yang mengepalai bagian intelijen di Departemen Pertahanan dan Keamanan sekaligus wakil kepala Badan Koordinasi Intelijen dan kepala Pusat Intelijen Strategis. Sistem pemeriksaan dan keseimbangan militer dan politik yang biasanya mengendalikan badan intelijen dihapuskan, dan intelijen memperoleh kekuatan dan pengaruh dalam tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jenderal Moertopo serta Moerdani, dengan jaringan intelijen mereka, memainkan peran kunci dalam pengembangan dan penerapan kebijakan di Timor-Leste pada tahun 1974-1975.

Struktur Organisasi ABRI di Timor Timur

31. Pada sub-bab ini akan dijelaskan tentang struktur komando ABRI selama 25 tahun masa intervensi, invasi, dan pendudukan Indonesia di Timor-Leste. Di sini akan ditelusuri bagaimana ABRI berusaha untuk menyamakan struktur organisasinya di Timor Timur dengan struktur organisasinya di Indonesia, sambil harus menghadapi kenyataan bahwa sifat konflik yang ada memaksa ABRI untuk memperlakukan Timor Timur sebagai kasus yang khusus dan pelik selama berlangsungnya masa pendudukan.

32. Selama masa pendudukan 24 tahun, sejumlah pergantian struktur dan kebijakan dilakukan dalam pengaturan militer Indonesia di Timor Timur. Perubahan-perubahan ini dipengaruhi oleh sifat konflik di Timor-Leste sendiri oleh bantuan internasional, dan kadangkala oleh pemerhatian internasional dan akhirnya oleh tekanan internasional agar Indonesia meninggalkan wilayah tersebut. Tahap-tahap keterlibatan militer Indonesia di Timor-Leste adalah sebagai berikut:

- Operasi intelijen rahasia pada tahun 1974 dalam rangka persiapan untuk melakukan tindakan pengambilalihan militer dan pendudukan secara penuh;
- Pembentukan struktur komando militer di Timor Timur untuk apa yang diistilahkan sebagai masa transisi, yang berlangsung hingga akhir 1970an ketika ABRI berupaya untuk melakukan konsolidasi dan menghancurkan perlawanan bersenjata;
- Pengalihan komando ke struktur komando regional konvensional ketika ABRI menyatakan bahwa Timor Timur telah 'aman';
- Perluasan struktur teritorial ABRI setelah 1979 untuk mengendalikan masyarakat sipil ketika mereka turun dari gunung-gunung dan ditempatkan di berbagai kamp dan desa;
- Pembentukan dua struktur komando secara sejajar, yaitu komando tempur dan komando teritorial pada tahun 1980an;
- Keputusan untuk memperlakukan Timor Timur sebagai sebuah provinsi yang 'normal' setelah Indonesia untuk sebagian membuka Timor Timur pada akhir tahun 1988;
- Pergeseran fokus menuju operasi intelijen dan penggunaan Brimob untuk mencegah penyebaran kegiatan bawah tanah dan demonstrasi masyarakat pada tahun 1990an;
- Pengerahan pasukan Kostrad pada akhir 1998 saat terbentuknya milisi;
- Pembentukan struktur komando khusus setelah jajak pendapat (tanggal 30 Agustus 1999), ketika Presiden Habibie menyatakan diberlakukannya darurat militer di Timor Timur,
- Pencabutan kembali struktur komando khusus pada akhir bulan September 1999, kemudian diganti dengan Satuan Tugas Gabungan Timor Timur untuk mengkoordinasi pengunduran diri Indonesia dengan kedatangan Interfet (International Force for East Timor).

33. Uraian ini merupakan latar belakang untuk bab-bab tentang pelanggaran hak asasi manusia pada Bagian 7 dalam laporan ini, dan Bagian 8: Akuntabilitas dan Tanggung Jawab. Uraian ini tidak dimaksudkan untuk memberi analisis menyeluruh dari semua faktor yang berperan dalam pergantian struktur organisasi dan kebijakan ABRI, atau segala dampak yang ditimbulkan oleh pergantian tersebut. Sebaliknya, uraian ini menyoroti berbagai perkembangan penting yang relevan dengan hal-hal yang menjadi pusat perhatian Komisi.

Table 1 - TABEL: Struktur komando militer di Timor Timur

Tanggal	Komando	Operasi besar yang diketahui
Akhir 1974	Operasi Khusus (Opsus) ³¹	Operasi Komodo
Awal 1975	Asistan I/ Intelijen, Departemen Pertahanan dan Keamanan, didukung oleh pasukan khusus Kopassandha ³²	Operasi Flamboyan
31 Agustus 1975	Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja Gabungan (Kogasgab Seroja). ³³	Operasi Flamboyan Operasi Seroja (invasi)
Agustus 1976	Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan Timor Timur (Kodahankam)	Operasi Seroja
Oktober 1978	Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja (Kogasgab Seroja)	Operasi Seroja Operasi Skylight
26 Maret 1979	Komando Regional Militer 164/Wira Dharma (Korem 164)	Operasi Keamanan Operasi Kikis Operasi Persatuan
1984	Komando Operasi Keamanan Timor (Koopskam Timor Timur). (Komando Perang dan intelijen)	Operasi Watumisa 1 Operasi Watumisa 2
Mei 1990	Komando Pelaksanaan Operasi Timor Timur (Kolakops Timor Timur).	
Maret 1993	Komando Resort Militer 164 (Korem 164)	Tidak ada operasi formal vana

		dilakukan, meskipun pasukan perang ditempatkan secara permanen di Timor Timur.
7 September 1999	Komando Penguasa Darurat Militer Timor Timur	
23 Sep 1999	Satuan Tugas Indonesia di Timor Timur	

Sumber: CAVR.

Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja³⁴, Agustus 1975 - Agustus 1976

34. Keterlibatan militer Indonesia di Timor-Leste dimulai pada pertengahan 1974, ketika Satuan Operasi Khusus (Opsus) di bawah pimpinan Mayor-Jenderal Ali Moertopo mulai melaksanakan operasi rahasia yang disebut dengan *Operasi Komodo*. Pada awal 1975, Operasi Komodo berakhir dan diganti dengan Operasi Flamboyan, di bawah kendali Mayor-Jenderal Benny Moerdani, kepala intelijen di Departemen Pertahanan dan Keamanan. Operasi tersebut mendapat dukungan sumber daya yang lebih baik dan melibatkan satuan pasukan khusus (Kopassandha), serta melakukan aktivitas yang lebih luas daripada Operasi Komodo, termasuk menciptakan ketidakstabilan, mengumpulkan intelijen, dan melatih anggota kelompok paramiliter yang direkrut dari masyarakat Timor Timur. Pada tanggal 31 Agustus 1975, Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Panggabean, membentuk Komando Satuan Tugas Gabungan Operasi Seroja (Kogasgab Seroja).³⁵ Dengan demikian, keterlibatan militer Indonesia di Timor Portugis ditempatkan langsung di bawah arahan dan kendali komando pusat ABRI.

35. Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja dipimpin oleh Brigadir-Jenderal Soeweno, yang mengomandoi invasi penuh pada bulan Desember 1975, yang dikenal dengan nama Operasi Seroja. Operasi ini merupakan operasi militer gabungan yang melibatkan pasukan dari seluruh angkatan, termasuk yang berikut:

- Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad,
- Komando Pasukan Sandhi Yudha, Kopassandha
- Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat, milik angkatan udara
- Batalyon-batalyon marinir serta infanteri dari beberapa komando daerah.

36. Meskipun Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja langsung memegang komando atas semua pasukan, operasi tersebut dilaksanakan di bawah perintah Kostrad, mula-mula oleh Komandan Tempur (Kopur) II, kemudian setelah Maret 1976 oleh Komandan Tempur Lintas Udara (Kopur Linud).

37. Pada awal 1976, Komando Seroja membagi Timor Timur menjadi empat sektor operasi. Sektor A meliputi Dili dan daerah Oecusse, Sektor B meliputi kabupaten Bobonaro, Covalima, Ermera dan Liquiça, Sektor C meliputi Aileu, Ainaro, Manufahi dan Manatuto, dan Sektor D meliputi Baucau, Viqueque serta Lautem. Dengan perkecualian sektor A (Dili), suatu gabungan Resimen Tim Pertempuran (RTP) ditugaskan untuk mengawasi operasi di setiap sektor. Setiap Resimen Tim Pertempuran terdiri dari 6-8 batalyon teritorial, yang mendukung satuan artileri, kavaleri, dan zeni yang disebut sebagai satuan Bantuan Tempur atau Banpur.

Komando Daerah Militer Timor Timur, Agustus 1976-Oktober 1978

38. Segera setelah parlemen Indonesia meloloskan undang-undang untuk menyatukan Timor Timur dengan Republik Indonesia pada bulan Juli 1976, ABRI melakukan reorganisasi

³⁴ Indonesia menyesuaikan beberapa batas kabupaten (Zumalai dulunya bagian dari Bobonaro/Ainaro, dan bukan bagian dari Covalima), juga mengubah beberapa nama di akhir 1970-an (Same menjadi Manufahi, Lospalos menjadi Lautem).

struktur komandonya di Timor Timur untuk menggabungkan apa yang selama ini merupakan operasi eksternal menjadi struktur organisasi militer biasa. Pada tanggal 4 Agustus 1976, Kementerian Pertahanan dan Keamanan pada dasarnya membuat operasinya di Timor Timur menjadi operasi dalam negeri dengan cara membentuk Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan (Kodahankam) Timor Timur. Dokumen-dokumen kementerian menjabarkan peran kodahankam Timor Timur dalam rangka melakukan konsolidasi posisi militer selama apa yang disebut dengan masa transisi:

Komando Pertahanan Wilayah Timor Timur dibentuk dengan maksud untuk membangun landasan bagi Pembinaan dan Pengembangan Pertahanan dan Keamanan di Timor Timur selama “masa transisi,” yang berlangsung sampai pada akhir Repelita Kedua (tahun 1979), serta untuk menerapkan Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Nasional.³⁶

39. Perubahan yang terjadi sangat besar:

- Tentara mulai membentuk sistem komando teritorial, terdiri atas Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil). Pada mulanya, Kodim diberi nomor 01 (Dili) sampai dengan 13 (Oekusi). Instruksi pada bulan Februari 1977 tentang organisasi Kodahankam memperhitungkan bahwa delapan dari tiga belas Kodim yang ada akan beroperasi di bawah Korem, sementara lima lainnya akan berdiri sendiri dan melapor langsung pada Kodahankam. Akan tetapi, mengingat Korem 164 baru dibentuk Maret 1979, semua Kodim dalam kenyataan berada di bawah komando dan kendali langsung Kodahankam dan kemudian, sejak Oktober 1978 hingga Maret 1979, di bawah penerus Kodahankam yaitu Kogasgab Seroja.
- Kodahankam membawahi beberapa jenis satuan tempur. Meneruskan praktek yang dilakukan pendahulunya, Kodahankam mengerahkan Resimen Tim Pertempuran atau RTP di sektor-sektor operasi. Pada akhir 1976 hingga awal 1977 struktur ini meliputi RTP 16 di sektor B, RTP 13 di sektor C, dan RTP 15 di sektor D. Selain itu juga dikerahkan Batalyon Tempur Berdiri Sendiri serta Batalyon Bantuan Tempur Berdiri Sendiri yang semuanya di luar RTP, yang meliputi pasukan artileri, kavaleri, zeni, dan pasukan khusus lainnya.
- Kodahankam meliputi suatu satuan yang disebut Satuan Tugas/Badan Pelaksanaan Intelijen yang disingkat Satgas/Balak Intel, atau Satgas Intel saja. Satuan ini memainkan peranan penting dalam tindak penindasan di dalam wilayah Timor Timur. Satgas Intel akan terus memainkan peran ini hingga dua dekade berikutnya.
- Polisi militer dikerahkan di Dili dan kota-kota utama lainnya. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Polisi Militer memainkan peran aktif dalam pertumbuhan sistem pusat-pusat penahanan dan berdirinya fasilitas rumah tahanan. CAVR tidak memiliki data yang menunjukkan bahwa Polisi Militer melakukan tindakan disipliner terhadap personil militer selama masa ini.
- Satuan polisi tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan dibentuk pada masa ini, meskipun selama beberapa tahun mereka beroperasi langsung di bawah komando Kodahankam.
- Birokrasi militer juga mengalami perkembangan yang signifikan.*³⁷

40. Selama periode ini, ABRI terlibat dalam operasi militer penuh melawan Fretilin/Falintil, yang memegang kendali di wilayah di pedalaman yang cukup luas termasuk sejumlah besar masyarakat sipil. Senjata militer internasional, terutama dari AS, memainkan peranan penting dalam memberikan kemampuan kepada ABRI untuk menghancurkan markas basis perlawanan Fretilin di gunung dan di hutan, hinggamengakhiri fase perlawanan ini.

Komando Tugas Gabungan (Kogasgab) Operasi Seroja, Oktober 1978 - Maret 1979

41. Pada tanggal 12 Oktober 1978 Kogasgab Seroja yang baru, didirikan.³⁸ Kogasgab Seroja ditempatkan di bawah kendali Kodam XVI/Udayana, yang meliputi Bali, dan Nusa Tenggara Barat dan Timur.³⁹ Sebulan kemudian, kendali operasi terhadap Timor Timur dialihkan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan, yang ketika itu mengawasi wilayah tersebut, kepada Komando Wilayah Pertahanan atau Kowilhan II, yang meliputi Jawa, Bali, dan seluruh Nusa Tenggara. Semua perubahan tersebut mengisyaratkan sebuah pengakuan oleh ABRI bahwa mereka telah memperoleh kemenangan penting atas Fretilin/ Falintil, dan bahwa tak lama lagi keadaan akan segera 'normal kembali'. Keputusan Menteri mengenai pembentukan komando baru menyatakan:

*Selain dari staf jenderal yang telah ada, Komandan Kodahankam Timor Timur juga dilayani oleh sejumlah tenaga spesialis (Informasi, Keuangan, Perkembangan Mental, Sejarah, Hukum, dan Psikologi) sejumlah badan pelaksanaan (Komunikasi dan Elektronik, Polisi Militer, Kesehatan, Administrasi Personil, Logistik Komando, Dermaga Laut dan Lapangan Udara), serta sejumlah satuan operasional (Brigif/RTP, satuan tugas intelijen, batalyon berdiri sendiri, satuan wilayah, Satuan Tugas Laut dan Udara, dll)

Dari sejak pembentukannya dan dalam waktu sesegera mungkin Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja (akan) menghancurkan sisa-sisa Gerombolan Pengacau Keamanan, untuk mempertahankan dan meningkatkan keamanan di wilayah ini dan membantu dalam persiapan normalisasi pemerintahan sipil yang berjalan, dengan melaksanakan Operasi Keamanan Dalam Negeri di propinsi Timor Timur.⁴⁰

42. Brigadir-Jenderal Dading Kalbuadi, yang telah memimpin Kodahankam sejak 1976, ditunjuk menjadi Komandan Kodam XVI/Udayana, dan karena itu tetap langsung mengomandoi operasi militer di Timor Timur.

43. Di bawah komando Kolonel Sutarto, Kogasgab Seroja mengawasi tahap akhir Operasi Seroja di Timor Timur pada akhir 1978 dan awal 1979 (lihat bab 3 mengenai sejarah konflik). Dengan jatuhnya basis pertahanan Fretilin yang terakhir di kawasan Gunung Matebian (Nopember 1978), Gunung Kabalaki (sekitar Januari 1979), Fatubes, Ermera (Februari 1979) dan Alas, Manufahi (Maret 1979), ABRI memperoleh kekuasaan formal atas seluruh wilayah Timor Timur. Kematian Presiden Fretilin Nicolau Lobato pada tanggal 31 Desember 1978 semakin memberi alasan bagi tentara Indonesia untuk berpikir bahwa pertempuran telah usai. Semua perkembangan ini mengawali reorganisasi lebih lanjut pada struktur organisasi militer di Timor Timur.

Korem 164/Wira Dharma, 1979-1999

44. Dengan dinyatakannya Timor Timur dalam kondisi aman, ABRI kemudian mengakhiri Operasi Seroja dan pada tanggal 26 Maret 1979 ABRI membentuk Komando Resort Militer 164/Wira Dharma atau Korem 164.⁴¹ Ini merupakan satu dari empat Korem yang berada di bawah Kodam XVI/Udayana, dengan markas besar di kota Denpasar, Bali. Karena rakyat sipil yang menyerah ditempatkan di kamp-kamp penahanan dan kemudian di desa-desa, struktur teritorial pun diperluas. *Babinsa* (bintara pembina desa), memperluas jangkauan militer hingga ke tingkat desa. Menjelang 1990 jumlah Babinsa melebihi jumlah keseluruhan desa-desa di Timor Timur.⁴²

45. Ketika melaksanakan operasi, komandan Korem juga menjabat sebagai komandan Kolakops. Jadi, Kolakops hanyalah nama lain dari Korem, meskipun ia memiliki pasukan non-organik tambahan.⁴³

46. Pada tahun 1979, Menteri Pertahanan dan Keamanan mengeluarkan perintah operasi tempur di Indonesia selama 1979-80. Tujuan operasi tersebut di Timor Timur dijelaskan di bawah ini:

a) Penghancuran sisa-sisa kegiatan dan kemampuan perlawanan bersenjata dari Gerakan Pengacau Keamanan agar mereka tidak lagi mempunyai kemampuan strategis, khususnya dalam kaitannya dengan perlawanan politik oleh unsur-unsur Gerakan Pengacau Keamanan di luar negeri.

b) Penutupan Timor Timur sehingga tidak mungkin bagi gerakan Pengacau Keamanan untuk lolos dari wilayah tersebut atau menyelundupkan bantuan fisik dari luar ke dalam wilayah Timor Timur.

c) Bantuan program rehabilitasi infrastruktur dan normalisasi kegiatan penduduk.⁴⁴

Komando Operasi Keamanan di Timor Timur 1984-1990

47. Tahun 1984 ABRI menyusun struktur komando tempur yang baru yang disebut Komando Operasi Keamanan Timor Timur (Koopskam Timor Timur).⁴⁵ Kostrad mendominasi komando tempur yang baru itu. Komandan Divisi Infanteri I Kostrad (Divif I/Kostrad) memegang posisi pimpinan dan para stafnya mengisi berbagai posisi dalam struktur komando perang yang baru itu.

48. Selama periode ini, terdapat hubungan hirarkis antara Korem dan Koopskam, di mana Koopskam memegang komando utama. Koopskam bertanggung jawab atas operasi tempur dan intelijen, sedang Korem bertanggung jawab atas urusan territorial. Kepala Komando Operasi Keamanan adalah seorang brigadir-jenderal dan karenanya lebih tinggi dari komandan Korem 164, yang adalah seorang kolonel.

49. Baik Kopassandha maupun Kostrad memainkan peran yang besar dalam pertempuran di Timor Timur selama periode ini. Perwira yang ditunjuk untuk menjadi komandan Koopskam selama pertengahan tahun 1980an sekaligus mengabdikan sebagai komandan Divisi Infanteri Kostrad yang bermarkas di Jawa Barat.^{*} Penunjukan ganda ini memudahkan koordinasi antara Kopassandha dan pasukan Divif I/Kostrad yang bermarkas di Jawa Barat.

50. Pada bulan Juli 1988 Divisi Infanteri Kedua Kostrad ditunjuk untuk menggantikan Divisi Infanteri Pertama di bawah struktur Komando Operasi Keamanan untuk Timor Timur. Sebuah buku sejarah militer menunjukkan bahwa pada serah-terima tersebut, ABRI menganggap Falintil dalam keadaan lemah, namun mengakui kemampuannya untuk melakukan operasi maupun mempengaruhi penduduk setempat.

Sisa-sisa GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan) yang berkeliaran di hutan-hutan Timor Timur, terutama yang terdapat di sektor tengah dan timur, secara fisik berjumlah kurang dari 244 orang. Mereka memiliki sekitar 217 buah senjata, yang terdiri dari berbagai jenis senjata ringan, laras panjang dan pendek.

Mereka adalah bekas pemimpin dan anggota Fretilin dan ideologi mereka berhaluan komunisme, Marxisme and Leninisme. Mereka masih mampu menunjukkan eksistensi mereka. Melalui berbagai cara, mereka mempengaruhi segelintir orang untuk mendukung sebuah negara merdeka yang terpisah dari Republik Indonesia.⁴⁶

Operasi dilaksanakan oleh Kolakops Timor Timur, 1990-1993

51. Pada bulan Desember 1988, sebagai tanggapan atas permintaan dari Gubernur Mario Carrascalão di awal tahun tersebut, Presiden Soeharto menandatangani Surat Keputusan Presiden No. 62 tahun 1988, yang memberikan provinsi Timor Timur "status yang setara" dengan ke-26 provinsi lainnya. SK No. 62 tersebut mengizinkan untuk bepergian secara lebih bebas di dalam wilayah provinsi, membolehkan warga negara Indonesia dari wilayah lain di Indonesia untuk memasuki Timor Timur, memberikan izin masuk bagi wisatawan ke Timor Timur, dan membolehkan wartawan luar negeri untuk mengunjungi provinsi tersebut (setelah memperoleh persetujuan resmi). Semua ini merupakan upaya untuk memperlihatkan sikap yang ramah dari pendudukan militer Indonesia atas wilayah tersebut. Pada tahun 1989 Komandan Korem, Kolonel Rudolf Samuel Warrouw, mengumumkan operasi baru dengan nama Operasi Senyum yang

^{*} Ini dapat dikonfirmasi bagi Brigjen. Sugito (sekitar 1983-1985), Brigjen Warsito (1985-1987), dan Brigjen H.B Mantiri (1987-1988), dan juga kemungkinan sama untuk Brigjen Sutarto (? – 1983).

tujuannya adalah mengurangi pembatasan terhadap perjalanan, membebaskan sejumlah tahanan politik serta membatasi penggunaan penyiksaan selama interogasi.

52. Keputusan untuk memperlakukan Timor Timur sebagai provinsi “biasa” mengakibatkan perubahan lebih jauh pada struktur militer. Pada bulan Mei 1990, Komando Operasi Keamanan untuk Timor Timur dikembalikan ke Komando Pelaksanaan Operasi di Timor Timur (Kolakops Timor Timur).⁴⁷ Komandan Korem, Kolonel Rudolf Samuel Warouw, ditunjuk membawahi Kolakops dan ia dipromosikan menjadi brigadir-jenderal, menggantikan Brigadir-Jenderal Mulyadi, seorang jenderal garis keras.

53. Meski demikian, periode ini terjadi bersamaan dengan bangkitnya pemuda perkotaan dan gerakan bawah tanah dari gerakan Perlawanan dan digunakannya demonstrasi oleh rakyat menentang rezim pemerintah Indonesia (lihat bab 3 mengenai Sejarah Konflik). Pada tanggal 12 November 1991, tentara militer Indonesia direkam melakukan pembunuhan massal atas para demonstran yang melakukan aksi damai di pemakaman Santa Cruz, Dili (Lihat bab 3 mengenai Sejarah Konflik dan bab 7 mengenai pembunuhan dan penghilangan]. Meski Dewan Kehormatan Militer dibentuk dan sejumlah perwira tinggi dipecat dari kedinasan dan beberapa perwira menengah dan prajurit di-mahmilub-kan, tidak ada tindakan langsung untuk mengubah struktur militer di Timor Timur.

Komando Regional Militer 164/Wira Dharma (Korem 164), 1993 – 1999

54. Meskipun dunia internasional mengutuk militer Indonesia setelah pembunuhan massal di Santa Cruz, dalam bulan-bulan berikutnya ABRI merasa yakin dapat mengendalikan gerakan Perlawanan. Dokumen militer bulan Agustus 1992 menyebutkan:

Tindakan represif yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesian telah menceraai-beraikan sebagian besar jaringan bawah tanah, baik di dalam maupun di luar Timor Timur.⁴⁸

55. Kepercayaan diri militer tersebut makin tinggi dengan ditangkapnya Xanana Gusmão pada tanggal 20 November 1992 dan Mauhunu (Antonio Gomes da Costa) tanggal 3 April 1993.

56. Upaya militer semakin bergeser ke arahpengendalian dan penekanan terhadap perlawanan kelompok pemuda. Upaya ini dipimpin langsung oleh Kopassus (Komando Pasukan Khusus).⁴⁹ Ketika Komando Pelaksanaan Operasi di Timor Timur (Kolakops) dibubarkan, Satuan Gabungan Intelijen (SGI) dialihkan ke Komando Regional Militer 164 dan namanya diubah menjadi Satuan Tugas Intelijen (Satgas Intel). Bertentangan dengan kebijakan resmi untuk menormalisasikan status Timor Timur dan mengurangi kehadiran militer di sana, pada akhir 1994 Brigadir-Jenderal Prabowo Subianto dan Kopassus memulai operasi perang urat syaraf untuk mengintimidasi dan meneror penduduk Timor Timur, menambah pelatihan militer untuk pegawai negeri dan mahasiswa, serta memperbanyak kelompok paramiliter dan mendirikan organisasi milisi baru.⁵⁰

57. Pemberian tekanan pada tindakan represif atas perlawanan kota selama tahun 1990-an juga ditandai oleh kehadiran sejumlah besar dan penggunaan satuan polisi anti huru-hara, Brimob.⁵¹ Satuan-satuan Brimob ditempatkan dalam jumlah yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah lainnya di Indonesia selama periode itu.* Di Timor Timur, pada bulan Agustus 1998, hampir 7.400 personel Brimob ditempatkan di sana, yang terbagi dalam satuan teritorial (sebanyak 214 personel) dan satuan-satuan yang dibawa dari luar

* Rasio pasukan Brimob terhadap penduduk sipil di Indonesia adalah 1:20,000 (Lowry, hal. 94); di Timor Timur, jumlah ini berkisar 1: 700 (berdasarkan 1,013 Brimob tahun 1998; sensus 1990 jumlah penduduknya 747,557).

daerah (7.156), yang terkenal dengan kekejamannya (Lihat bab 7 mengenai Penahanan dan Penyiksaan.)

Terus hadirnya pasukan tempur

58. Pada Maret 1993, Kolakops dibubarkan dan fungsinya dialihkan ke Korem. Operasi tempur biasanya bukan merupakan tanggung jawab komando teritorial.⁵² Sektor Tempur A dan B di Timor Timur dialihkan ke Korem 164 dan ABRI terus menempatkan pasukan tempur dalam jumlah besar. Informasi rinci mengenai penempatan pasukan sejak tahun 1998 didapatkan dari dokumen rahasia militer yang diselundupkan keluar dari Timor Timur.⁵³ Dokumen-dokumen ini secara jelas menyebutkan penempatan pasukan tempur yang banyak: lima batalyon tempur infanteri dan sejumlah kontingen dengan tugas khusus sudah berada di Timor Timur sejak bulan Agustus 1998. Selain itu, satuan pelatihan Kopassus juga ditempatkan, yang merupakan bukti bahwa Timor Timur telah digunakan sebagai medan latihan bagi pasukan elit ABRI tersebut.⁵⁴

59. Selama periode antara saat dibubarkannya Komando Pelaksanaan Operasi di Timor Timur dan tahun 1999, ABRI terus menempatkan pasukan Kostrad dan Kopassus serta infanteri dan satuan lainnya dari luar Timor Timur. Dari tahun 1993 hingga 1997, rata-rata setiap saat ada enam batalyon luar yang ditempatkan di Timor Timur. Data Komisi menunjukkan tiap saat hanya satu batalyon Kostrad ditempatkan di Timor Timur selama periode tersebut. Pada tahun 1995, ABRI mulai menempatkan pasukan strategis dengan tugas khusus ke Timor Timur. Kontingen pertama pasukan tempur ini, yang bernama sandi Rajawali^{*} ditempatkan di sektor tempur di bawah Korem 164 pada bulan Oktober 1995.⁵⁵ Mereka kebanyakannya ditarik dari Kostrad, dan pasukan tersebut biasanya dimutasi setiap 12 bulan. Pada akhir 1998, ditempatkan pasukan dari kelompok intelijen dan anti-teror Kopassus. Mereka digandengkan dengan Satgas Intel (yang lebih dikenal dengan sebutan awalnya, SGI). Pada tahun 1998, jumlah keseluruhan batalyon luar yang ditempatkan di Timor Timur meningkat hingga mencapai paling sedikit dua belas batalyon.⁵⁶

Komando Darurat Militer di Timor Timur, September 1999

60. Sebagai buntut kekerasan yang terjadi setelah Jajak Pendapat, dan di bawah tekanan internasional yang keras untuk mengizinkan pasukan penjaga perdamaian luar untuk memasuki Timor Timur, Jenderal Wiranto mengirim surat kepada Presiden B. J. Habibie pada tanggal 6 September 1999 mengenai “perkembangan terakhir situasi Timor-Timur dan rekomendasi kebijakan untuk penanganannya”.⁵⁷ Wiranto menerangkan bahwa keamanan semakin memburuk, menjadi “brutal dan anarkis dan menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda”. Di antara alasan yang dikutipnya adalah “kekecewaan kelompok pro-integrasi yang disebabkan oleh keberpihakan pihak Unamet” selain “kesalahan konsepsi di kelompok pro-integrasi yang meyakini bahwa mereka dapat mengubah hasil referendum melalui kekerasan.” Tekanan internasional menyebabkan Presiden B. J. Habibie mengambil tindakan berdasarkan surat tersebut, dengan menandatangani Keppres Nomer 107 1999 yang mengumumkan berlakunya darurat militer di Timor Timur mulai tengah malam tanggal 7 September 1999.

61. Setelah pengumuman darurat militer tersebut, Jenderal Wiranto mengeluarkan Perintah Panglima yang menggariskan pembentukan Komando Penguasa Darurat Militer di Timor Timur sejak tengah malam 7 September 1999.⁵⁸ Tujuan utama komando seperti dinyatakan ini adalah mengembalikan keamanan di Timor Timur dalam waktu yang sesingkat mungkin, memberikan jaminan keamanan sehingga hasil Jajak Pendapat dapat dijalankan, dan mempertahankan kepercayaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, termasuk ABRI dan Polri.

62. Mayor Jenderal Kiki Syahnakri diangkat menjadi panglima darurat militer. Ia dan perwira tinggi lain yang baru diangkat pernah bertugas di Timor Timur selama tahun 1990-an, termasuk

^{*} Berbeda dari Kopassus Rajawali

beberapa di antaranya pernah memegang posisi komandan menjelang diadakannya jajak pendapat. Di antara mereka sejumlah perwira Kopassus.^{*} Ini artinya sejumlah perwira yang kebanyakan Kopassus memegang komando atas pasukan Kostrad selama periode darurat militer tersebut. Wiranto mungkin ingin perwira Kopassus memegang posisi komando sebagai upaya mengurangi kecemasan terhadap personel Kopassus yang memainkan peran utama dalam mengorganisir milisi dan untuk mencegah berkembangnya ketegangan antar-satuan. Selama periode darurat militer inilah terjadi pelanggaran HAM yang paling hebat sepanjang tahun 1999 itu.

Komando Darurat Militer dibubarkan: Satuan Tugas Indonesia di Timor Timur

63. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara anggota utama mengingatkan bahwa Indonesia memiliki waktu yang terbatas untuk membuktikan bahwa darurat militer dapat secara efektif menciptakan ketertiban dan keamanan (Lihat Bab mengenai Sejarah, bagian Setelah Jajak Pendapat). Ketika nyata bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan, Presiden Habibie tunduk pada tekanan ini dan meminta bantuan dari PBB. Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 1264 pada tanggal 15 September 1999, dan Interfet dimobilisasi untuk mengembalikan perdamaian dengan wewenang sebagaimana terdapat dalam Bab VII Piagam PBB, dan ditempatkan pada tanggal 20 September. Pada tanggal 23 September 1999 atau segera sesudahnya, Presiden B J Habibie mengakhiri darurat militer di Timor Timur.⁵⁹ Komando Operasi Darurat Militer di Timor Timur dibubarkan dan dibentuk komando keamanan baru yang diberi nama Satuan Tugas Indonesia di Timor Timur. Satuan tugas ini dikepalai oleh Brigadir-Jenderal Polisi J.D. Sitorus, komandan Kolonel Sahala Silalahi dan wakil komandan Kolonel Suryo Prabowo. Satuan Tugas Indonesia di Timor Timur dibentuk untuk melakukan koordinasi dengan Interfet yang akan mendarat.

4.3 Militerisasi Masyarakat Timor Timur[†]

Pendahuluan

64. Masyarakat Timor Timur mengalami militerisasi besar-besaran selama pendudukannya oleh Indonesia. Sifat militerisasi tersebut beragam dalam hal cakupan dan intensitasnya dalam periode yang berbeda-beda selama konflik, akan tetapi umumnya cukup merasuk selama 24 tahun pendudukan, dan menyisakan dampak yang mendalam pada kehidupan semua orang Timor Timur.

65. Tak lama setelah Revolusi Bunga tanggal 25 April 1974, militer Indonesia meningkatkan perhatian intelijennya kepada Timor-Leste, dengan tujuan mendukung partai pro-integrasi Apodeti. Di penghujung tahun 1974 militer Indonesia mulai menjalankan operasi-operasi rahasianya di wilayah tersebut (lihat bab 3 Sejarah Konflik), dan telah mulai mempersenjatai dan memberi pelatihan militer kepada anggota partai Apodeti di Timor Barat.⁶⁰ Intelijen militer Indonesia merupakan arsitek utama pencaplokan Timor-Leste. Mereka melakukan kampanye diplomasi untuk mempertegas status Indonesia sebagai pihak yang berkepentingan, yang pada akhirnya membuat Indonesia untuk memutuskan menginvasi Timor Timur pada bulan Oktober 1975.

^{*} Yang pernah bertugas di Timor Timur adalah Kiki Syahnakri, Amirul Isnaeni, Geerhan Lentara, dan Komando Pasukan Khusus adalah Amirul Isnaeni, mungkin juga termasuk Liliek Koeshardinato dan Irwan Kusnadi.

[†] Bagian ini membahas berbagai jenis pasukan paramiliter yang dikerahkan di Timor-Leste oleh militer Indonesia. Demi kejelasan, istilah 'pasukan pertahanan sipil' digunakan untuk menyebut Hansip, Ratih, Wanra, dan lain-lain - semuanya adalah orang Timor-Leste yang direkrut oleh angkatan bersenjata Indonesia. Istilah 'paramiliter' digunakan untuk menyebut satuan-satuan pembantu asal Timor-Leste yang dibentuk oleh ABRI selama masa pendudukan, dan istilah 'milisi' digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok yang dibentuk dalam masa menjelang jajak pendapat tahun 1999. 'Pasukan pembantu' digunakan untuk menyebut berbagai badan ini secara keseluruhan.

66. Operasi-operasi intelijen merupakan bagian besar dari operasi militer Indonesia dalam berbagai periode yang berbeda selama konflik. Dimulai dengan operasi-operasi rahasia tahun 1974-75, selama tahun-tahun awal pendudukan kota-kota utama, sampai kepada penyerahan diri besar-besaran dan pemukiman kembali penduduk sipil tahun 1977-78, intelijen sangat menonjol perannya (lihat bagian mengenai angkatan bersenjata Indonesia dan perannya di Timor-Leste di atas; juga bab 3 mengenai sejarah konflik). Perlawanan merancang ulang strateginya setelah penyerahan diri besar-besaran, dengan membangun jaringan klandestin di tempat-tempat dimana penduduk sipil telah bermukim. Intelijen Indonesian menggunakan mata-mata orang Timor-Leste untuk mencoba menumpas jaringan ini. Hal ini telah menyisakan dampak yang mendalam terhadap rasa percaya dan kerekatan sosial komunitas Timor-Leste.

67. Indonesia menginvasi Timor-Leste dengan bantuan pihak-pihak yang mereka sebut "Partisan", yakni anggota Apodeti, UDT dan partai-partai lain yang melarikan diri ke Timor Barat mulai pertengahan 1974. Para Partisan ini memberi preseden kepada ABRI untuk menggunakan kaki tangan orang Timor Timur. Selama perang besar-besaran yang berlangsung tahun 1970-an, Indonesia membentuk batalyon-batalyon dan kelompok-kelompok paramiliter Timor-Leste, mengerahkan pasukan pertahanan sipil dan memaksa laki-laki dewasa dan anak-anak untuk memberi bantuan logistik bagi pasukan-pasukan tempur. Pada awal 1980-an, tentara Indonesia memaksa penduduk sipil dalam jumlah yang masif untuk berjalan melintasi seluruh pulau untuk menyapu bersih pasukan perlawanan yang tersisa (lihat Bab 3 Sejarah Konflik).

68. Struktur negara yang dipaksakan Indonesia kepada Timor Timur sudah sangat termiliterisasi. Hal ini bersumber dari keterlibatan yang luas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam politik dan ekonomi selama rezim Orde Baru Presiden Soeharto (lihat bagian atas mengenai ABRI dalam pemerintahan sipil di Timor-Leste). Di Timor Timur peran ABRI semakin besar jika dibandingkan dengan perannya yang biasa dalam Indonesia di zaman Orde Baru. ABRI terlibat langsung dalam pembentukan provinsi Timor Timur, dan setelah itu mendominasi pemerintahannya (lihat bagian mengenai pemerintahan sipil dibawah). Selama masa pendudukan Indonesia atas Timor-Leste, provinsi ini merupakan wilayah konflik, yang bervariasi dari perang besar-besaran di tahun-tahun awal, sampai konflik skala kecil sepanjang sebagian besar tahun 1980-an dan 1990-an. Dibanding provinsi lain di mana ABRI juga terlibat konflik, Timor Timur merupakan sebuah ekstrim. Tidak seperti di provinsi-provinsi tersebut, Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia hanya melalui invasi, aneksasi dan pendudukan. Dengan demikian ia berbeda dari Indonesia pada umumnya, dan ABRI harus menggunakan metode yang berbeda untuk menundukkannya. Selain itu, Timor Timur juga merupakan peraihan eksternal. Karena alasan-alasan inilah Timor Timur pada hakikatnya berbeda dari Indonesia, dan perilaku ABRI di dalam Timor Timur dengan demikian juga tidak umum. Hal inilah menjadi latarbelakang buat militerisasi mendalam di Timor Timur oleh pemerintah Indonesia.

69. Pada tahun 1990-an pemuda Timor Timur menjadi semakin terbuka dalam kemauannya untuk menentang pendudukan Indonesia. Tanggapan utama terhadap hal ini adalah pergeseran dalam strategi militer, dari melancarkan perang melawan Falintil menjadi perang intelijen melawan perlawanan klandestin yang semakin meningkat.

70. Gerakan kepanduan, kelompok-kelompok beladiri dan organisasi pelajar dan mahasiswa di sekolah-sekolah dan universitas dimanfaatkan untuk menerapkan disiplin dan kesetiaan kepada Indonesia di antara pemuda Timor Timur. Indonesia memberi penekanan khusus pada ideologi nasionalnya (Pancasila) dan pada pengamalan ritual-ritual nasional melalui seremoni bergaya militer dan acara-acara peringatan hari-hari besar nasional.

71. Sementara kegiatan-kegiatan ini mungkin memiliki sifat militeristik yang merasuk, pembentukan pasukan-pasukan paramiliter dari kalangan pemuda Timor Timur di pertengahan 1990-an adalah jelas-jelas brutal. Kelompok-kelompok ini, yang dilindungi oleh Kopassus, melakukan kegiatan kejahatan yang terorganisir pada siang hari dan penghilangan para

¹ Komisi mencatat adanya kesamaan dengan daerah konflik lain di Indonesia, seperti di Papua Barat dan Aceh.

pendukung kemerdekaan di malam hari. Kelompok-kelompok pemuda ini menjadi pendahulu untuk milisi yang dikembangkan secara kilat oleh ABRI/ TNI pada tahun 1998-99. Seperti pada tahun 1974-75, militer Indonesia kembali menggunakan kaki tangan orang Timor Timur untuk memberi semacam “penyangkalan yang dapat dipercaya” akan perannya sendiri dalam kekerasan yang terjadi. Namun demikian, pada tahun 1999 dan setelah adanya bukti jelas bahwa peran milisi-milisi ini adalah kepanjangan tangan TNI.

Militerisasi Timor Timur Pra-Indonesia

72. Timor Timur adalah negeri bergunung-gunung yang secara historis terbagi ke dalam kerajaan-kerajaan regional. Sebagian besar raja tradisional (*liurai*) memiliki pasukan-pasukan dari laki-laki setempat, yang sewaktu-waktu akan memerangi pasukan *liurai* yang bertetangga.⁶¹ Dalam berurusan dengan *liurai* Timor, Portugal menggunakan strategi adu domba, dan tak jarang menggunakan pasukan bersenjata *liurai* yang “bersahabat” untuk menumpas pembangkangan yang lain (lihat bab 3 Sejarah Konflik). Pola ini, di mana kekuatan luar memanfaatkan tangan para *liurai* sebagai perantara untuk mengangkat pasukan guna membela kepentingannya, dapat dilihat pula pada kegiatan rahasia Indonesia pada tahun 1974-75 dan dalam tahun-tahun pendudukan sesudahnya.

73. Perang Dunia Kedua mendatangkakan pertama-tama pasukan Australia dan Inggris ke Timor Portugis yang netral, dan kemudian pasukan pendudukan Jepang. Banyak rakyat Timor Timur mengambil resiko besar untuk membantu sejumlah kecil pasukan Australia dalam kegiatan gerilyanya, sementara yang lain berpihak kepada Jepang atau terperangkap di antara dua kekuatan mancanegara yang berseteru. Lebih dari 40.000 warga sipil Timor dilaporkan meninggal selama masa pendudukan Jepang, dan perang ini menyisakan perpecahan yang mendalam.⁶²

74. Ketika Portugal kembali setelah Perang Dunia Kedua, ia mempertahankan kehadiran angkatan bersenjata profesional, yang terdiri dari serdadu Portugis dan anggota-anggota yang direkrut dari negeri jajahan Portugal di Afrika. Polisi secara teknis merupakan bagian dari angkatan bersenjata ini. Anggota asal Timor Timur juga direkrut ke dalam angkatan bersenjata ini, walau hanya sedikit di atas pangkat rendah. Tidak banyak terjadi perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Portugal selama tahun-tahun ini, yang didominasi oleh rezim otoriter Salazar. Polisi rahasia Portugal, *Pide* memantau segala pertanda pembangkangan di kalangan rakyat Timor Timur, dan memiliki reputasi yang menakutkan.⁶³ Hal ini mencekik kebebasan berpendapat dan kemampuan untuk membentuk asosiasi atau perdebatan politik. Dibandingkan dengan pengalaman kemudian di bawah Indonesia, dampak angkatan bersenjata Portugal terhadap masyarakat tidak terlalu besar.

75. Ketika Gerakan Angkatan Bersenjata (MFA) mengambil alih kekuasaan di Lisabon pada tanggal 25 April 1974, partai-partai politik di Timor Timur dengan cepat terbentuk (lihat bab 3 Sejarah Konflik). Komisi mendapat kesaksian dari para pemimpin dua partai besar, Fretilin dan UDT, bahwa mereka menggunakan kekuatan dan kekerasan dalam kampanye mereka dan dalam upaya untuk meningkatkan pengaruh di masyarakat.⁶⁴ Ketika UDT mencoba merebut kekuasaan pada tanggal 11 Agustus 1975, mereka melakukan ini dengan senjata dari pasukan kepolisian. Ketika Fretilin merespon, faktor penentu kemenangannya adalah dukungan dari para anggota Timor Timur dalam angkatan bersenjata Portugal dan persenjataan mereka. Baik UDT maupun Fretilin membagi-bagikan senjatanya kepada anggota sipil mereka secara serampangan, sehingga semakin meningkatkan kekerasan selama konflik internal.⁶⁵ Walaupun konflik internal tersebut berlangsung relatif singkat, ia semakin memperparah perpecahan yang ada dan menciptakan perpecahan baru yang menoreh luka pada masyarakat Timor Timur selama masa pendudukan Indonesia. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh militer Indonesia dalam upayanya untuk menumpas Perlawanan, termasuk melalui strateginya memiliterisasi masyarakat Timor Timur.

Militerisasi partai-partai politik Timor Timur oleh Indonesia sebelum pendudukan

76. Komisi mendengar kesaksian dari Tomás Gonçalves, anak pemimpin Apodeti yang juga *liurai* Atsabe, Guilherme Gonçalves, tentang bagaimana militer Indonesia menggunakan strategi mempersenjatai dan melatih pemuda-pemuda anggota partai mulai akhir tahun 1974.⁶⁶ ABRI menamakan kelompok ini Partisan. Pada bulan Oktober 1974 ia berkunjung ke Jakarta dan bertemu dengan perwira-perwira senior militer Indonesia. Ini terjadi tak lama setelah Menteri Luar Negeri Adam Malik bertemu dengan Penanggungjawab Urusan Luar Negeri Fretilin José Ramos-Horta dan meyakinkannya bahwa Indonesia akan menghormati hak Timor Timur atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. ABRI mulai membangun strateginya mempersiapkan pasukan pembantu bersenjata asal Timor Timur pada masa ketika Portugal berupaya menjalankan proses dekolonisasi yang teratur.

77. Ketika Tomas Gonçalves kembali pada bulan November 1974, 216 pemuda dari daerah Atsabe dimobilisasi dan dikirim ke Timor Barat, dimana mereka mendapatkan pelatihan militer dasar dan persenjataan dari para operatif ABRI termasuk anggota Kopassandha.⁶⁷ Setidaknya sebagian dari para pemuda ini dipaksa ikut serta oleh para pemimpin Apodeti.⁶⁸ Tomás Gonçalves menyatakan kepada Unit Kejahatan Berat dukungan PBB di Timor-Leste bagaimana pemuda-pemuda tersebut dimobilisasi:

Saya ditunjuk menjadi panglima Partisan pada tanggal 2 Desember 1974. Jadi ada panglima tertinggi, saya sendiri, kemudian ada dua komandan Kompi, delapan komandan peleton, dan 16 komandan regu. Semuanya ada 216 penempur. Saya berada di bawah komando Yunus [Yosfiah, dari Tim Susi, komando Kopassandha yang merupakan bagian dari Operasi Flamboyan].⁶⁹

78. Sekitar 50 anggota Partisan disertakan dalam setiap tim Pasukan Khusus - Susi, Umi dan Tuti - dan dikerahkan di daerah asal mereka masing-masing.⁷⁰ Setelah aksi tanggal 11 Agustus 1975 oleh UDT untuk merebut kekuasaan, ABRI bersama anggota-anggota pasukan Partisan ini memulai serangan-serangan lintas batas dari Timor Barat. Ketiga tim ini melakukan penyerbuan lintas batas lanjutan pertengahan September, sekali lagi tanpa banyak membuahkan hasil.⁷¹ Dalam penyerbuan-penyerbuan dilakukan perekrutan paksa pemuda Timor Timur untuk berperang bersama Partisan,⁷² dan terjadi sejumlah pembunuhan.⁷³

79. Setelah kekalahan dalam perang sipil, pasukan bersenjata UDT dan pendukungnya menarik diri ke perbatasan dan di akhir September masuk ke Timor Barat. Menurut pemimpin militer UDT João Carrascalão terdapat sekitar 3.000 pasukan UDT yang melintas batas, yang lebih dari 500 di antaranya menenteng senjata.⁷⁴ Mereka terserap ke dalam pasukan Partisan. Serangan-serangan lintas batas ABRI selanjutnya pada pertengahan Oktober melibatkan jumlah Partisan yang lebih besar dan mendapat dukungan lebih baik dari artileri angkatan laut, sehingga dapat merebut kota Batugade dan Balibo, dan kota-kota perbatasan lainnya.⁷⁵ Menurut Tomás Gonçalves, penyerangan tersebut melibatkan 216 Partisan Apodeti, 450 anggota pasukan Indonesia dan 350 orang di bawah kendali João Tavares.⁷⁶ Kelompok terakhir ini dikenal dengan nama Halilintar. Kelompok terakhir ini muncul kembali pada tahun 1994 dengan misi untuk menumpas gerakan klandestin yang semakin berkembang di distrik Bobonaro dan selanjutnya menjadi salah satu kelompok milisi terdepan pada tahun 1998-99. Selain menyediakan pengetahuan lokal yang berharga mengenai Timor Portugis kepada satuan-satuan komandonya, Partisan menjadi bagian penting dalam strategi "penyangkalan yang dapat dipercaya" Operasi Flamboyan yang terus digunakan. ABRI mengembangkan suatu mitos bahwa tentara Indonesia yang terlibat dalam operasi-operasi ini hanyalah "sukarelawan" yang membantu orang Timor Timur kembali dan menguasai keadaan tanah airnya.⁷⁷ Akan tetapi Tomás Gonçalves menceritakan kepada Komisi bahwa perencanaan dan kendali operasi dipegang oleh anggota

militer Indonesia, dengan Partisan Timor Timur digunakan sebagai pasukan pendukung, pemandu dan sebagai sumber informasi intelijen.⁷⁸

80. Tampaknya beberapa Partisan terpilih ikut ambil bagian dalam invasi Dili,⁷⁹ dan yang lainnya terlibat dalam pendaratan di Baucau selang tiga hari kemudian. Setelah invasi, para Partisan ikut serta dalam serangan-serangan di pedalaman. Walaupun ABRI umumnya merombak ulang penggunaan pasukan pembantu asal Timor Timur mereka, beberapa satuan Partisan terus dipertahankan selama masa pendudukan, seperti sebuah kelompok di Ermera yang pada tahun 1999 berjumlah sekitar 130 orang.⁸⁰

Pembentukan batalyon tempur ABRI beranggotakan orang Timor Timur

81. Pada tahun 1976 ABRI mulai memberi pelatihan militer formal kepada orang Timor Timur, ketika 60 orang Partisan dikirim ke Jawa. Pada bulan Juni 1977 400 orang Timor Timur tambahan, yang sebagian sebelumnya berdinis sebagai Partisan, menyusul. Pada tanggal 1 Oktober 1977 orang-orang ini lulus dengan pangkat prajurit, dan pada tanggal 24 Januari 1978, komandan militer Timor Timur, Kolonel Dading Kalbuadi, secara resmi mendirikan Batalyon Infanteri 744/Satya Yudha Bhakti. Batalyon baru beranggotakan 460 orang ini dibagi menjadi 4 kompi, dengan dikomando keseluruhan oleh Mayor Yunus Yosfiah.⁸¹ Di awal 1977 pasukan ini diberi pelatihan "Raiders" di Tasi Tolu, sebelah barat pelabuhan udara Dili dan kemudian dinyatakan siap tempur. Kelompok kedua beranggotakan lebih dari 500 orang Timor Timur direkrut dan dilatih pada tahun 1978. Mereka menjadi Batalyon 745/Sampada Yudha Bhakti, yang diinagurasi pada bulan September 1978 di bawah komando Mayor Theo Syafei. Rencana untuk batalyon ketiga, batalyon 746, dibatalkan setelah para rekrut baru dianggap tidak layak.⁸²

82. Batalyon-batalyon tersebut dimaksudkan untuk sepenuhnya beranggotakan orang Timor Timur. Namun rencana ini tidak pernah terwujud. Di antara anggota asal Timor Timur, terdapat pasukan infanteri Indonesia dan Pasukan Khusus, dan para perwiranya adalah orang Indonesia sampai ke tingkat peleton.⁸³ Kedua batalyon menjadi bagian permanen dari struktur Korem di Timor Timur selama masa pendudukan, dan sering digunakan dalam operasi tempur serta tugas-tugas keamanan internal. Mereka mengembangkan reputasi atas kebrutalan mereka. Tomás Gonçalves, yang mantan Partisan, menggambarkan Batalyon 744 di masa-masa awalnya:

*Partisan baru jadi jahat setelah [Batalyon] 744 dibentuk oleh Yunus [Yosfiah], dan mereka jadi anggota 744. 744 terdiri dari orang Jawa, Komando, dan macam-macam. Selama Yunus menjadi komandan 744, selalu terjadi pembunuhan di luar hukum, pembantaian...*⁸⁴

83. ABRI juga merekrut orang Timor ke dalam struktur teritorial reguler Korem/Kodim/Koramil. Beberapa sebelumnya pernah berdinis dengan tentara kolonial Portugis. Sementara yang lain adalah mantan Hansip yang direkrut ABRI melalui program Milsas (lihat "Anggota Militer Triwulan": Milsas, di bawah ini). Sampai bulan Juli 1998, terdapat 6.097 orang Timor Timur yang berdinis untuk ABRI, dimana dari jumlah tersebut 5.510 berdinis pada TNI dan 569 di kepolisian. Kemungkinan orang Timor menjadi perwira atau bintanga jauh lebih kecil daripada orang Indonesia. Data menunjukkan bahwa pada bulan Juli 1998 hanya 0,4% dari orang Timor Timur yang berdinis di ABRI adalah perwira dan kurang dari 24% adalah bintanga, sementara 76% adalah prajurit. Sementara proporsi untuk 17.834 anggota ABRI asal Indonesia di Timor Timur ketika itu sangat berbeda: 5,6% perwira, 34,1% bintanga dan hanya 60,4% yang prajurit.⁸⁵

Berbagai kelompok paramiliter awal, 1976-1981

84. Dari sejak awal, angkatan bersenjata Indonesia bertujuan membawa orang Timor ke dalam konflik di Timor Timur. Mereka mengangkat orang Timor Timur sebagai anggota angkatan bersenjata, dan menggunakan kelompok paramiliter Timor Timur untuk melaksanakan operasi rahasia. Selama akhir 1970-an militer Indonesia mengerahkan orang Timor Timur secara khusus untuk berperang melawan Fretilin/Falintil. Kelompok-kelompok paramiliter memiliki peran yang berbeda dengan Partisan, yang diperlakukan lebih sebagai pengangkut barang atau personil pendukung tempur daripada pasukan garis depan. Mereka juga berbeda dengan pasukan pertahanan sipil, yang umumnya tidak memainkan peran tempur di garis depan. Kelompok-kelompok paramiliter yang dibentuk akhir 1970-an dan pada 1980-an umumnya berkaitan erat dengan Kopassandha.

85. Salah satu pasukan paramiliter yang paling awal dibentuk pada bulan September 1976, ketika Mayor Jendral Benny Moerdani secara pribadi memberi izin kepada kapten Kopassandha, A. M. Hendropriyono, untuk membentuk Peleton Khusus (Tonsus) beranggotakan orang Timor Timur di Manatuto. Satuan tersebut direkrut dari anggota inti Apodeti di Laclubar (Manatuto), dan dipimpin oleh mantan anggota Falintil João Branco. Kelompok ini dengan cepat tumbuh melampaui ukuran sebuah peleton. Tonsus dipersenjatai dengan baik dan menggunakan orang Timor Timur dalam operasi tempur khusus di sektor tengah.⁸⁶ Tonsus menjadi sebuah prakarsa yang sukses yang memperlakukan orang Timor Timur setara ketimbang sebagai bawahan. Walaupun berhasil, satuan tersebut berakhir tahun 1978, dan ABRI kembali ke kebiasaan lamanya memperlakukan orang Timor Timur sebagai pembantu logistik ketimbang penempur garis depan.

86. ABRI juga merekrut orang Timor Timur masuk ke sejumlah kelompok lainnya selama akhir 1970-an. Salah satu kelompok yang disebut Tim Nuklir beroperasi di Moro (Lautém), di bawah komando camat, Edmundo da Conceição da Silva.⁸⁷ Para anggota mantan Partisan terlibat dalam gempuran atas Gunung Kablaki pada bulan Juni 1977. Disebut 'Skadam' (Sukarelawan Kodam), nama mereka tampaknya menunjukkan bahwa mereka resmi dimasukkan ke dalam struktur ABRI.⁸⁸

Paramiliter tahun 1980-an

87. Pada tahun 1979 ABRI membentuk Tim Morok (artinya Ganas), di bawah komando Filomeno Lopes, di Manatuto.⁸⁹ Tim Morok, yang terdiri dari para mantan anggota Apodeti dan UDT, beroperasi di Manatuto selama tahun 1980-an. Tim kedua, yang disebut Tim Asahan, dibentuk pada tahun 1980 oleh seksi intelijen Kodim Manatuto, yang menempatkannya di bawah kepemimpinan Domingos ("Apai") da Silva dan Antonio Doutel Sarmento, tetapi berjalan hanya satu tahun.⁹⁰ Pada tahun 1981, pada masa Operasi Keamanan, tim ketiga yang disebut Alap-Alap dibentuk dan digunakan terutama untuk memberi dukungan pada pasukan tempur.⁹¹

88. Pada tahun 1980-an ABRI mendirikan beberapa kelompok paramiliter yang lebih terlatih baik. Salah satu yang pertama adalah Tim Railakan (artinya Petir) yang dibentuk sekitar 1980 atau 1981 di bawah komando seorang prajuri ABRI, Julião Fraga, orang Timor Timur dari Baguia (Baucau) dan beroperasi di Baucau.⁹² Tim Railakan terlibat dalam beberapa tugas, seperti penangkapan, interogasi dan penyiksaan orang-orang yang dicurigai anggota klandestin dan juga ambil bagian dalam operasi-operasi untuk menumpas Falintil. Sekitar tahun 1985 kelompok ini dirubah namanya menjadi Tim Saka (Satuan Khusus Pusaka). Julião Fraga terus menjadi komandan kelompok yang dirubah namanya ini sampai pembunuhannya di Baucau pada tahun 1995. Railakan/Saka kadang terlihat bekerja langsung dengan Kopassus⁹³, dan sering berlaku

⁸⁶ Tomás Gonçalves (diwawancarai oleh SCU tanggal 8 Agustus 2000) menggambarkan bagaimana orang-orangnya João Branco's telah dilatih di Dili. (Profil Komunitas CAVR di Pairara, Moro (Lautém), 28 Maret 2003).

sebagai perantara bagi Koramil dalam melakukan penangkapan.⁹⁴ Seputar waktu Railakan diubah nama menjadi Tim Saka tahun 1985, sebuah kelompok paramiliter saudara bernama Tim Sera dibentuk di Baucau. Tim Sera beroperasi di bawah komando mantan pemimpin Falintil bernama Sera Malik, terutama di daerah Baucau-Vemassee-Venilale. Pasukan paramiliter lainnya dari masa ini adalah Tim Alfa, dibentuk oleh kapten Kopassus, Luhut Panjaitan, di Lautém kemungkinan sekitar tahun 1986.⁹⁵

89. Kelompok-kelompok paramiliter memiliki beberapa kegunaan, seperti ikut serta dalam penyerangan dan operasi-operasi. Seorang informan CAVR menceritakan bahwa:

Mayor Sinaga membentuk Tim Lorico di desa Oestico Loilubo [Vemassee, Baucau] dari para mantan Falintil. Ia menggunakan mereka untuk operasi di hutan, dan setelah mereka menemukan lokasi Falintil, pasukan ABRI akan masuk dan menembak...Setelah Sinaga pergi dari Timor-Leste, anggota Tim Lorico menghilang satu persatu.⁹⁶

90. Kelompok-kelompok paramiliter juga memiliki fungsi yang menunjukkan kedekatannya dengan Kopassus, seperti operasi-operasi rahasia dan sering kali berlaku sebagai agen-agen intelijen. Tim-tim ini membentuk sebuah tradisi kedekatan hubungan antara ABRI, khususnya Kopassus, dengan unit-unit paramiliter Timor Timur. Pada tingkat pribadi, hubungan tersebut seringkali terus berlanjut selama tahun-tahun konflik.⁹⁷

Pasukan pertahanan sipil

91. Salah satu prinsip dasar ideologi militer Indonesia adalah pengertian Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), di mana seluruh penduduk sipil harus memainkan peran dalam pertahanan nasional.* Menurut pengertian ini, orang Indonesia yang sipil dapat dipilih untuk menjalankan pelatihan militer dasar, hingga kemudian dikenal sebagai Rakyat Terlatih (Ratih). Seleksi lebih lanjut dari antara barisan Ratih ini dapat menghasilkan (a) Pertahanan Sipil (Hansip), yang tanggungjawabnya adalah melindungi penduduk sipil pada saat bencana alam atau perang, (b) Keamanan Rakyat (Kamra), yang tanggungjawabnya adalah membantu polisi, dan (c) Perlawanan Rakyat (Wanra), yang harus membantu angkatan bersenjata.† Meskipun secara teoretis seluruh golongan ini berada di bawah administrasi Departemen Dalam Negeri (Depdagri), namun di Timor Timur kelompok-kelompok ini beroperasi langsung di bawah komando dan pengaruh militer Indonesia.⁹⁸

92. Penggunaan penduduk sipil Timor Timur yang direkrut ke dalam pasukan pertahanan sipil di Timor Timur selama masa konflik adalah satu contoh bagaimana ABRI menyesuaikan strategi standarnya dengan kondisi wilayah ini. Di Timor Timur, ABRI menggunakan pasukan pertahanan sipil dalam peran keamanan teritorial yang biasa, tapi juga dalam dalam peran tempur serta pengintai dan intelijen. Di Indonesia, Departemen Dalam Negeri adalah lembaga yang mengatur pasukan pertahanan sipil, tapi di tahun-tahun awal konflik di Timor Timur mereka beroperasi langsung di bawah komando dan kendali militer Indonesia dan baru di tahun 1980-an tanggung jawab tersebut beralih ke Departemen Dalam Negeri.⁹⁹

93. Penggunaan luas pasukan pertahanan sipil warga Timor Timur memiliki dampak yang dramatis atas kehidupan orang Timor Timur dengan membawa konflik dan militer ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berbasis di komunitas-komunitas, anggota pasukan pertahanan sipil digunakan sebagai penghubung antara penduduk sipil dan militer. Pengumpulan intelijen

* Prinsip ini diperoleh dari strategi gerilya yang digunakan di dalam revolusi Indonesia.

† Tinjauan umum sistem ini dapat dibaca dalam dokumen rahasia Korem 164 Wira Dharma, Seksi-Intel, "Rencana Penyusunan Kembali Rakyat Terlatih," ditandatangani oleh Mayor Willem da Costa, tertanggal 10 September, 1982, hal. 2; dan Lowry, hal. 111.

adalah kegiatan yang terdapat di mana-mana, dan anggota pasukan pertahanan sipil sering kali terlibat dalam pelanggaran langsung terhadap penduduk sipil, baik dengan anggota ABRI maupun sendiri-sendiri. Karena dilindungi oleh ABRI, mereka relatif menikmati impunitas atas tindakannya. Komisi menerima banyak pernyataan dan kesaksian mengenai kekerasan yang dilakukan anggota komunitas yang telah menjadi anggota pasukan keamanan sipil di bawah ABRI (lihat bab 7.7 mengenai kekerasan seksual, bab 7.2 mengenai pembunuhan dan penghilangan, bab 7.4 mengenai penahanan dan penyiksaan).

94. Satuan-satuan Hansip Timor Timur pertama dibentuk pada paruh kedua 1976, tidak lama setelah pernyataan integrasi Indonesia bulan Juli 1976.¹⁰⁰ Sampai pertengahan 1976 terdapat 5.897 anggota Hansip di Timor Timur: jumlahnya bervariasi di seluruh wilayah, dengan jumlah terbesar di Baucau (700) dan Ainaro (665), dan terkecil di Lautem (187).¹⁰¹ Anggota Hansip sering digunakan sebagai personil dukungan tempur, peran yang biasanya diisi oleh Wanra di tempat-tempat lain di Indonesia. Di Indonesia, Hansip adalah lembaga mantap yang anggotanya menerima gaji sehingga cenderung bertugas lama, sedangkan anggota Wanra tidak selalu digaji. Namun perbedaan Hansip dan Wanra di Timor Timur tidak selalu jelas. Hal ini mungkin saja karena pihak militer sering menggunakan Hansip dalam kapasitas sebagai Wanra, atau mungkin karena suatu waktu antara 1978 dan 1980 Hansip diklasifikasi ulang sebagai Wanra. Keduanya memainkan peran yang pada hakikatnya sama. Sampai 1980 jumlah yang ketika itu resmi disebut Wanra mencapai 6.500, tetapi dua tahun kemudian, jumlah tersebut menurun jadi 4.800.¹⁰²

95. Pasukan Rakyat Terlatih (Ratih) pertama kali dibentuk di Timor Timur tahun 1981, untuk membantu dalam Operasi Keamanan. Pada tahun berikutnya terdapat 6.000 orang Ratih.¹⁰³ Ekspansi yang demikian pesat ini bersamaan waktunya dengan adanya suatu rencana untuk mengalih tugaskan Hansip/Wanra menjadi Ratih, terutama untuk menghemat biaya. Pasukan Keamanan Rakyat (Kamra) dibentuk oleh polisi Indonesia pada awal 1981, dan jumlahnya mencapai 1.690 pada tahun 1982.¹⁰⁴ Secara keseluruhan, sampai 1982 terdapat hampir 12.500 orang Timor Timur yang terlibat dalam berbagai organisasi pertahanan sipil. Walaupun sulit untuk membuat suatu pernyataan yang pasti tanpa mengetahui jumlah penduduk di Timor-Leste pada tahun 1982, angka ini adalah kurang lebih 2,25% dari keseluruhan jumlah penduduk. Secara nasional ini adalah sekitar 2 persen.[†]

96. Selama tahun 1981-1982 komando militer di Timor Timur menurunkan status banyak Hansip menjadi Ratih. Pada waktu itu tujuan ABRI yang dinyatakan adalah:

[M]embentuk kesadaran di antara rakyat Timor mengenai perlunya membela negara, menuju pembentukan kesadaran oleh setiap warga bahwa ia memiliki hak dan kewajiban untuk ambil bagian tanpa ragu-ragu dalam bela negara.¹⁰⁵

97. ABRI mengalami kesulitan dalam mengendalikan pasukan pertahanannya sipilnya. Pada tahun 1983, sebagian karena diperlakukan tidak baik, dan kemungkinan sebagai respon atas kehilangan pekerjaan mereka akibat rencana pengurangan anggota pada tahun 1982,¹⁰⁶ banyak anggota Hansip yang membelot ke Falintil.¹⁰⁷

98. Satuan-satuan pertahanan sipil berfungsi dalam suatu struktur militer teritorial yang sudah demikian luas, yang di tingkat desa mencakup Babinsa (Bintara Pembina Desa), Binpolda, dan terkadang sebuah peleton dari Batalyon 744 atau 745. ABRI melakukan upaya besar untuk merekrut satuan-satuan pertahanan sipil. Beberapa anggota bergabung dengan sukarela; yang

[†] Penghitungan ini didasarkan atas perkiraan Biro Pusat Statistik Indonesia bahwa pada tahun 1982 penduduk Timor-Leste berjumlah 555.350.

[†] Berdasarkan angka 4 juta anggota pasukan pertahanan sipil dalam populasi 200 juta tahun 1992. Lihat Lowry, *The Armed Forces of Indonesia*, hal. 112.

lain di bawah paksaan.¹⁰⁸ Anggota-anggota satuan pertahanan sipil secara umum menjalani masa pelatihan yang singkat dari komando teritorial setempat (Kodim atau Koramil), dan setelah dilatih mereka akan menjalani peran bantuan tempur bagi ABRI dan pasukan paramiliternya:

Tugas dan fungsi milisi adalah untuk berpatroli, dan menutup jalan-jalan setapak yang digunakan oleh musuh ketika berpindah (hal ini dapat dilaksanakan sendiri atau bersama dengan Pasukan Marinir 5). Sementara fungsi dan tugas Hansip adalah untuk menjaga pos-pos TNI tertentu (di malam hari), dan untuk berlaku sebagai penunjuk jalan pada saat patroli, atau untuk melakukan kegiatan bantuan tempur bagi milisi.¹⁰⁹

99. Dalam sebagian besar kasus, mereka bertindak atas perintah komando militer Indonesia setempat.¹¹⁰ Komisi menemukan bahwa pasukan pertahanan sipil disinyalir terlibat dalam banyak pelanggaran selama operasi-operasi militer.

“Anggota militer triwulan”, *Milsas* 1989 - 1992

100. Tampaknya bahwa setelah mengambil alih kendali Hansip dari ABRI pada awal 1980-an, pada tahun 1989 Departemen Dalam Negeri tidak ingin memberi dukungan sumber anggaran secukupnya untuk mempertahankan Hansip dan sekelompok cadangan dikenal sebagai Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang dilatih untuk penanggulangan bencana dan situasi darurat, yang ketika itu berdinam. Ketika itu, secara nasional, ABRI tengah kesulitan untuk memenuhi rencana kuotanya 3,5% dari seluruh penduduk nasional sebagai anggota pertahanan sipil.¹¹¹ Karena keanggotaan satuan-satuan pertahanan sipil di Timor Timur melampaui rata-rata nasional, penghematan dana barangkali adalah alasan yang kuat untuk pengurangan ini.¹¹² Akibatnya, Departemen Dalam Negeri memutuskan untuk mengalihkan banyak Hansip ke dalam militer. Program ini disebut *Milsas*, singkatan dari militerisasi, atau sebagai “anggota militer triwulan”. Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia mencatat bahwa:

Milsas — yang oleh pejabat militer senior di Jakarta sering disebut sebagai anak-anak daerah TNI— hanya berfungsi di Timor Timur untuk membantu operasi TNI di Timor Timur.¹¹³

101. Pada tahun 1989 ABRI memilih sekitar 1.000 mantan Hansip untuk dikirim ke Malang (Jawa Timur) dan Bali untuk mengikuti program pelatihan tiga bulan. Setelah menyelesaikan pelatihan tersebut, seorang mantan Hansip akan menjadi anggota ABRI dan kembali ke Timor Timur dimana sebagian besar ditempatkan di Kodim. Pada tahun 1992 kelompok kedua seribu orang mantan anggota Hansip dipilih dan dikirim ke Jawa dan Bali untuk menjalani pelatihan. José Sales dos Santos menjelaskan:

*Saya dimiliterisasi pada gelombang kedua, bersama 1.000 Hansip dari seluruh distrik. 700 dikirim latihan ke Malang dan 300 dikirim ke Bali. Setelah tiga bulan, semuanya kembali bertugas di Kodim masing-masing.*¹¹⁴

102. Antara 1989 dan Agustus 1991 program “milsas” ini menghasilkan pengurangan sebesar 50% atas keseluruhan jumlah Hansip (mencakup Kamra dan Wanra), dari 4.996 menjadi 2.023.¹¹⁵

¹⁰⁸ HRVD (human rights violations database) milik CAVR mencantumkan 784 tindakan yang dilakukan oleh Hansip antara 1975-1979. Lihat khususnya bab 7.7 Kekerasan Seksual dan 7.4 Penahanan dan Penyiksaan.

Tenaga Bantuan Operasi (TBO)

103. ABRI memaksa banyak warga sipil Timor Timur untuk bekerja sebagai kuli angkut, pemandu jalan, tukang masak dan bahkan pembantu pribadi bagi tentara, khususnya selama masa operasi intensif tahun 1970-an dan awal 1980-an. Sebuah dokumen militer dari tahun 1982 menyatakan bahwa 60.000 warga Timor Timur terlibat sebagai personil pendukung.¹¹⁶ Mereka ditempatkan sebagai tenaga bantuan operasi (TBO). Banyak orang direkrut sebagai TBO selama operasi tahun 1981 yang dikenal dengan nama "pagar betis" (Operasi Kikis) (lihat bagian 3: Sejarah Konflik dan bab 7.3 mengenai pemindahan paksa dan kelaparan). Satu sumber menjelaskan pemaksaan yang digunakan dalam perekrutan:

Pada tahun 1979 Francisco Amaral didatangi oleh tiga orang Hansip dan dibawa ke Uatu-Lari...ia diinterogasi oleh [pegawai] kecamatan dan Batalyon 202 mengenai dimana perlengkapan (Fretilin) disembunyikan, yang ia tidak tahu...ia dipukuli sampai ia kencing dan berak dan darah keluar dari mulut dan hidungnya. Setelah itu sebuah Kompi Marinir mengambilnya sebagai TBO.¹¹⁷

104. Banyak orang muda diambil sebagai TBO. Mereka diperbantukan kepada sebuah satuan untuk jangka waktu yang berbeda-beda, terkadang sepanjang operasi berlangsung, walau kadang juga jauh lebih lama. Administrator Apostolik Katolik Dom Martinho da Costa Lopes mencatat bahwa pada waktu itu perekrutan paksa ini menyisakan dampak yang amat buruk bagi warga desa biasa yang diambil dari ladang dan kebunnya pada masa tanam. Sebuah laporan polisi dari tahun 1978 memberi penilaian yang cukup terbuka mengenai konsekuensi sosial dari perekrutan paksa:

Selama Operasi Gempur di sektor tengah baru-baru ini, orang-orang dipaksa menjadi TBO. Pelaksanaan hal ini menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya di Dili, yang menjadi sepi di malam hari (karena) para orang tua takut kalau anak-anaknya akan diambil oleh ABRI. Kegiatan pendidikan dan Pramuka di sekolah-sekolah sementara ini agak terganggu.¹¹⁸

105. Bab 7.8 mengenai Hak Anak merinci pengalaman anak-anak dan pemuda Timor Timur yang diambil sebagai TBO oleh militer Indonesia. Banyak dari mereka yang terekspos kepada kondisi pertempuran dan dipaksa berjalan kaki sambil membawa peralatan militer yang berat, dan diharuskan tinggal dalam kamp-kamp militer dengan tentara dewasa. Alfredo Alves mengenang pengalamannya ketika ia diambil dari ibunya menjadi TBO pada usia 11 tahun, serta intimidasi dan kekerasan yang dilakukan tentara Indonesia terhadap rekan-rekannya anak-anak Timor Timur:

Satu hari seorang TBO yang sedang membawa beban berat, menolak membawa lebih banyak lagi beban. Tentara itu jadi marah, ketika kembali ke kamp, semua tentara di peleton dan TBO dikumpulkan. Komandan berkata bahwa seorang TBO tidak boleh menolak membawa barang. Dia bilang tentara datang untuk membantu dan membawa kemerdekaan. Setelah itu TBO yang tadinya menolak membawa barang tersebut dipanggil dan ditembak di depan semua orang. Mereka bilang bahwa kalau kami menolak untuk patuh, nasib kami akan sama seperti dia.¹¹⁹

'Intel'—Mata-mata orang Timor Timur

106. Selama masa konflik, satuan-satuan intelijen menggunakan mata-mata dan informan orang Timor Timur untuk mengumpulkan informasi. Penggunaan orang Timor Timur oleh ABRI dalam kapasitas intelijen sudah terjadi sejak sebelum invasi Timor Timur, ketika mereka mengandalkan pasukan Partisan untuk menyediakan intelijen setempat, dan untuk berfungsi sebagai pemandu penyusupan-penyusupan awal ke wilayah Timor Timur. Menurut Tomás Gonçalves, para Partisan diminta memberikan informasi geografis dan politik tentang Timor Portugis:

*Di situ, mereka [orang Indonesia] tidak berbicara dengan kami. Mereka sebut kami 'Partisan', dan Partisan tidak bicara dengan mereka...Ketika mereka panggil saya dan bertanya, 'Kurang lebih ada berapa banyak senjata yang mereka miliki di Timor? Ada berapa kompi? Di situ apakah banyak orang tahu cara pakai senjata? Mereka tau bagaimana menjadi pejuang gerilya?'*¹²⁰

107. Belakangan, ketika penduduk sipil menyerah secara besar-besaran dan ditahan oleh ABRI di kamp-kamp penahanan dan desa-desa pemukiman ulang, prioritas ABRI adalah untuk menjaga agar mereka tidak berhubungan dengan Falintil yang masih ada sehingga mereka memerlukan sumber-sumber intelijen untuk mengetahui siapa-siapa saja yang dekat dengan pasukan gerilya. Pada akhir 1981 dan Januari 1982, Komandan Korem 164 Kolonel Adolf Sahala Radjaguguk mengeluarkan serangkaian perintah mengenai operasi teritorial dan intelijen, peran Babinsa dan keamanan kota, termasuk wilayah pemukiman ulang.¹²¹ Perintah-perintah ini menunjukkan bahwa militer menyadari masih adanya perlawanan yang kuat di antara penduduk sipil, dan perlunya untuk mengupayakan pemutusan hubungan dan dukungan mereka kepada Perlawanan bersenjata. Untuk mencapai hal ini, berbagai dokumen menetapkan serangkaian tujuan, seperti membangun masyarakat dimana pasukan keamanan akan "bersarang" secara mendalam di tiap-tiap komunitas, memantau dan mengandalkan para informan orang Timor Timur untuk menciptakan operasi intelijen yang kuat yang mampu mengendalikan penduduk sipil dan membatasi kontak dengan Falintil. Contohnya sebuah organisasi yang dibentuk di Quelicai:

*Pada waktu itu [1981] terdapat organisasi yang disebut 'Siliman' [Siguranca Sipil Masyarakat], yang dibentuk oleh TNI-Koramil, dengan tujuan untuk memata-matai. Anggotanya adalah warga Quelicai. Di antara mereka ada (nama disebut)...Organisasi itu sering memantau gerakan deponen dan jika mereka ketahuan akan dilaporkan kepada Koramil.*¹²²

108. Pada awal 1980-an, setelah penyerahan diri besar-besaran tahun 1978-79, sejumlah besar penduduk Timor Timur ditempatkan di dalam kamp-kamp pemukiman ulang. Secara struktur, ABRI merancang agar pos-pos Hansip/Wanra ditempatkan di kota-kota sekitar. Hansip/Wanra diharapkan untuk dapat mengisi peran perantara antara rakyat dengan militer, yang biasanya diwakili oleh seorang Babinsa atau Tim Pembina Desa.^{*} Tugas mereka antara lain menjalankan tugas yang diberi oleh militer, serta memantau sesama warga. Untuk mendukung, Ratih akan melakukan pengamanan internal:

*Penduduk sipil laki-laki yang dipersenjatai dengan tombak dan parang, dalam keadaan bahaya, akan dikumpulkan di satu tempat di desa mereka (di dalam kota).*¹²³

^{*} Kehadiran pos Babinsa di setiap desa di Timor Leste jumlahnya jauh melebihi yang normal di Indonesia, dan mencerminkan tujuan ABRI untuk mengontrol dengan ketat penduduk Timor Leste.

109. Hal ini terjadi pada masa ketika ABRI bermaksud untuk menggunakan semakin banyak orang Timor Timur sebagai pasukan pembantu keamanan/pertahanan, dengan maksud untuk mendekatkan Timor Timur dengan doktrin ABRI "Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta." Sebuah dokumen militer dari bulan Februari 1982 membahas gagasan ini:

Dengan menguatnya keamanan [ABRI menguasai keadaan], SATPUR (satuan tempur) akan dikurangi besarnya sementara peran pertahanan sipil (*HANSIP-WANKAMRA*) akan ditingkatkan dan akan memainkan peran terpenting dalam membela dan mengamankan wilayah mereka dari sisa-sisa GPK dan ekstrimis.¹²⁴

110. Warga Timor Timur direkrut untuk bekerja sebagai informan dengan berbagai cara. Beberapa dengan sukarela membantu satuan-satuan intelijen, yang lainnya disuap, dan yang lainnya lagi dipaksa atau diancam. Militer sering bermaksud untuk "membalik" anggota klandestin dan mantan gerilyawan Falintil untuk bekerja bagi Satgas Intel.

111. Menjelang akhir 1980-an, ketika Perlawanan membangun gerakan klandestin di kota-kota, ABRI membutuhkan kemampuan intelijen lokal yang kuat agar dapat mengendalikan jaringan yang sedang bertumbuh ini. Mulai saat itu, strategi ABRI bergeser dari fokus terhadap perlawanan gerilya kepada mencoba membongkar perlawanan klandestin yang sedang tumbuh ini. Masing-masing unit teritorial (seperti Korem, Kodim, Koramil) memiliki personil intelijen dan masing-masing merekrut jaringan informannya sendiri. Unit intelijen yang memiliki reputasi paling menakutkan adalah Satuan Tugas Intelijen (SGI).^{*} Satuan ini pertama kali dibentuk di bawah Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan (Kodahankam) pada tahun 1976 dan belakangan dialihkan kepada struktur-struktur komando penerus.[†] ¹²⁵ Secara resmi berada di bawah kendali Korem, sampai pada pertengahan 1990-an Kopassus memiliki kendali yang luas atas SGI.¹²⁶

112. Orang Timor Timur menyebut para informan intelijen dan mata-mata sebagai *Mauhu*, "Mau" yang berarti nama laki-laki dan "hu" berarti "meniup". Sistem informan intelijen dan mata-mata ini memainkan peran yang penting dalam menciptakan kecurigaan di antara orang Timor Timur. Ini memungkinkan militer untuk menyusup ke Perlawanan, serta menyebarkan desas-desus dan misinformasi. Banyak orang Timor Timur terpaksa memainkan peran berbahaya sebagai agen ganda, dan selalu berada dalam bahaya dicurigai oleh kedua-dua pihak. Ada banyak mata-mata orang Timor Timur, dan kehadiran mereka yang luas berarti bahwa warga sipil jarang tahu siapa yang sebenarnya *Mauhu* dan siapa yang bukan, siapa yang harus dihindari dan siapa yang harus dipercaya. Demikian luas dan merasuknya sistem ini menabur kecurigaan mendalam di kalangan penduduk Timor Timur, dan kerekatan sosial menjadi korban dalam unsur tersamar dalam konflik ini.

1990-an dan perhatian pada pemuda

113. Di akhir 1980-an para pemuda Timor Timur muncul sebagai unsur penting baru dalam gerakan perlawanan klandestin kota. Hal ini menjadi kerisauan bagi rezim Indonesia yang telah memberi harapan demikian besar bagi generasi penerus Timor Timur yang dididik dalam sistem Indonesia.

114. Di akhir 1970-an dan awal 1980-an polisi Indonesia, yang ketika itu adalah bagian resmi militer, mendorong tumbuhnya gerakan kepanduan Indonesia (Pramuka) sebagai cara untuk menanam disiplin nasional di antara anak-anak muda Timor Timur. Program ini mencakup

^{*} Militer biasanya menyingkat kepanjangan Satuan Tugas Intelijen menjadi Satgas Intel, tapi terdapat juga dokumen-dokumen militer dari tahun 1992-1993 dimana ini disingkat sebagai SGI. Sebagian besar orang Timor-Leste mengeal unit ini dengan nama SGI.

[†] Pada tahun 1978 Satgas ditransfer ke Kogasgab "Seroja"; pada tahun 1979 Satgas ini ditransfer ke Korem 164; pada tahun 1984 kepada Komando Operasi Keamanan; dan pada tahun 1990 ditransfer ke Kolakops.

pelatihan gaya militer seperti baris-berbaris, membantu Palang Merah Indonesia, dan menghadiri upacara-upacara resmi. Sampai Mei 1978 terdapat hampir 10.000 anggota, yang meningkat menjadi 22.455 pada tahun 1981.¹²⁷ Kelompok-kelompok beladiri pemuda juga dibentuk dan didorong perkembangannya. Melalui pelatihan fisik umum dan dengan mengenakan seragam kelompok-kelompok ini meniru perilaku tentara.

115. Mahasiswa Timor Timur juga dijadikan sasaran oleh angkatan bersenjata Indonesia. Pada tahun 1990-an Timor Timur memiliki satu universitas dan satu sekolah politeknik. Resimen Mahasiswa (Menwa) dibentuk di kampus-kampus tersebut. Seperti halnya Menwa di Indonesia, ini menjadi jalur bagi ABRI untuk melakukan indoktrinasi tambahan kepada mahasiswa.¹²⁸ Dalam suasana Timor Timur, ini menjadi cara bagi ABRI untuk menyusup organisasi-organisasi mahasiswa dan kelompok-kelompok klandestin di kampus. Mahasiswa Timor Timur yang kuliah di Jawa dan Bali diharuskan untuk bergabung dalam organisasi resmi mahasiswa dan pelajar Timor Timur, Impettu (Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur).¹²⁹ Banyak orang Timor Timur yang berada dalam pemantauan intelijen.

Pasukan Pembunuh

116. Pada awal 1990-an sebuah pasukan paramiliter gaya baru muncul sebagai upaya ABRI untuk mengendalikan perlawanan klandestin kota yang semakin berkembang. Kelompok yang dikenal sebagai Ninja ini beroperasi di malam hari dengan berbaju hitam dan bertopeng.¹³⁰ Mereka ditakuti karena peran mereka dalam penghilangan anggota Perlawanan yang semakin meningkat. Mereka pada kenyataannya adalah pasukan pembunuh.

117. Pada tahun 1995 muncul sebuah kelompok baru yang disebut Gadapaksi[†] (Garda Muda Penegak Integrasi). Pada dasarnya ia merupakan penerus geng Ninja di atas, dengan fokus yang serupa untuk membidik perlawanan klandestin. Kelompok ini memiliki hubungan erat dengan Kopassus, dan dibentuk oleh menantu Presiden Soeharto, perwira Kopassus Kolonel Prabowo pada bulan Juli 1995.¹³¹ Walaupun organisasi ini secara resmi dimaksudkan untuk membantu pemuda Timor dalam menjalankan usaha kecil, para anggota dengan segera mengembangkan usaha penyelundupan, judi, dan jasa perlindungan yang ilegal atau semi-legal. Selain itu, mereka terus membidik dan mengganggu gerakan klandestin seperti halnya pasukan Ninja. Gadapaksi berkembang pesat: pada awal 1996 ia memiliki 1.100 anggota; bulan April diumumkan bahwa ada rencana untuk menambahkan 1.200 anggota setiap tahunnya; dan pada bulan Mei tahun itu 600 anggota dikirim ke Jawa untuk menerima pelatihan dari Kopassus.¹³² Walaupun ada hubungan terang-terangan dengan Kopassus, dua tahun setelah pembentukannya ketua Gadapaksi, Marçal de Almeida, mengungkapkan ketidaksenangannya bahwa organisasinya dikenal sebagai sarang *mauhu*, istilah dalam bahasa Tetun untuk intelijen militer.¹³³ Kemunculan Gadapaksi terjadi bersamaan dengan naiknya pamor Kopassus dibanding Kostrad di Timor Timur. Dengan dominasi Kopassus terjadi pergeseran pada operasi psikologis yang dirancang untuk menyusup, mengintimidasi dan menghancurkan jaringan perlawanan klandestin. Gadapaksi adalah unsur garis depan dalam strategi ini. Pada tahun 1995 berbagai kelompok paramiliter di Timor Timur menerima pelatihan militer di Aileu, yang dilakukan oleh Kopassus. Gadapaksi berlanjut sampai ia digantikan oleh berbagai kelompok milisi tahun 1998-99.

Milisi, 1998-1999

118. Banyak di antara milisi yang bermunculan tahun 1998-99 berakar dalam kelompok-kelompok yang telah dibentuk jauh lebih awal dalam periode pendudukan. Tabel di bawah

^{*} Perilaku 'kelompok Ninja' ini mirip dengan 'pembunuhan misterius' *Petrus* di Jawa di awal 1980-an, walaupun mereka memiliki maksud yang berbeda. Diprakarsai oleh Jendral L.B. Moerdani, *Penembak Misterius* menargetkan penjahat dan membiarkan jasadnya di depan umum.

[†] Kadang-kadang dieja Gardapaksi.

menunjukkan sejarah milisi-milisi Timor, termasuk nama pemimpin Timor mereka, sesuai dengan sektor dan distrik, dengan tanggal lahir 1975-99.

Table 2 - Milisi-milisi di Timor Timur, 1975-99

Sektor A: Timur Komandan: Joanico Césarío Belo (Sersan Kopassus Timor Timur)				
Distrik	Nama	Pemimpin Timor 1999	Tanggal	Latar Belakang/hubungan
Lautém	Jati Merah Putih	José da Conceição	1985	Tim Alfa awalnya didirikan oleh Kopassus tahun 1985; diganti namanya menjadi JMP tahun 1999.
Viqueque	Makikit; 59/75 Junior/Naga Merah	Alfonso Pinto (Lafaek) Alvaro de Jesus	1983 1999	Disponsori oleh Kopassus. Asal usul dari pemberontakan Viqueque tahun 1959.
Baucau	Saka Sera Forum Komunikasi Partisan	Joanico C. Belo (Kopassus) Sera Malik Antonio Monis	1983 1986 1975	Dibentuk oleh Kopassus dari mantan Falintil dan paramiliter lama Baucau, Railakan, 1959-75. Didirikan oleh Kopassus. Dibentuk kembali tahun 1999 dari anggota lama Partisan.
Manatutu	Mahadomi Morok	Aleixo de Carvalho Filomeno Lopes da Cruz (April 1999: Thomás de Aquino Kalla	1999 ca. 1995	Pendiri dan penasehat Vidal Doutel Sarmento adalah Bupati dan anggota kehormatanKopassus
Sektor B: Tengah Komandan: Eurico Guterres (mantan pemimpin kelompok 'ninja' Gadapaksi, Dili, awal 1990-an.)				
Distrik	Nama	Pemimpin Timor	Tanggal	Latar Belakang/hubungan
Dili	Aitarak	Eurico Guterres	1999	Milisi Gadapaksi di Dili awal 1990-an; dilatih oleh Kopassus
Liquiça	BMP (Besi Merah Putih)	Manuel de Sousa	27 Des 1998	Hubungan langsung dengan militer—berbasis di Koramil Maubara
Ermera	DMI (Darah Merah Integrasi); Ramelau (nama gunung di sektor tengah) Naga Merah Tim Pancasila	Miguel Babo Manuel de Sousa	April 1999	Turunan dari Partisan dan Wanra.
Sektor C: Barat Daya Komandan: Cancio Lopes de Carvalho				
Distrik	Nama	Pemimpin Timor	Tanggal	Patron
Ainaro	Mahidi (Mati Hidup untuk Indonesia)	Cancio Lopes de Carvalho	17 Des 1998	Komandan Militer Ainaro
Manufahi	Ablai	Nazarío Corte Real	27 Mar 1999	Hubungan dengan Kopassus
Covalima	Laksaur (sejenis burung)	Olivio Mendonca Moruk		Bupati (militer), dan Komandan militer Covalima
Aileu	Ahi (Aku Hidup untuk Integrasi)	Horacio Araújo	27 Mar 1999	Dibentuk dan didukung oleh pemerintah Kabupaten.
Sektor D: Barat Komandan: João Tavarres (mantan pemimpin paramiliter Halilintar, bagian dari operasi-operasi rahasia pra invasi tahun 1975)				
Distrik	Nama	Pemimpin Timor	Tanggal	Patron
Bobonaro	Halilintar; Dadarus Merah Putih; Buntur; Armui (Aku Rela Mati Untuk Integrasi); Kaer Metin Merah Putih (Pegang	João Tavarres	1975; dibentuk kembali tahun 1994	Hubungan lama dengan militer melalui Halilintar.

	Kuat Merah Putih); Harimau Merah Putih; Saka Loromanu (Saka Barat); Firmi Merah Putih (Penganut Merah Putih)			
Oecusse	Sakunar (Kalajengking)	Simão Lopes	April 1999	Terkait dengan Kopassus

Sumber: Penelitian dan kompilasi CAVR

Pembentukan milisi

119. ABRI mulai memobilisasi kelompok-kelompok milisi di seluruh Timor-Leste pada pertengahan sampai akhir 1998. Milisi-milisi ini dibentuk sebagai tanggapan langsung atas kebebasan baru orang Timor Timur untuk berkampanye bagi kemerdekaan setelah kejatuhan Soeharto pada bulan Mei 1998 dan pengumuman sebulan kemudian oleh penerusnya, Presiden B.J. Habibie, bahwa Timor Timur bisa mendapatkan opsi “otonomi luas”. Setelah Habibie melangkah lebih jauh bulan Januari 1999 dan menawarkan Timor Timur pilihan antara otonomi dan kemerdekaan, kelompok-kelompok milisi menjamur di semua distrik.

120. Dalam banyak hal, pembentukan milisi hanyalah merupakan puncak dari strategi militerisasi yang telah digambarkan di atas. Dalam pembentukan milisi, TNI mengambil banyak dari berbagai macam jenis pasukan pembantu yang dianggotai oleh orang Timor Timur yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun sejak 1975. Beberapa kelompok milisi, seperti Tim Saka dan Tim Sera di Baucau, Tim Alfa di Lautém dan Tim Makikit di Viqueque, sudah ada sejak satu dasawarsa atau lebih. Halilintar di Bobonaro bermula dari sebuah satuan Partisan pada bulan-bulan menjelang invasi, dan setelah vakum selama beberapa tahun, dihidupkan kembali tahun 1994 untuk membantu ABRI dalam kampanye melawan gerakan klandestin yang merebak di distrik tersebut. Yang lainnya adalah turunan yang lebih jauh dari kelompok-kelompok paramiliter sebelumnya. Pimpinan milisi Mahidi di Ainaro juga pernah memimpin para "sukarelawan" yang meneror Ainaro di awal 1990-an.

121. Kelompok milisi yang lain merekrut pemimpinnya dari pasukan pembantu resmi seperti Wanra, Hansip dan Gadapaksi. Sebuah dokumen militer tertanggal April 1998 menunjukkan bahwa terdapat 12 tim paramiliter ketika itu, yang meliputi setiap distrik di Timor Timur kecuali Dili dan Oecusse. Dari dokumen tersebut jelas bahwa tim-tim ini, yang antara lain adalah Tim Saka, Sera, Alfa, Makikit, Halilintar dan Morok—yang kesemuanya mempertahankan nama tersebut ketika menjelma menjadi milisi—merupakan bagian dari struktur teritorial.¹³⁴ Cepatnya milisi-milisi tersebut dimobilisasi pada tahun 1999 kemungkinan besar karena mereka mampu berkembang dari struktur yang sudah ada. Pendahulu kelompok-kelompok milisi utama terrangkum dalam Tabel 2.

122. Keseluruhan periode menjelang dan langsung setelah Jajak Pendapat terjadi dengan latar kekerasan. Sebagian besar kekerasan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi, di mana pasukan TNI memainkan peran pendukung atau terlibat langsung. Peran angkatan bersenjata Indonesia dalam merencanakan dan mendalangi kekerasan ini terdokumentasi dengan baik. Penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Nasional HAM Indonesia dan Komisi Penyelidik Internasional atas Timor Timur (ICIET) yang didukung oleh PBB segera setelah gelombang kekerasan, dan oleh Unit Kejahatan Berat (Serious Crimes Unit, SCU) yang didukung PBB di Timor-Timur selama misi-misi UNTAET dan UNMISSET, serta banyak kesaksian dan submisi yang diterima oleh CAVR dan penelitian oleh CAVR sendiri, semuanya membawa pada kesimpulan yang tidak dapat disangkal lagi bahwa militer Indonesia benar-benar terlibat secara mendalam dalam segala aspek kekerasan yang terjadi, mulai dari pembentukan awal kelompok-kelompok milisi sampai pada menjalankan tahap akhir dan yang paling menyeluruh dari kekerasan pada bulan September-Oktober 1999.

123. Selain dari bukti-bukti sejarah yang sudah disebut, terdapat banyak kumpulan bukti-bukti lain yang menengarai bahwa milisi dibentuk, didukung dan dikendalikan oleh TNI. Bukti-bukti ini terangkum di bawah ini.^{*}

Keterlibatan TNI dalam pembentukan milisi-milisi

124. Pejabat senior militer Indonesia terlibat dalam perencanaan, pembentukan dan pelatihan milisi. Pada bulan February 1999 mantan pemimpin Partisan, Tomás Gonçalves, yang mengklaim bahwa ia ditawarkan namun menolak untuk menempati posisi senior dalam struktur milisi, berbicara kepada media internasional dan menjelaskan peran kunci personil militer dalam pembentukan milisi, sambil menyebut komandan Korem, Kolonel Tono Suratman, dan komandan Kodam IX Udayana Mayor-Jendral Adam Damiri, serta menyebut peran besar yang dimainkan oleh satuan intelijen SGI yang didominasi Kopassus.^{† 135} Tomás Gonçalves mengatakan:

Perintahnya datang dari Pangdam, [Mayor-Jenderal] Adam Damiri, kepada Komandan Korem Timor Timur dan Komandan Kopassus Yayat Sudrajat – hapuskan seluruh CNRT, semua orang pro-kemerdekaan, keluarga baik orang tua, anak lelaki, perempuan dan cucu mereka. Komandan Sudrajat menjanjikan pembayaran Rp200.000 kepada siapa saja yang ingin menjadi milisi.¹³⁶

125. Dalam dakwaan Unit Kejahatan Berat terhadap Jendral Wiranto dan yang lainnya, Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat menjelaskan mengenai serangkaian pertemuan dimana pejabat militer senior merencanakan pembentukan dan perekrutan milisi:

1. Pada atau sekitar bulan Agustus 1998 [komandan Daerah Militer IX Udayana, Mayor Jendral] Adam Rachmat Damiri mendatangkan seorang pemimpin pro-Indonesia dari Timor Timur naik pesawat ke Denpasar, Bali untuk menghadiri sebuah pertemuan. Pada pertemuan ini, Damiri meminta pemimpin asal Timor Timur ini untuk membentuk kelompok untuk mendukung dan mendorong integrasi.
2. Pada atau sekitar bulan Agustus 1998 Damiri berkunjung ke Dili dan bertemu dengan para komandan TNI dan pemimpin pro-Indonesia asal Timor Timur. [Komandan Korem 164] Kolonel Suhartono Suratman hadir pada pertemuan tersebut. Damiri menjelaskan kepada kelompok yang hadir tersebut bahwa perhatian internasional diarahkan pada Timor Timur dan ini merupakan masalah bagi Indonesia. Ia mengatakan pada mereka bahwa mereka perlu merancang sebuah rencana untuk menciptakan organisasi-organisasi yang akan menyebarkan rasa pro-Indonesia di seluruh Timor Timur. Ia mengatakan pada mereka bahwa mereka harus membentuk pasukan pertahanan sipil yang kuat didasarkan pada model-model dukungan TNI sebelumnya dan bahwa pasukan ini harus dikembangkan dan dibangun untuk membela integrasi.

^{*} Ringkasan komisi mengenai bukti kaitan antara milisi dan TNI sangat mengandalkan Bab 6-8 dalam laporan oleh Geoffrey Robinson yang diberikan kepada Komisi sebagai submisi.

[†] Pada tahun 1993 SGI diubah namanya menjadi Satuan Tugas Intelijen. Namun terus dikenal luas sebagai SGI (Lihat 4.2: ABRI dan perannya di Timor-Leste). Pada tahun 1999 satuan ini terdiri dari personil satuan Kopassus, yang disebut Satgas Tribuana, di bawah komando Letnan Kolonel Yayat Sudrajat. Kopassus telah memainkan peran yang dominan dalam struktur militer Indonesia di Timor-Leste sejak pertengahan 1990-an.

Sejumlah perwira senior yang memiliki latar belakang Kopassus yang pernah bertugas di Timor-Leste memainkan peran penting selama Jajak Pendapat. Termasuk di antara mereka Mayor-Jendral Zacky Anwar Makarim, yang resminya adalah wakil militer utama satuan tugas Indonesia yang diberi tugas untuk berhubungan dengan UNAMET, tapi yang juga diyakini telah memainkan peran penting dalam pembentukan milisi selama masa ini. Selain Letnan-Kolonel Sudrajat, Danrem Kolonel Tono Suratman, juga sebelumnya pernah bertugas dengan Kopassus. Atasan langsungnya, Mayor-Jendral Adam Damiri, komandan Kodam Udayana yang berbasis di Bali, juga merupakan anggota Kopassus. Di tingkat kabinet, tokoh utama lainnya yang merancang kebijakan mengenai Timor-Leste adalah Menteri Koordinasi bidang Politik dan Keamanan, Jendral (purn) Feisal Tanjung, yang adalah salah satu dari empat menteri di kabinet dengan latar belakang Kopassus. Yang lainnya adalah Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, yang keterlibatan luasnya dengan Timor-Leste sudah dimulai sejak masa komando pra-invasi dengan Tim Susi. (Robinson, hal.28-29).

3. Pada atau sekitar bulan November 1998 Damiri berkunjung ke Timor Timur. Dalam kunjungan ini ia bertemu lagi dengan para pemimpin Timor Timur pro Indonesia di Dili, termasuk orang-orang yang di kemudian hari menjadi pemimpin kelompok-kelompok milisi. Damiri meminta orang-orang yang hadir untuk bersatu dan membantu TNI memerangi kelompok pro-kemerdekaan Front Revolusioner bagi Timor Timur Merdeka [Frente Revolucionaria de Timor Timur Independente, Fretilin]. Dalam pertemuan dengan pemimpin pro-Indonesia ini, Damiri memuji pemimpin milisi kelak Eurico Guterres sebagai seorang pemuda yang bersedia untuk membela integrasi dan mengatakan bahwa ia siap memberi Guterres lima puluh juta rupiah untuk memulai kerjanya.
4. Pada atau sekitar bulan November 1998 Suratman bertemu dengan para pemimpin Timor Timur pro-Indonesia di markasnya di Dili. [Komandan Tribuana, Letnan Kolonel] Yayat Sudrajat hadir pada pertemuan tersebut. Suratman mengatakan kepada kelompok yang hadir tersebut bahwa ia ingin agar Eurico Guterres, yang kelak akan menjadi pemimpin milisi, untuk membentuk organisasi baru untuk membela integrasi seperti kelompok pemuda pro-Indonesia Gadapaksi.
5. Pada awal 1999 [Mayor Jendral] Zacky Anwar Makarim [yang menjabat sebagai kepala badan intelijen militer, BIA, sampai Januari 1999] menerima para pendiri kelompok pro-Indonesia Barisan Rakyat Timor Timur (BRTT) di kantornya di Jakarta. Selama pertemuan tersebut ia mengatakan bahwa perang gerilya akan diperlukan untuk dapat mengatasi pendukung pro-kemerdekaan jika opsi otonomi kalah dalam jajak pendapat.
6. Pada atau sekitar bulan Februari 1999 Damiri bertemu dengan pemimpin Timor Timur pro-Indonesia di markas Kodam IX Udayana di Denpasar, Bali. Damiri mengatakan kepada mereka bahwa TNI siap untuk memberi dukungan secara rahasia bagi pasukan-pasukan pro-Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dukungan ini harus bersifat rahasia untuk menghindari kecaman dan kritikan internasional. Damiri meminta orang-orang yang hadir untuk mengumpulkan orang Timor Timur yang pernah berdinass dengan TNI. Ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus bertemu dengan Suratman untuk instruksi lebih lanjut.
7. Pada atau sekitar bulan Februari 1999 Suratman bertemu dengan seorang pemimpin pro-Indonesia Timor Timur di Dili. Ia mengatakan padanya bahwa karena TNI berada di bawah rezim yang reformis, ia tidak dapat mengambil bagian dalam operasi terbuka melawan gerakan kemerdekaan. Suratman meminta pemimpin pro-Indonesia tersebut untuk membentuk sebuah kelompok milisi. Suratman mengatakan bahwa TNI siap untuk memberi dukungan dalam bentuk apapun yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok milisi.
8. Pada atau sekitar bulan Februari 1999 Sudrajat bertemu dengan anggota TNI dan pemimpin Timor Timur pro-Indonesia di markas Satuan Tugas Intelijen di Dili. Sudrajat mengatakan kepada kelompok tersebut bahwa Satuan Tugas Intelijen memiliki daftar pendukung kemerdekaan yang akan dibunuh. Ia menyatakan bahwa Satuan Tugas Intelijen dan kelompok pro-Indonesia akan bekerja sama melakukan pembunuhan-pembunuhan ini. Ia mengatakan bahwa Kopassus berpakaian preman akan mulai melakukan pembunuhan pendukung pro-kemerdekaan.
9. Pada atau sekitar bulan Maret 1999 [Asisten Operasional Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia, Mayor Jendral] Kiki Syahnakri bertemu dengan pemimpin Timor Timur pro-Indonesia di markas besar TNI di Jakarta. Syahnakri mengatakan kepada kelompok tersebut bahwa TNI akan mendukung upaya pro-Indonesia mereka dan bahwa Makarim bertanggung jawab mengkoordinasi segala aktifitas menjelang jajak pendapat. Syahnakri mengatakan kepada mereka bahwa persenjataan sudah dikirim ke Timor Timur, dan bahwa sekembalinya mereka ke Dili, mereka harus menghubungi Suratman untuk mengatur pembagian persenjataan tersebut
10. Pada awal 1999 [gubernur, Abilio] Soares menganjurkan para Bupati untuk membentuk kelompok-kelompok milisi di kabupaten mereka masing-masing. Beberapa dari para Bupati ini menjadi pemimpin milisi.¹³⁷

126. Satu aspek dari peran TNI dalam pembentukan milisi adalah keterlibatannya secara langsung dalam perekrutan. Pada awal 1999, kepala staf Korem saat itu, Letnan Kolonel Supardi, dikutip mengatakan bahwa TNI telah merekrut 1.200 anggota milisi dan akan meneruskan perekrutan sampai bulan Maret.¹³⁸ Selain menggunakan insentif keuangan sebesar Rp 200.000 untuk mendorong perekrutan, TNI juga menggunakan ancaman dan pemaksaan (lihat lebih jauh di bawah). Ditetapkan berbagai target dalam perekrutan anggota milisi di tiap distrik – yakni sekitar sepuluh orang per desa.¹³⁹ Selain itu, pelatihan milisi dilakukan sesuai aturan yang digariskan dalam berbagai instruksi dan laporan yang diterbitkan oleh perwira senior sampai pada tingkat teratas di dalam struktur komando teritorial.¹⁴⁰

Dukungan TNI bagi milisi

127. Para anggota TNI dan pemerintahan Indonesia memberi status resmi pada milisi. Mereka melakukan hal ini, misalnya, dengan menghadiri upacara pengangkatan anggota milisi dan pawai-pawai di seantero Timor Leste. Komandan Korem, Kolonel Suratman, bertemu dan memberi “bimbingan” kepada anggota milisi Besi Merah Putih (BMP) di markas Kodim 1638 pada tanggal 16 April 1999, sepuluh hari setelah pembantaian warga sipil di gereja Liquiça dan sehari sebelum amukan milisi di Dili dimana BMP juga ambil bagian.¹⁴¹ Sampai pada tanggal 8 Mei 1999 pun Komandan Korem Timor Timur Kolonel Suratman menghadiri upacara pembentukan milisi Mahadomi di Manatuto. Ia dan yang lainnya, termasuk gubernur Abilio Soares, bupati Dili Domingos Soares, dan asisten operasional angkatan darat saat itu, Mayor Jendral Kiki Syahnakri, juga hadir pada pawai pada tanggal 17 April dimana Eurico Guterres berbicara kepada anggota milisi dan menganjurkan mereka untuk membunuh “mereka yang telah mengkhianati integrasi”. Di akhir pawai tersebut, para anggota milisi menyebar dan menyerang Dili. Salah satu sasaran mereka adalah rumah Manuel Carrascalão dimana ratusan orang berlindung untuk menghindari kekerasan milisi di distrik mereka masing-masing. Di rumah tersebut mereka membunuh 12 orang.¹⁴²

128. Selain unjuk dukungan ini, penguasa Indonesia memberi milisi dukungan resmi dengan memperlakukan mereka sebagai bagian struktur pembantu resmi militer. Dalam komunikasi resmi, kelompok-kelompok milisi ini sering kali disebut sebagai bagian dari kelompok-kelompok pertahanan sipil yang ada, Wanra, Hansip atau Ratih.¹⁴³ Dari bulan April 1999, kelompok-kelompok milisi juga secara resmi diakui sebagai Pam Swakarsa (organisasi sukarelawan keamanan sipil).¹⁴⁴

Partisipasi TNI dalam kegiatan milisi

129. Hubungan dekat antara TNI dan milisi terlihat dengan jelas dari tumpah tindih keanggotaan mereka. Banyak anggota milisi yang juga adalah anggota TNI aktif, suatu fakta yang diperkuat oleh dokumen-dokumen resmi militer dan pemerintah Indonesia.¹⁴⁵ Setidaknya satu kelompok milisi (Tim Saka) telah merupakan “kompi khusus” yang masuk penuh di dalam struktur TNI sejak beberapa tahun sebelumnya.¹⁴⁶ Selain itu, pemimpin milisi diperlakukan sebagai bagian aparat keamanan resmi dan diundang dalam pertemuan-pertemuan bersama tentara, polisi dan pejabat pemerintah.¹⁴⁷

Pemberian pelatihan, persenjataan dan dukungan operasional

130. TNI juga memberi pelatihan, persenjataan dan dukungan operasional bagi milisi-milisi. Peran TNI dalam melatih milisi diperkuat oleh beberapa sumber termasuk berbagai dokumen, telegram Indonesia, dan setidaknya satu pernyataan kepada media oleh Letnan Kolonel Supardi, kepala staf Korem di bulan-bulan awal 1999.¹⁴⁸ TNI menyediakan persenjataan, dan kontrol atas penggunaannya juga diatur oleh TNI.¹⁴⁹ Banyak bukti mengenai hal ini ditemukan dalam

¹³⁸ Saat itu, Rp200.000 = AS\$26,66.

dokumen-dokumen, juga kenyataan bahwa milisi memiliki persenjataan modern yang jenisnya sama dengan yang digunakan oleh tentara dan polisi Indonesia.¹⁵⁰ Jendral Wiranto sendiri mengakui kepada para penyidik bahwa:

Kadang-kadang senjata disediakan, tapi ini bukan berarti mereka [milisi] membawa senjata kemanapun mereka pergi. Senjata-senjata tersebut disimpan di markas Koramil.¹⁵¹

131. Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat membuat tuduhan-tuduhan berikut dalam dakwaannya terhadap Jendral Wiranto dan yang lainnya:

11. Pada atau sekitar bulan Maret 1999 [gubernur, Abilio] Soares mengadakan rapat di kantornya di Dili. [Komandan Korem 164, Kolonel Suhartono] Suratman dan [komandan unit Kopassus, Satgas Tribuana, Letnan Kolonel Yayat] Sudrajat hadir pada pertemuan tersebut. Soares mengatakan kepada kelompok pemimpin Timor Timur pro-Indonesia bahwa para pendukung kemerdekaan yang mencari perlindungan dengan pastor dan suster-suster adalah komunis yang harus dibunuh. Ia juga mengatakan kepada kelompok tersebut bahwa TNI akan menyediakan senjata kepada kekuatan pro-Indonesia. Ia mengatakan apabila TNI tidak dapat menyediakan senjata yang cukup, ia akan menyediakannya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia akan menyediakan dana bagi organisasi pro-Indonesia BRTT.
12. Pada atau sekitar bulan Maret 1999 Sudrajat dan anggota TNI yang lain menyampaikan sejumlah besar senjata api kepada seorang pemimpin Timor Timur pro-Indonesia. Sudrajat meminta pemimpin Timor Timur tersebut untuk memberi senjata kepada kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia.
13. Pada atau sekitar bulan April 1999 [kepala badan intelijen angkatan bersenjata BIA], Mayor Jendral Zacky Anwar Makarim mengatakan kepada para komandan TNI dan pemimpin-pemimpin Timor Timur pro-Indonesia bahwa mereka harus bekerja keras untuk otonomi karena apabila otonomi kalah, akan lebih banyak darah yang tumpah. Ia menawarkan pemimpin Timor Timur pro-Indonesia untuk menggunakan senjata otomatis dan memerintahkan Suratman untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan senjata api tersebut.
14. Pada atau sekitar bulan April 1999 Suratman, setelah diminta oleh Makarim untuk menyediakan senjata api otomatis kepada pemimpin Timor Timur pro-Indonesia, memerintahkan bawahannya Sudrajat untuk mengatur pengumpulan dan distribusi senjata api tersebut.¹⁵²

132. TNI juga memberi dukungan operasional kepada para milisi. Terkadang dukungan ini berupa penggunaan markas dan pos-pos TNI oleh milisi. Dalam kasus milisi yang dibentuk jauh sebelum 1999, penggunaan basis TNI seperti ini hanyalah merupakan penerusan hubungan lama. Satu contoh adalah penggunaan markas Kopasus oleh Tim Alfa di Lospalos.

Operasi gabungan TNI-milisi.

133. Dalam operasi gabungan pasukan TNI sering hadir ketika terjadi penyerangan oleh milisi, dengan pasukan TNI berada pada posisi di belakang anggota milisi dan menembak hanya untuk membela mereka ketika milisi diserang.¹⁵³ Satu operasi milisi yang dihadiri oleh pasukan TNI adalah pada pembantaian di gereja Liquiça bulan April 1999. Partisipasi anggota TNI menjadi semakin jarang setelah kedatangan UNAMET pada bulan Juni 1999, walaupun ini terus berlanjut selama minggu-minggu menjelang jajak pendapat, termasuk dalam kejadian-kejadian berpamor tinggi seperti penyerangan pada kantor UNAMET di Maliana (Bobonaro) pada tanggal 29 Juni 1999. Operasi gabungan TNI-milisi yang luas kembali terjadi setelah jajak pendapat pada bulan

September 1999, setelah staf internasional dipaksa meninggalkan distrik-distrik dan terkepung di kantor pusat UNAMET di Dili atau telah meninggalkan negeri ini.¹⁵⁴

Pemberian dukungan keuangan dan materi oleh TNI dan badan-badan lainnya

134. Akhirnya, terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa pejabat sipil dan militer Indonesia mendanai milisi dan menyediakan sumber daya untuk digunakan mereka. Sekitar AS\$ 5,2 juta disalurkan kepada kelompok-kelompok milisi melalui pemerintah sipil Indonesia.¹⁵⁵ Rencana Anggaran untuk “sosialisasi otonomi” disusun oleh setiap kabupaten, yang mencakup alokasi dana untuk milisi, dan diserahkan kepada gubernur untuk disahkan. Dana tambahan disediakan melalui cabang-cabang pemerintahan Indonesia dan TNI yang lain. Terdapat juga bukti bahwa kelompok-kelompok politik pro-integrasi, FPKD (Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan) and BRTT (Barisan Rakyat Timor Timur), yang keduanya memiliki hubungan erat dengan pemerintahan sipil (lihat 4.3: Pemerintahan Sipil), digunakan untuk menyalurkan dana dari pemerintah dan militer kepada milisi.¹⁵⁶ FPKD dikepalai oleh Bupati Dili, Domingos Soares, sementara ketua BRTT adalah Francisco Lopes da Cruz, mantan presiden UDT yang menjadi wakil gubernur Timor Timur pada tahun-tahun awal pendudukan, dan yang pada tahun 1999 menjadi duta besar keliling dengan misi untuk mendorong pandangan Indonesia tentang Timor Timur secara internasional.¹⁵⁷

135. Hubungan dekat antara milisi dan TNI serta penguasa sipil Indonesia ini membuat Komisi Penyelidik PBB menyatakan dalam laporannya bahwa:

15. Terdapat bukti bahwa Tentara Indonesia dan penguasa sipil di Timor Timur dan beberapa di Jakarta menerapkan kebijakan untuk menggunakan milisi untuk mempengaruhi hasil jajak pendapat. Pendekatan yang digunakan adalah untuk memberi kesan bahwa orang Timor Timur saling memerangi di antara mereka.
16. Terdapat bukti bahwa kebijakan menggunakan milisi dijalankan oleh Kopassus dan badan intelijen TNI lainnya. Kebijakan ini terwujud dalam perekrutan aktif, pendanaan, penyediaan senjata dan bimbingan serta penyediaan dukungan logistik bagi milisi dalam intimidasi dan serangan terornya.
17. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa, dalam kasus-kasus tertentu, anggota militer Indonesia, selain mengarahkan milisi, juga terlibat langsung dalam intimidasi dan serangan teror tersebut. Intimidasi, teror, perusakan harta benda, pemindahan dan evakuasi paksa orang-orang tidak akan mungkin terjadi tanpa keterlibatan aktif tentara Indonesia, serta pengetahuan dan restu komando militer tertinggi.
18. Polisi Indonesia, yang bertanggung jawab atas keamanan menurut kesepakatan 5 Mei,[†] tampak telah terlibat dalam tindak intimidasi dan teror dan dalam kasus-kasus lain tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini.
19. Komisi beranggapan bahwa pada akhirnya militer Indonesia-lah yang bertanggung jawab atas intimidasi, teror, pembunuhan dan tindak kekerasan lainnya yang dialami oleh orang Timor Timur sebelum dan sesudah jajak pendapat. Selanjutnya, bukti yang dikumpulkan sampai saat ini menunjukkan bahwa orang-orang tertentu terlibat langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia.¹⁵⁸

^{*} CAVR memiliki beberapa anggaran seperti ini.

[†] Perundingan antara Indonesia dan Portugal di Kota New York City pada tanggal 5 Mei 1999 membawa hasil bahwa kedua pemerintahan mempercayai Sekretaris Jenderal PBB untuk mengorganisir serta menjalankan sebuah Jajak Pendapat untuk menentukan apakah rakyat Timor Timur menerima atau menolak otonomi khusus bagi Timor-Leste di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Polisi Republik Indonesia mengemban tugas pengamanan selama Jajak Pendapat.

Konsekuensi kerja sama milisi-TNI

136. Ian Martin, Utusan Khusus Sekretaris Jendral PBB selama masa UNAMET, mengatakan kepada Komisi:

[W]akil Jaksa untuk Kejahatan Berat yang ditunjuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan bukti yang cukup untuk menuntut kepemimpinan tertinggi TNI dengan kejahatan terhadap umat manusia...Dalam pendapat saya, tidak ada lagi keraguan bahwa penghancuran Timor Timur bukan semata merupakan hasil respon emosional milisi dan pembangkangan orang Timor Timur di dalam TNI: ini merupakan operasi yang direncanakan dan dikoordinasi di bawah arahan TNI.¹⁵⁹

137. Kekerasan tahun 1999 dibahas di bagian lain dalam laporan ini (lihat bagian 3: Sejarah Konflik, bab 7.2 tentang pembunuhan dan penghilangan, bab 7.3 tentang pemindahan dan kelaparan, bab 7.4 tentang penahanan dan penyiksaan, dan bab 7.7 tentang kekerasan seksual). Dalam kaitannya dengan bab ini, penting untuk diperhatikan adanya hubungan erat antara TNI dan kelompok-kelompok milisi Timor Timur, serta dominasi TNI atas pemerintahan sipil dan kepolisian di Timor Timur. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa masuk ke Timor Timur tahun 1999, milisi yang didukung TNI menteror penduduk, tanpa intervensi oleh polisi Indonesia.¹⁶⁰

138. Pihak berwenang Indonesia menyatakan bahwa kelompok-kelompok milisi ini adalah ungkapan spontan dukungan setempat untuk integrasi, dan bahwa kekerasan merupakan hasil konflik antara orang Timor Timur yang pro-kemerdekaan dengan yang pro-integrasi. Akan tetapi tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah ancaman-ancaman ini. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian di Liquiça dan Dili pada bulan April 1999 tidak pernah dicari dan dibawa ke pengadilan. "Pelucutan senjata" milisi pada bulan Agustus 1999 jelas-jelas merupakan sandiwara yang dirancang untuk memberi kesan bahwa milisi menyambut keputusan Falintil untuk "mengkantonisasi" pasukannya (lihat bagian 3 tentang sejarah konflik).

139. Ketika kekerasan besar-besaran terjadi setelah jajak pendapat, TNI mencoba menggambarkan hal ini sebagai kekerasan spontan akibat kejutan dan kemarahan atas hasil yang pro-kemerdekaan. Akan tetapi, implementasi yang cepat dan luasnya skala kekerasan dan penghancuran menengarai sebuah operasi yang direncanakan dengan baik dengan dukungan logistik yang canggih.¹⁶¹ Walaupun milisi sering kali berada di garis depan aktifitas seperti ini, dalam banyak kasus mereka didukung secara langsung oleh anggota militer dan polisi.¹⁶² Mereka pada dasarnya menjalankan rencana TNI. Dan memang, ancaman milisi untuk menghancurkan Timor Timur jika pilihan kemerdekaan yang menang pernah diperingatkan sebelumnya oleh Komandan Militer Timor Timur Kolonel Suratman beberapa bulan sebelum jajak pendapat, ketika ia mengatakan dalam wawancara dengan televisi Australia:

Saya mau sampaikan satu pesan: kalau pihak pro-kemerdekaan menang, bukan hanya Pemerintah Indonesia yang akan berurusan dengan hasilnya. PBB dan Australia juga harus mengatasi masalahnya, dan jika ini memang terjadi, tidak akan ada yang menang. Semuanya akan dihancurkan. Timor Timur tidak akan ada lagi seperti sekarang. Akan jauh lebih buruk dari 23 tahun yang lalu.¹⁶³

140. Selama masa menjelang jajak pendapat, penduduk sipil Timor Timur diteror dan tidak dapat mengandalkan polisi atau pemerintahan sipil untuk menghormati hukum serta menegakkan hukum dan ketertiban. Militer dan polisi, yang tugasnya adalah untuk melindungi penduduk, justru membiarkan dan mendukung kekerasan dan intimidasi ini. Dengan penarikan mundur PBB dan

pengamat internasional pada hari-hari pasca jajak pendapat,[†] kerja sama antara milisi dan TNI terjadi sangat terang-terangan dan keduanya berpartisipasi dalam pemindahan jumlah penduduk sipil yang amat besar ke Timor Barat dan daerah-daerah lain di Indonesia.¹⁶⁴ Selama proses ini, militer Indonesia, polisi dan milisi Timor melakukan pembunuhan, kekerasan seksual dan penganiayaan lainnya terhadap penduduk sipil.

4.4 Pemerintahan Sipil

Pemerintahan Sementara di Timor Timur

141. Pada tanggal 18 Desember 1975, segera setelah melakukan invasi besar-besaran di Timor-Timur, Indonesia membentuk Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT).[†] Kebanyakan posisi pemerintahan ini diisi oleh orang Timor Timur yang pro-integrasi dengan Indonesia, yang umumnya berasal dari partai Apodeti dan UDT. Anggota PSTT diangkat di Dili sementara pertempuran keras sedang berlangsung akibat dari invasi yang makin masuk jauh ke dalam wilayah pedalaman. Selama tujuh bulan masa tugasnya, Pemerintahan Sementara tersebut ternyata tidak memiliki kekuatan dalam membuat keputusan oleh karena begitu dominannya militer Indonesia. Kesaksian mantan Gubernur Timor Timur Mário Carrascalo di depan Komisi menyebutkan:

Saya tidak bisa menganggap PSTT sebagai sebuah Pemerintah yang sebenarnya. Ketua Eksekutifnya adalah Arnaldo de Araújo, dengan Lopes da Cruz sebagai Wakilnya. Ketua Dewan Populer "Asembleia Popular" adalah Guilherme Gonçalves. Dewan Populer/Rakyat itu baru mulai berfungsi...mereka berkumpul hanya satu kali yaitu pada bulan Mei 1976 di sini, hanya untuk membahas satu butir "piagam"-nya, yaitu, mengenai Integrasi Tanpa Referendum.¹⁶⁵

142. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) mensahkan Undang-Undang No. 7/76, dan Presiden Soeharto menandatangani pada bulan Juli 1976, Indonesia mengklaim bahwa integrasi Timor Timur secara resmi telah sempurna. Undang-Undang No. 7/76 memerintahkan pembentukan sebuah pemerintahan provinsi, dan untuk memberlakukan UU ini pada tanggal 30 Juli 1976 Pemerintah RI mengeluarkan Dekrit No.19/1976 yang menetapkan struktur pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten di Timor Timur. Aturan ini menerapkan struktur pemerintahan sipil baku yang berlaku di Indonesia juga kepada Timor Timur. Walau demikian, dengan sedikit perubahan aturan ini tetap mempertahankan stuktur pemerintahan sipil Portugis: *conçelho* menjadi kabupaten (distrik), *posto* menjadi kecamatan (subdistrik), *suco* menjadi desa, dan *aldeia* menjadi kampung/ dusun. Hasil dari kebijakan ini adalah jumlah satuan pemerintahan pada tingkat kabupaten dan kecamatan jauh melebihi apa yang umumnya berlaku di wilayah Indonesia lainnya. Terlebih lagi, seperti di wilayah Indonesia lainnya, militer Indonesia (ABRI) membangun struktur komando teritorial yang sejajar dengan pemerintahan sipil, yang artinya juga lebih banyak kehadiran militer di tingkat lokal di Timor Timur dibandingkan dengan wilayah lain Indonesia.

[†] Dua belas Pejabat Hubungan Militer PBB bertahan di kedutaan Australia di Dili setelah UNAMET pergi pada tanggal 14 September 1999. Mereka dilindungi oleh pasukan Kostrad.

[†] Pada bagian ini, di laporan tertulis East Timor dalam bahasa Inggris, untuk menunjukkan nama administratif pemerintahan Indonesia 'Timor-Timur' bagi wilayah tersebut. Istilah Timor-Leste tetap digunakan untuk menyebut wilayah tersebut untuk maksud selain sebagai bagian pemerintahan Indonesia.

Table 3 - Struktur pemerintahan Indonesia, dengan satuan yang setara dari sistem Portugis serta militer Indonesia

Tingkat	Istilah Indonesia	Posisi Pemerintahan	Kesetaraan Portugis	Komando militer yang sejajar
Provinsi	Provinsi	Gubernur	Wilayah	Korem
Distrik (13)	Kabupaten	Bupati dan Sekretaris	concelhos	Kodim
Sub Distrik (62)	Kecamatan	Camat dan Pembantu camat	Postos Administrativos	Koramil
Desa (442)	Kelurahan/ Desa	Lurah/Kepala Desa	Suco	Babinsa
Sub Desa	Kampung/Dusun RW (Rukun Warga) RT (Rukun Tetangga)	Kepala kampung	chefe de aldeia	
RT	RT/RW	Ketua RT		

Sumber: Dokumen penelitian CAVR, arsip CAVR

Kedudukan Gubernur*.

143. Selama rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, gubernur sebuah provinsi Indonesia ditunjuk sekali dalam lima tahun oleh presiden, dan selanjutnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat nasional.[†] Perwira militer yang masih aktif atau sudah pensiun ditunjuk untuk memegang jabatan gubernur di hampir setengah provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Di Timor Timur, pemerintah RI menunjuk penduduk sipil asli Timor Timur sepanjang masa pendudukan.

144. Pada tanggal 4 Agustus 1976, Jakarta menunjuk Arnaldo dos Reis Araújo, pemimpin Apodeti, sebagai gubernur pertama, yang menjadikan Timor Timur sebagai provinsi baru. Ketua UDT, Francisco Lopez da Cruz, ditunjuk sebagai wakil gubernur. Araújo diganti pada tahun 1978, setelah ia secara terang-terangan mengkritik Indonesia.¹⁶⁶ Dalam sebuah wawancara dengan wartawan Indonesia September 1980 ia berkata:

Pemerintah menunjukkan perhatian yang besar [untuk Timor Timur], tetapi sayangnya ini tidak ditujukan secara langsung kepada warga Timor Timur. Ini tidak ubahnya seperti pada zaman penjajahan Portugis: uang datang dari Portugal diberikan atas nama warga Timor Timur hanya untuk dikirim kembali ke Portugal atas nama pribadi orang yang dikirim oleh pemerintah Portugal sendiri.

145. Ia memberi saran kepada pemerintah Indonesia untuk:

[M]enciptakan situasi normal sesegera mungkin dan akhiri situasi teror, kekuasaan tanpa batas, kesewenangan, dan hukum rimba, anarki, monopoli ekonomi dan lain-lain, sama seperti pada zaman penjajahan Portugis.¹⁶⁷

* Arnaldo dos Reis Araujo, 1976-78, Apodeti; Guilherme Maria Gonçalves, 1978-82, Apodeti; Mário Viegas Carrascalão, 1982-87 dan 1987-92, UDT; Abilio José Osorio Soares, 1992-1997 and 1997-1999, Apodeti.

† Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan ketua badan legislatif di daerah, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), secara formal merupakan penguasa tertinggi di suatu provinsi Indonesia.

146. Pengganti Araújo, Guilherme Maria Gonçalves, adalah anggota Presidium Apodeti, salah seorang penandatangan Deklarasi Balibo dan adalah seorang *liurai*. Ia adalah seorang tokoh pendukung aneksasi oleh Indonesia, dengan merekrut banyak orang yang ikut membentuk satuan Partisan Timor Timur yang menyertai invasi militer Indonesia. Kekuasaannya sebagai gubernur berakhir tahun 1982 setelah ia cekcok dengan Sekretaris Wilayah (Sekwilda), Kolonel Paul Kalangi, mengenai masalah penggunaan pajak kopi yang telah dibayar ke pemerintah daerah.¹⁶⁸

147. Selama tahun-tahun awal ini pemerintahan sipil menghadapi banyak persoalan. Hal ini termasuk kurangnya personel, sulitnya komunikasi yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman bahasa Indonesia di antara orang Timor-Timur, dan pada tingkat kepemimpinan terjadi perseteruan antara anggota Apodeti dan UDT yang bekerja dengan orang Indonesia. Laporan polisi pada bulan Maret 1983 menyatakan:

*Sejak dibentuknya PSTT, penunjukan pejabat pemda diprioritaskan pada ex anggota partai Apodeti [baik sebagai Gubernur, Bupati atau Camat], sedangkan ex anggota partai UDT hanya ditunjuk sebagai pembantumereka. Namun banyak di antara mantan UDT mempunyai hubungan buruk dengan atas mereka dalam posisi administratif. Sehingga jalannya Pemda belum sesuai dengan apa yang diharapkan.*¹⁶⁹

148. Terlebih lagi, pada awal-awal tahun pendudukan ketika ABRI masih berperang hebat dengan pasukan Fretilin, masalah pemerintahan sipil merupakan hal yang tidak terlalu diprioritaskan.

149. Gubernur yang ketiga yaitu Mário Viegas Carrascalão, salah seorang pendiri UDT, dilantik pada tanggal 18 September 1982. Ia menjabat selama dua periode, hingga Juni 1992. Carrascalão adalah salah seorang di antara segelintir orang Timor-Leste yang memiliki gelar sarjana pada tahun 1970-an, dan pernah menjadi anggota delegasi Indonesia ke PBB dari tahun 1980-1982.¹⁷⁰ Ia mengatakan kepada Komisi bahwa ia diangkat atas 'instruksi' Jenderal Moerdani.¹⁷¹ Selama Carrascalão menjabat sebagai Gubernur, Timor-Timur mengalami proses 'normalisasi' dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintahan provinsi dikonsolidasikan dan Timor Timur dijadikan sejajar dengan hampir semua provinsi di Indonesia. Di akhir tahun 1988, Presiden Soeharto menandatangani Keppres No. 62 1988, yang secara resmi mengakhiri ketertutupan wilayah ini dan menormalkan kembali status Timor-Timur sebagai sebuah provinsi.¹⁷² Mário Carrascalão mengatakan kepada Komisi bahwa hanya setelah keputusan ini dibuat, kontrol militer terhadap Timor-Timur berkurang.¹⁷³

150. Setelah menduduki jabatan lima-tahun yang kedua, Carrascalão diganti pada tahun 1992 oleh Abilio Osario Soares, seorang tokoh yang tidak terlalu memegang peranan[†] di Apodeti.¹⁷⁴ Pencalonan Soares didukung oleh menantu Presiden Soeharto, Letnan Kolonel Prabowo, yang pada waktu itu di Kopassus, yang memiliki peran yang sangat besar di Timor Timur waktu itu.¹⁷⁵ Abilio Soares menjadi Gubernur sampai berakhirnya pendudukan Indonesia di sana.

151. Mantan Ketua UDT, Francisco Lopez da Cruz, masih menjabat sebagai wakil gubernur sampai tahun 1982. Ia digantikan oleh pejabat militer Indonesia, Brigadir Jenderal A.B. Saridjo, yang memegang jabatan sampai tahun 1993.¹⁷⁶ Ia kemudian diganti lagi oleh perwira militer

[†] Mário Carrascalão mengatakan kepada Komisi bahwa dia memundurkan diri dari jabatan sebagai gubernur setelah Pembantaian Santa Cruz pada Bulan Nopember 1991, di dalam at Audensi Umum Nasional mengenai perempuan dan Konflik, April 2003. Ternyata itu ketikan masa jabatan kedua selesai.

[†] Abilio Soares adalah adik dari tokoh Apodeti José Osario Soares, yang dibunuh ketika berada dalam tahanan Fretelin pada bulan Januari 1976, di pantai selatan Timor-Leste.

yang lain, yaitu Letnan Kolonel J Hariwibowo yang menjabat sampai tahun 1999. Kedua wakil gubernur tersebut adalah mantan Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda).

152. Pada tahun 1987, Timor Timur dibagi menjadi tiga Wilayah Pembantu Gubernur, yaitu: bagian timur dengan ibukota di Baucau; bagian tengah berpusat di Gleno; dan bagian barat dikendalikan dari Maliana (Bobonaro).[†] Setiap wilayah ini diperintah oleh seorang pembantu gubernur (pendamping), kedudukan ini biasanya dijabat oleh perwira militer.¹⁷⁷

Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda)

153. Secara resmi, jabatan eksekutif nomor dua di provinsi dipegang oleh Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda). Kenyataannya, sebagaimana provinsi Indonesia, oleh karena pemegang posisi ini berwenang mengendalikan anggaran provinsi, maka posisi ini menjadi sangat berpengaruh. Posisi ini secara formal ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pada awalnya warga Timor Timurlah yang menduduki jabatan ini, meski selanjutnya semua (kecuali satu) pejabat yang ditunjuk adalah perwira militer.[†] Sekwilda membidangi urusan yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek.¹⁷⁸ Kedudukan yang sama juga terdapat pada tingkat kabupaten.

Dewan Perwakilan Rakyat

154. Dewan Perwakilan Rakyat adalah bagian legislatif pada setiap tingkat pemerintahan di Indonesia. Lembaga ini terdapat di tingkat pusat (DPR), provinsi (DPRD Tingkat 1) dan Kabupaten (DPRD tingkat 2). Secara teori ketua DPRD, bersama dengan Gubernur, memegang kekuasaan tertinggi di tingkat provinsi. Selama masa pendudukan Timor-Timur, 80% jabatan di tiap perwakilan dikuasai tiga partai yang diizinkan negara.[‡] ABRI secara otomatis mendapat jatah 20% kursi.

155. DPRD pertama di Timor Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang No I/AD, 1976 tertanggal 4 Agustus 1976 dengan Guihelme Gonçaves sebagai ketuanya. Lembaga ini mempunyai 30 anggota, tidak ada satu pun yang dipilih. DPRD tingkat II juga dibentuk. Mantan Wakil Bupati Viqueque Armindo Soares Mariano berkata kepada Komisi bahwa satu-satunya kriteria menjadi anggota DPR pada awal tahun 1976 itu adalah penunjukan dan persetujuan dari Musyawarah Pimpinan Daerah[§] (Muspida), terdiri dari pemerintah dan Komandan militer tingkat kabupaten. Ia menambahkan:

Pada waktu itu mereka [Muspida] langsung mengangkat para anggota karena belum ada lembaga DPR, tidak ada juga pemilu. Di Tingkat II pun anggotanya ditunjuk. Memang ada lembaga DPR di sana tapi mereka itu hanya ditunjuk...semua...orang itu berasal dari desa itu dan kecamatan itu. Misalnya DPR di Viqueque pada waktu itu memerlukan 20 orang, jadi 20 orang ini diambil masing-masing 4 orang dari 5 kecamatan, dan mereka adalah tokoh-tokoh non-formal, liurai atau anak liurai yang agak menonjol, mereka itulah yang ditunjuk lalu duduk di sana.¹⁷⁹

[†] Divisi ini tidak sama dengan kelima divisi militer.

[‡] Sekretaris Wilayah Daerah di Timor-Leste adalah: Jose Bonifacio dos Reis Araujo (1976), JR Sinaga (ABRI), AP Kalangi (ABRI). Drs. Saridjo (ABRI), Antonio Freitas Parada, J Hariwibowo (ABRI), Drs. Radjagarina Brahmana (ABRI)

[§] Golkar, PDI (Partai Demokrasi Indonesia), PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

[§] *Muspida* secara teoritis adalah mekanisme konsultasi untuk melakukan koordinasi antara pemerintahan sipil dan komando teritorial militer dan kepolisian. Dalam prakteknya, muspida didominasi oleh militer.

156. Tidak ada catatan bahwa DPRD memberikan perhatian terhadap nasib rakyat Timor-Timur selama bencana kelaparan antara tahun 1979-80.¹⁸⁰ Bagaimanapun juga pada tahun 1981, eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pejabat Indonesia di Timor Timur memberikan inspirasi kepada anggota DPRD setempat untuk menulis surat keluhan kepada Presiden Soeharto.¹⁸¹ Surat protes anggota DPRD tersebut, ditandatangani oleh anggota paling tua dan yang paling muda, mengungkapkan kemarahan terhadap rezim ekonomi yang diciptakan oleh penguasa pendudukan dan akibatnya terhadap penduduk Timor Timur:

Situasi ekonomi rakyat Timor Timur sedang melewati tahap yang paling tragis sejak permulaan perang saudara...Cukup banyak bantuan untuk membangun ekonomi yang telah diterima...tapi rakyat Timor Timur belum merasakan manfaat dari produksi komoditas pertanian mereka seperti kopi, cendana, kemiri, kayu, tembaga dan hasil bumi lainnya. PT Denok adalah perusahaan khusus yang berlokasi di Timor Timur untuk menyerap seluruh hasil ekonomi provinsi dengan imbalan jasa bagi Pemerintah Indonesia...Lima tahun setelah integrasi, sebagian besar penduduk belum bisa menikmati kondisi hidup yang layak.¹⁸²

157. Laporan ini juga menyesalkan penyalahgunaan dana pembangunan oleh pejabat militer yang menduduki pada posisi tinggi di pemerintahan sipil. Surat tersebut menuduh Sekwilda, Kolonel Paul Kalangi, serta wakilnya Kapten A. Azis Hasyam, telah menyelewengkan dana pembangunan yang dialokasikan langsung dari pemerintah pusat di Jakarta. Para anggota Dewan mengklaim mengetahui pengeluaran belanja “ratusan juta rupiah” yang mereka temukan “terang-terangan fiktif”. Surat itu juga menyatakan bahwa bantuan obat-obatan yang dikirim banyak ditemukan di toko-toko yang ada di Dili, sementara itu rumah sakit justru mengalami kekurangan persediaan obat-obatan. Akhirnya, anggota Dewan juga mengeluhkan, untuk mendapatkan kerja yang di pemerintahan “provinsi”, sebagai lembaga yang menyerap tenaga kerja paling banyak di sana, seorang pelamar harus menjadi warga negara Indonesia. Pekerjaan pegawai negeri hanya tersedia bagi mereka yang mendukung pendudukan. Salah satu indikasi bagaimana pihak militer menghadapi pernyataan penentangan bahkan dalam bentuknya yang paling halus, adalah ditahannya anggota dewan yang menulis surat tersebut.¹⁸³

158. Pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali di Indonesia. Pemilihan umum nasional yang pertama di Timor Timur diadakan pada tahun 1982. Sebanyak 311.375 penduduk Timor Timur ikut memilih. Hasilnya benar-benar menipu, dan pada awalnya menunjukkan lebih dari 100% pemilih terdaftar memberikan suara mereka untuk partai pemerintah, yakni Golkar (lihat bagian 3: Sejarah Konflik). Sebagai hasil dari pemilihan umum, 36 orang memperoleh kursi di DPRD Tingkat I, sedangkan sebanyak delapan orang mewakili Timor-Timur di DPR Pusat. Pada tahun-tahun kemudian tingkat pluralisme meningkat, dalam batasan yang dikontrol ketat oleh Orde Baru. Pada tahun 1995 DPRD Tingkat I Timor-Timur bertambah menjadi 45 kursi. Pada pemilihan umum tahun itu Golkar memenangkan 20 kursi, PDI lima dan PPP dua kursi, serta ABRI memperoleh jatah sembilan kursi.

Table 4 - Komposisi Anggota DPR Provinsi Timor-Timur Berdasarkan Fraksi, 1980-1997

Tahun	Fraksi PPP	Fraksi Golkar	Fraksi PDI	Fraksi ABRI	Fraksi Non ABRI	Total Anggota DPR
1980	0	25	0	0	0	25
1981	0	24	0	0	0	24

* Diskriminasi sistemik dalam perekrutan pegawai ini sama dengan persyaratan zaman Orde Baru dimana semua pegawai harus menjadi anggota Golkar yang telah bersumpah untuk melindungi ideologi Pancasila.

1982*	0	32	0	4	0	36
1987*	0	34	2	9	0	45
1988	0	34	2	9	0	45
1989	0	33	2	9	0	44
1990	0	34	2	9	0	45
1991	0	34	2	9	0	45
1992*	2	29	5	9	0	45
1997*	1	30	5	9	0	45

*Tahun Pemilu.

Sumber: DPRD Tingkat I Timor Timur

Lembaga Administrasi Pemerintah: program nasional di tingkat provinsi

159. Pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru sangat tersentralisasi. Sebagian besar keputusan kebijakan diambil di Jakarta sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional terstruktur. Ketika itu Indonesia menerapkan Repelita sebagai dasar pengambilan kebijakan fiskal dan pembangunan. Para menteri yang berkantor di Jakarta, departemen dan biro pemerintah menerapkan kebijakan tersebut melalui kantor-kantor mereka yang berada di tingkat provinsi. Diperlukan waktu beberapa tahun sebelum struktur ini dapat beroperasi di Timor Timur, karena fokus utama Indonesia adalah operasi militer dan untuk itu Indonesia perlu merekrut dan melatih pejabat pemerintah. Sejak awal, Timor Timur dikendalikan oleh militer. Pada masa tahun-tahun awal pendudukan, tidak seperti wilayah lain di Indonesia, Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) membentuk tim yang secara langsung memerintah Timor Timur. Timor-Timur diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri pada tahun 1978, yang membawa pemerintahan yang setara dengan praktek pemerintahan Indonesia pada umumnya.^{*} Namun, militer tetap memegang kontrol utama atas pemerintahan. Militer memegang posisi kunci dalam pemerintahan sipil, dan mempunyai wewenang veto yang efektif atas jabatan, yang memberinya kekuasaan yang besar, khususnya atas perekonomian provinsi tetapi juga atas penyusunan kebijakan lokal.

160. Begitu integrasi secara resmi terjadi pada bulan Juli 1976, militer Indonesia mulai memberlakukan standar-standar sesuai dengan yang berlaku dalam struktur Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1976 Menteri Pertahanan dan Keamanan menjadikan Timor Timur sebagai daerah operasi militer dalam negeri dengan mendirikan Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan Timor Timur (Kodahankam Timor Timur) yang beroperasi di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan.¹⁸⁴ Dokumen kementerian menyebutkan bahwa:

Komando Daerah Pertahanan Keamanan Timor Timur dibentuk dengan maksud untuk membangun landasan bagi Pembinaan dan Pengembangan Pertahanan dan Keamanan di Timor Timur selama "masa transisi" sampai akhir Repelita Kedua [April 1979], serta untuk menjalankan Pembinaan dan Pengembangan Pertahanan dan Keamanan Nasional.¹⁸⁵

161. Sub-bagian mengenai ABRI pada bab ini membahas tentang proses ini secara lebih terinci. Pada dasarnya, militer membentuk struktur teritorial yang memperkenalkan sistem komando militer dan polisi turun ke desa sejajar dengan pemerintah sipil.

^{*} Bahkan setelah disetarakan dengan praktek pemerintahan yang biasa di Indonesia, Timor-Leste tetap merupakan kasus yang bersifat khusus. Timor-Leste mendapatkan anggaran khusus langsung dari pemerintah pusat. Di samping itu, Timor-Leste juga menerima dana khusus yang cukup besar melalui Instruksi Presiden (*Inpres*). Selain itu, anggaran nasional memiliki jalur anggaran khusus bagi Timor-Leste (butir anggaran 16).

162. Dalam kurun beberapa tahun pertama pendudukan Indonesia, Jakarta memerintah Timor-Timur secara langsung. Pada tahun 1976-1977 Tim Koordinasi Pusat Pendidikan dan Kebudayaan diberikan tanggung jawab atas program dan koordinasi pendidikan. Hal itu mencerminkan fokus awal rezim pendudukan atas pelatihan bahasa, agar orang Timor Timur dapat berasimilasi dengan negara Indonesia.¹⁸⁶ Di Timor Timur, tim ini bekerja melalui Tim Pendamping Pendidikan dan Kebudayaan.

163. Pada tahun 1978 tim yang lebih besar dibentuk untuk menjalankan pemerintahan yang dinamai Tim Pelaksana Pembangunan Pusat, TPPP. Pelaksananya terdiri atas personel dari lembaga pemerintah di Jakarta, yang diketuai oleh Jenderal Moerdani. Tim ini bekerja melalui Tim Pelaksana Pembangunan Daerah atau TPPD, yang secara formal diketuai oleh gubernur tetapi sebenarnya di bawah kendali Kolonel Kalangi, yang saat itu menjabat *sekwilda*.¹⁸⁷ Kebanyakan sektor pemerintahan, seperti keamanan dan ketertiban, politik, informasi, komunikasi, pengendalian jumlah penduduk dan perumahan, tenaga kerja, PKK dan kegiatan keagamaan, langsung berada di bawah pengawasan langsung TPPP Jakarta. Pemerintahan setempat bertanggung jawab hanya atas lima sektor: pendidikan dasar, kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, dan kesejahteraan sosial.¹⁸⁸

164. Setelah tahun 1978, ketika kendali pemerintahan Timor Timur secara resmi diserahkan dari Departemen Pertahanan kepada Menteri Dalam Negeri, Indonesia mendirikan lebih banyak kantor-kantor pemerintah. Fokusnya adalah pada pendidikan dan informasi publik. Kantor pemerintah yang pertama kali beroperasi adalah kantor pendidikan dasar, yang dibuka pada tahun 1978. Selain bahasa, fokus awalnya yang lain adalah informasi, dan pada tahun 1978 Departemen Penerangan Timor Timur memasang pemancar televisi di Marabia, di perbukitan ke arah selatan dekat kota Dili. Departemen ini membagikan pesawat televisi ke seluruh wilayah Timor Timur untuk memastikan bahwa siaran langsung dapat ditonton.¹⁸⁹

165. Pada akhir 1970 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mulai berfungsi. Lembaga ini memusatkan diri pada infrastruktur, bangunan sekolah dasar dan sekolah keguruan. Pada tahun 1979 Departemen Pendidikan terbentuk, sebagai proses yang terpisah dengan pembentukan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Timor Timur).¹⁹⁰ Ketika Pelita ketiga dimulai pada bulan April 1979, sebagian Timor-Timur dimasukkan ke dalam mekanisme perencanaan nasional. Pada permulaan Pelita keempat tahun 1984, Timor Timur menjadi bagian tak terpisahkan dengan perencanaan dan penerapan kebijakan nasional Indonesia.

166. Pada awal 1980-an Indonesia mengembangkan struktur pemerintah yang baku di Timor Timur. Indonesia membentuk tiga kantor yang biasanya berada di tingkat provinsi. Yang pertama dari tiga kantor ini adalah Kantor Wilayah (Kanwil). Kantor Wilayah merupakan kantor yang penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, terstruktur secara vertikal dengan kantor pusat, dan bertanggung jawab untuk penerapan kebijakan secara langsung, misalnya kebijakan perpajakan dan industri.¹⁹¹ Di Timor-Timur, kantor-kantor ini kebanyakan dikepalai oleh pejabat militer yang diperbantukan pada pemerintah sipil (dikaryakan)[†], dan kebanyakan stafnya berasal dari luar Timor Timur.¹⁹² Di antara kantor dinas yang berkuasa adalah Bappeda. Sebagai titik

[†] Kanwil 'vertikal' serta lembaga lain di bawah menteri-menteri kabinet nasional termasuk Pertambangan dan Energi, Pertanian, Koperasi, Pendidikan dan Kebudayaan, Industri, Transmigrasi, Perdagangan, Kesehatan, Kehutanan, Perhubungan, Informasi, Pekerjaan Umum, Sosial, Ketenagakerjaan, Pembangunan Rural, BP7 (ideologi nasional), dan BKKBN (keluarga berencana). Cabang lain termasuk Dolog, Bappeda, Inspektorat Provinsi, Badan Pusat Statistik, serta Sospol.

[†] Pegawai yang dikaryakan adalah militer aktif yang diperbantukan untuk tugas administrasi sebagai bagian dari doktrin Dwi Fungsi ABRI yang memberinya peran dalam bidang politik dan pembangunan, dan pertahanan. Lihat pembahasan bagian militerisasi masyarakat Timor-Leste di atas. Pada akhir masa pendudukan, pegawai yang dikaryakan mengisi 140 posisi kunci di pemerintah Timor-Leste, termasuk 19 pimpinan kantor administrasi di tingkat provinsi, Wakil Gubernur, dan dua posisi asisten gubernur. *Sekwilda*, Kepala Bidang Sospol (*Kakansospol*) dan Ketua Bappeda adalah semuanya berasal dari militer. Di tingkat kabupaten, mereka mengontrol 64 posisi, termasuk tiga dari 13 posisi *Bupati*. Lihat dokumen militer yang disita 1998, *Rekapitulasi Karyawan ABRI yang bertugas di eksekutif + legislatif*, hal 16 dan 17.

koordinasi utama untuk proyek-proyek pemerintah, Bappeda mengalokasikan proyek 'basah' kepada pengusaha, militer serta pejabat pemerintah.¹⁹³

167. Kelompok kantor administrasi yang lain adalah satuan pemerintah yang disebut dinas,^{*} yang sebagian juga memiliki kantor di tingkat kabupaten. Untuk kantor dinas, proporsi staf yang berasal dari Timor Timur adalah lebih tinggi, kadang-kadang mencapai 60 persen.¹⁹⁴ Meskipun pemerintah daerah tingkat provinsi bertanggungjawab atas satuan-satuan operasional ini, tumpang-tindih yang luas di antara kanwil dan dinas berakibat bahwa pemerintahan lokal tidak lain adalah 'perpanjangan pemerintahan pusat'.¹⁹⁵

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan

168. Pemerintah kabupaten dikepalai oleh bupati. Bupati diangkat oleh gubernur. Bupati bertanggung jawab atas pemerintahan kabupaten, dan untuk mengkoordinasikan semua kecamatan yang berada di bawah wilayah kabupaten bersangkutan. Pemukiman penduduk di Timor Timur yang jarang, ditambah lagi dengan banyaknya pembagian pemerintah kabupaten dan kecamatan, berarti provinsi ini diatur secara berlebihan.

169. Administrasi pemerintah di tingkat kabupaten terutama terdiri atas kantor-kantor dinas. Misalnya ada kantor dinas untuk administrasi tenaga kerja, layanan publik dan infrastruktur. Segala sesuatunya dikoordinasikan dan diterapkan melalui provinsi. Di antara kantor dinas di tingkat kabupaten proporsi pegawai yang berasal dari Timor Timur relatif tinggi, sekitar 60%, namun kebanyakan dari mereka adalah pegawai golongan rendah.¹⁹⁶ Setelah Timor-Timur dibagi menjadi tiga daerah administrasi pada tahun 1987, seorang asisten gubernur ditugaskan untuk masing-masing daerah, yang kemudian mengkoordinasikan semua bupati.

170. Pada tahun-tahun awal pendudukan, sangat sedikit sekali jumlah calon yang berkualifikasi untuk jabatan layanan publik, hal ini mempengaruhi pengangkatan banyak posisi. Laporan yang dibuat oleh mantan bupati Lautém pada tahun-tahun awal pendudukan menunjukkan kesulitan yang dihadapi pihak militer dalam menjalankan administrasi:

Pegawai negeri dari zaman Portugal langsung diangkat. Harus ada persetujuan dari ABRI...Orang-orang di antara kami yang turun [dari gunung] lebih dahulu dan yang dulu adalah pegawai negeri juga langsung diangkat, apakah dia dulu Fretilin, Apodeti atau UDT...pokoknya angkat...Tapi tiap-tiap kecamatan ada camatnya. Staf-staf ada orang dari pusat untuk mendampingi kami. Mereka juga ABRI...Mereka membantukami karena kami tidak tahu bahasa Indonesia.¹⁹⁷

171. Semua, kecuali satu, *Bupati* pertama berasal dari, atau berhubungan dengan, partai politik Apodeti atau UDT. Sebagian, seperti Claudio Vieira, adalah mantan anggota Partisan. Pengangkatan tampaknya didasarkan atas campuran antara keputusan akan personel yang terampil, dan kepentingan militer untuk keperluan pengontrolan dan kepatuhan. Kunci pengangkatan yang lain, seperti camat, dilakukan oleh bupati bersama dengan Muspida[†] —Musyawarah Pimpinan Daerah.¹⁹⁸ Mantan wakil bupati Viqueque, Armindo Soares Mariano, menjelaskan prosedur tersebut kepada Komisi:

^{*} Dinas termasuk Pertanian, Peternakan, Pendidikan dan Kebudayaan, Perikanan, Kehutanan, Perpajakan Daerah, Pertambangan, Perkebunan, Kesehatan Publik, Pekerjaan Umum, DLLAJ, Sosial, dan Turisme.
Bappeda, Sosial Politik, Bangdes, Pengawas Provinsi.

[†] Pada tingkat kabupaten, Bupati, Danrem dan Kapolres bertemu pada rapat *Muspida*.

Memang dari Tingkat II yaitu Bupati bersama Muspida, yang mengusulkannya. Pada waktu itu kan tidak ada hal semacam itu, dan hanya meminta kepada Bupati dan kriterianya itu adalah bahwa orang ini siapa-siapa. Jadi dari Bupati yang mengusulkannya, dan usulannya itu dari Bupati kemudian di tanda-tangani oleh Dandim sebagai Ketua Muspida dan Bupati juga ikut menanda-tanganinya. Setelah itu dikirim ke Tingkat Propinsi, jadi setelah itu turun SK Gubernur.¹⁹⁹

172. Selama masa pendudukan Indonesia, militer mengisi beberapa kali jabatan bupati, meskipun orang Timor Timur yang cenderung akan ditunjuk untuk menduduki posisi itu, seperti halnya dengan gubernur.

Table 5 - Bupati Berdasarkan Asal-usul dan Afiliasi, 1976-99

Distrik	Tanggal	Bupati	Partai	Asal	Kebangsaan
Aileu	Mei 1976-1989	Abel Dos Santos F.	UDT	-	Timor
	1989-1994	Fernão Verdial	-	Ainaro	Timor
	1994	Waluyo	ABRI	-	Indonesia
	1994-1999	Suprpto Tarman	ABRI	-	Indonesia
Ainaro	Mei 1976-1984	Moises Da Silva Barros	Apodeti	Ainaro	Timor
		Letkol. H. Hutagalung	ABRI	-	Indonesia
	1994-1999	José A. B. Dos Reis Araujo	Apodeti	Ainaro	Timor
	1999	Norberto de Araujo	Apodeti	Ainaro	Timor
	Evaristo D. Sarmento	UDT	Maubisse	Timor	
Ambeno	Mei 1976-1984	Jaime Dos R. De Oliveira	UDT	Same	Timor
	1984-1989	Letkol. Imam Sujuti	ABRI	-	Indonesia
	1994-1999	Vicente Tilman P.D. Filomeno Mesquita	Apodeti Apodeti	Viqueque Ambeno	Timor Timor
Baucau	Mei 1976-1982	Abel Da Costa Belo	Apodeti	Baucau	Timor
	1982-1987	Kol. I. Gusti Ngurah O.	ABRI	-	Indonesia
	1987-1992	Drs. Herman Sediono	ABRI	-	Indonesia
	1992-1999	Virgilio Dias Marçal	UDT	Baucau	Timor
Bobonaro	Mei 1976-1984	João Da Costa Tavares	UDT	Bobonaro	Timor
	1984-1989	João Da Costa Tavares	UDT	Bobonaro	Timor
	1989-1992?	Mariano Lopes Da Cruz	UDT	Manatuto	Timor
	1992? - 1999	Guilherme dos Santos	UDT	Bobonaro	Timor
Covalima	Me77 - c. 81	Americo Da Costa Nunes	Apodeti	Bobonaro	Timor
	c. 1981-1989	Rui Emiliano T. Lopes	UDT	\	Timor
		Rui Emiliano T. Lopes	UDT	Suai	Timor
	1994-1999	Drs. Herman Sediono	ABRI	Suai	Indonesia
Dili	Mei 76 - 1984	Mario Sanches Da Costa	ex Fretilin	Laleia	Timor
	1984-1989	Raimundo Sarmento	UDT	Manatuto	Timor
	1994-1999	Armindo Soares Mariano Domingos M.D.Soaes	Apodeti -	Viqueque Manatuto	Timor Timor
Ermera	Mei 76 - 1984	Tomas Aquino Gonçalves	Apodeti	Atsabae	Timor
	1984-1989	Tomas Aquino Gonçalves	Apodeti	Atsabae	Timor
	1994-1999	Letkol. Inf. Hidayat Constantino Soares	ABRI -	- Ermera	Indonesia Timor
Liquica	Mei 1977-1984	Francisco Dos Santos	Apodeti	Liquica	Timor
	1984-1989	Ribeiro	UDT	Same	Timor
	1994- 1999	Jaime Remedios de Oliveira Gaspar Sarmento Leoneto Martins	UDT Apodeti	Liquica Maubara	Timor Timor
Lautem	Mei 76 - 85	Claudio Vieira	Apodeti	Moro	Timor
	1985-1990	Letkol. Hendrikus	ABRI	-	Indonesia
	1990-1995	José Valente	Fretilin	Lore	Timor
	1995-1999	Edmundo Conceicao Da Silva	Apodeti	Moro	Timor
Manatuto	Mei 76-1984	Luis Maria Da Silva	Fretilin	Manatuto	Timor
	1984-1989	Elias Enes Carceres	Kota	Manatuto	Timor
	1994-1999	Abilio José Osorio Soares Vidal Doutel Sarmento	Apodeti Apodeti	Laklubar Manatuto	Timor Timor
Manufahi	Mei 76-1984	Alexandrino Borromeo	Apodeti	Manufahi	Timor
	1984-1989	Tomas Correia	UDT	Manatuto	Timor
		Nazario Andrade	UDT	Manatuto	Timor
	1995-1999	Nazario Andrade	UDT	Manatuto	Timor
Viqueque	Mei 76-1984	Jaime Dos Santos Carvalho	Apodeti	Viqueque	Timor
	1984-1989	Mayor Syarif Hidayat	ABRI	-	Indonesia
	1989-1994	Y. Hendro S.	ABRI	-	Indonesia
	1995-1999	I Ketut Lunca	ABRI	-	Indonesia
	1999	Martinho Fernandes	Apodeti	Viqueque	Timor

Sumber: CAVR.

Pemerintah Tingkat Desa

173. Desa-desanya di Indonesia diperintah oleh seorang *kepala desa*, yang berkoordinasi dengan *Rukun Tetangga (RT)* dan *Rukun Warga (RW)*. Pada zaman Portugis berkuasa, desa di Timor Timur (*suco*) seringkali dikoordinasikan oleh *liurai* setempat. Pada masa pendudukan Indonesia, seperti halnya dengan sebagian besar daerah di Indonesia, pemimpin adat setempat seringkali merasa ditekan oleh negara.²⁰⁰

174. Setelah peristiwa pemindahan dan pemukiman penduduk secara besar-besaran antara tahun 1978 dan awal 1980an, Indonesia mulai membangun pedesaan di Timor Timur. Pada tahun 1980 Pemerintah Indonesia membentuk LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri no.25, dan Indonesia menetapkan organisasi ini di Timor Timur pada tahun 1982. Pengurus LKMD berasal dari desa, bertugas menjalankan tujuan pembangunan negara di tingkat desa.

175. Lembaga penting lain dari pemerintah desa adalah Koperasi Unit Desa, atau KUD. Ini merupakan koperasi para petani yang dimonopoli pemerintah untuk menjual hasil pertanian. Meskipun koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menjamin pasar, tetapi dalam prakteknya tujuan yang baik ini seringkali disalahgunakan oleh berbagai macam monopoli oleh pemerintah. Inilah masalah yang terjadi di Timor Timur, di mana KUD digunakan untuk membeli kopi dari petani dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar, praktek monopoli kopi PT Denok yang didukung militer, mendapat untung yang sangat besar (lihat pembahasan mendalam di bab 7.9: Hak Ekonomi dan Sosial). Pengamat ekonomi Indonesia, Profesor Mubyarto, memberikan komentar atas dampak praktek ini terhadap industri kopi dan kredibilitas pemerintah sipil di Timor Timur:

Stagnasi ekonomi kopi adalah terutama akibat pengaturan oleh monopoli swasta untuk membeli kopi melalui sistem resmi Koperasi Unit Desa (KUD). Di mata masyarakat monopoli swasta yang bekerja melalui koperasi desa ini melemahkan kredibilitas pemerintah, khususnya berkenaan dengan kemampuannya (atau bahkan integritasnya) dalam pembangunan pedesaan.²⁰¹

176. Para komandan militer dan pejabat tinggi pemerintah seperti gubernur diuntungkan karena kontrol mereka terhadap industri kopi. Mantan gubernur Mário Carrascalão telah menerangkan pembagian keuntungan yang besar yang diperoleh dari biaya para petani Timor Timur, dan bagaimana dana "komisi kopi" dibagi antara militer di tingkat kabupaten dan provinsi serta pejabat sipil— gubernur, jaksa, pimpinan militer, dan yang lain.²⁰²

177. Pada tahun 1984, program pembangunan yang dijalankan oleh militer yang disebut "ABRI Masuk Desa" atau AMD diluncurkan.²⁰³ ABRI berpendapat ini merupakan sumbangan yang berharga bagi pembangunan desa oleh pasukan teritorial, sedangkan kritik atas program tersebut menganggap bahwa program ini merupakan cara lain bagi militer untuk tetap dapat melakukan pengawasan terhadap warga.

178. Tingkat kontrol oleh militer atas pemerintah dan ekonomi setempat, dan juga masalah keamanan, mengakibatkan banyak orang Timor Timur sangat menderita, termasuk sebagian orang yang pada mulanya mendukung intervensi dan pendudukan oleh Indonesia. Tim ekonomi Indonesia menjelaskan dampak militer atas perekonomian provinsi:

Karena campur tangan militer yang besar dalam urusan ekonomi dan pembangunan, penduduk setempat cenderung tidak menghormati mereka. Bahkan di antara kalangan elit Timor Timur ada yang begitu membenci militer karena mereka bertanggungjawab atas stagnasi ekonomi wilayah tersebut.²⁰⁴

Layanan Sipil

179. Indonesia membangun layanan sipil yang besar di Timor-Timur, besar dalam kaitannya dengan penduduk dari layanan sipil nasional. Pada tahun 1981 terdapat 780 pegawai negeri. Pada tahun 1997 terdapat lebih dari 33.602 orang.²⁰⁵ Dari jumlah ini, 18.000 orang bekerja di ibu kota kabupaten, dan sisanya sebanyak 15.300, bekerja di Dili. Banyak di antara mereka adalah guru dan pegawai kesehatan. Banyak pegawai negeri di Timor-Timur direkrut dari wilayah lain di Indonesia. Mereka pada umumnya memegang posisi yang lebih penting dibandingkan dengan rekan mereka dari Timor Timur. Pelamar kerja yang berasal dari Timor Timur untuk jabatan pemerintahan harus menunjukkan bukti sebagai warga negara Indonesia. Mereka pada umumnya diperlakukan dengan penuh kecurigaan dan selalu harus melewati saringan untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada Negara Indonesia dan doktrinnya, Pancasila. Divisi khusus ABRI yang dikenal dengan sebutan *Komando Taktis -- Kotis* bertugas melakukan penyaringan.[†] Kecurigaan yang mendalam terhadap personel dari Timor Timur yang ditunjukkan dengan adanya proses ini merupakan faktor penghambat bagi mereka untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi menjadi pegawai negeri.²⁰⁶

180. Pemerintahan sipil Indonesia di Timor Timur, hampir selama seluruh periode pendudukan, sangat tunduk kepada pemerintah militer dan strukturnya. Militer mendominasi semua aspek pemerintahan pada tahun-tahun awal pendudukan ketika pembungkaman terhadap perlawanan merupakan prioritas utama dan operasi militer penuh ketika itu sedang dijalankan. Ketika situasi ini mengendor pada akhir 1970-an, militer gagal untuk menghancurkan secara total perlawanan bersenjata, sehingga obsesinya untuk mengontrol warga sipil berakibat timbulnya penguasaan struktur pemerintah militer di segala bidang hingga di tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, personel militer memegang jabatan kunci dalam pemerintah sipil itu sendiri. Banyak pejabat yang menggunakan jabatan ini untuk keuntungan mereka pribadi. Hasilnya adalah pemerintahan ganda, pemerintahan yang berlebihan, dan dampak penindasan terhadap ekonomi dan pembangunan. Pemerintah sipil juga terkompromi karena kedekatannya dengan ABRI.

181. Regim Orde Baru membuat proses pemerintahan sangat tersentralisasi yang berarti bahwa provinsi yang jauh seperti Timor Timur ditiadakan dari pengambilan kebijakan dan tidak adanya arah atas masa depan mereka. Hal ini diperburuk oleh konteks militerisasi akibat konflik di daerah ini. Regim ini juga mempolitikasi pemerintah sipil, dan hal ini lebih lanjut berakar dalam konteks Timor Timur di mana warga Timor Timur dengan latar belakang pro-integrasi lebih disukai dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap warga Timor Timur oleh pihak penguasa Indonesia berakibat pada jatah posisi, khususnya posisi senior, dalam pemerintahan sipil yang jadi didominasi oleh warga Indonesia yang dibawa ke wilayah ini.

182. Pemerintahan sipil di Timor Timur benar-benar tercela dan kurang memiliki integritas. Dalam konteks konflik yang terus menerus dan masyarakat yang sangat termiliterisasi selama

[‡] Pegawai negeri sipil sebanyak 3,09 persen dari penduduk, dengan 2,12 persen di tingkat nasional. [Badan Pusat Statistik, *Timor-Leste Dalam Angka*, Dili, 1993.]

[†] Pegawai Kotis dapat ditemukan di setiap tingkat struktur komando militer dan bertanggung jawab atas intelijen harian dan pengawasan penduduk. Pada akhir 1970an mereka bertugas untuk melakukan penyaringan terhadap warga yang turun dari pegunungan. Setiap orang yang mau mengajukan izin kerja, izin perjalanan, KTP, atau bahkan surat nikah, mula-mula harus mengisi 15-halaman pertanyaan di depan pegawai *kotis*. Pertanyaan yang diajukan mencakup kehidupan pribadi individu secara terinci, dan silsilah keturunan. Juga mencakup afiliasi politik seseorang, sikap dan reaksi mereka terhadap "kup" UDT bulan Agustus 1975, invasi Indonesia bulan Desember 1975, integrasi, Fretilin dan lain-lain. Jawabannya mengikat secara hukum, dan pernyataan yang "salah" dapat dikenai hukuman.

dua puluh empat tahun pendudukan Indonesia, keefektifannya sebagai institusi sipil yang profesional yang memberikan pelayanan kepada rakyat di daerah tersebut jelas terbatas. Hal ini dengan sendirinya menghalangi perlindungan dan peningkatan hak asasi manusia warga Timor Timur.

183. Lagipula, pada akhir 1998 dan selama tahun 1999 pelayanan publik Indonesia terpolitisasi secara mendalam dalam hal persoalan penentuan nasib sendiri, baik sebelum maupun setelah penandatanganan persetujuan-persetujuan tanggal 5 Mei. Anggaran pemerintah dipakai untuk mendukung kampanye pro-otonomi, termasuk disalurkan kepada kegiatan milisi-milisi (lihat bagian 3: Sejarah Konflik).

¹ Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, Zed Books, London, 1984, hal. 7-17; James Dunn, *East Timor: Rough Passage to Independence*, Longueville Books, NSW, 2003, hal. 254; Robert Lowry, *The Armed Forces of Indonesia*, Allen and Unwin, St. Leonards, NSW, 1996, hal. 315-316.

² Sebagian besar informasi di bagian ini diambil dari Ulf Sundhaussen, *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967*, Oxford University Press, Oxford, 1982, hal. 1-50.

³ Ian MacFarling, *The Dual Function of the Indonesian Armed Forces*, Australian Defence Studies Center, University of New South Wales, NSW, 1996, hal. 114.

⁴ Cribb, R. (2001). How Many Deaths? Problems in the statistics of massacre in Indonesia (1965-1966) and East Timor (1975-1980). *Violence in Indonesia*. I. Wessel and G. Wimhöfer. Hamburg, Abera: 82-98.

⁵ Dunn, hal. 159.

⁶ Lowry, hal. 135.

⁷ Mcfarling, hal. 87.

⁸ Lowry, hal. 20.

⁹ Lowry, hal. 94.

¹⁰ Lowry, hal. 110.

¹¹ Ulf Sundhaussen, "The Inner Contradiction of the Suharto Regime: A starting point for a withdrawal to the barracks" dalam David Bouchier & John Legge (eds.), *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, Centre for Southeast Asian Studies Monash University, Victoria, 1994, hal. 277-278.

¹² Harold Crouch, "The Trend to Authoritarianism: The Post-1945 Period" in Harry Aveling (ed.), *The Development of Indonesian Society*, University of Queensland Press, St. Lucia, 1979, hal. 197.

¹³ Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, 1978. hal. 274.

¹⁴ Crouch, hal. 280.

¹⁵ Annual Report on Military Expenditures, 1998, Submitted to the Committee on Appropriations of the U.S. Senate and the Committee on Appropriations of the U.S. House of Representatives by the Department of State on February 19, 1999.

¹⁶ Lowry, hal. 23.

¹⁷ Crouch, hal. 273.

¹⁸ Mcfarling, hal. 100.

¹⁹ Mcfarling, hal. 130.

²⁰ Mcfarling, hal. 145.

²¹ Crouch, hal. 275-77.

-
- ²² Kesaksian Yusuf Wanandi pada CAVR, Audiensi Publik tentang Penentuan Nasib Sendiri serta Komunitas Internasional , 15-17 Maret 2004; Lihat juga laporan ini mengenai Hak Ekonomi dan Sosial.
- ²³ Crouch, hal. 299.
- ²⁴ Crouch, hal. 300.
- ²⁵ Lowry, hal. 47-48.
- ²⁶ Arnold C Brackman, *Indonesia: Suharto's Road*, American-Asian Educational Exchange, 1973, hal. 29.
- ²⁷ Mcfarling, hal. 139.
- ²⁸ Mcfarling, hal. 92.
- ²⁹ Kepres 19/1969, 3 Maret, dikutip dalam Mcfarling, hal. 92.
- ³⁰ Lowry, hal. 70-72.
- ³¹ Ken Conboy, *Kopassus: Inside Indonesia's Special Forces*, Equinox Publishing, Jakarta, 2003, hal. 197.
- ³² Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Markas Besar TNI, *Sejarah TNI Jilid IV (1966-1983)* [Center for TNI History and Tradition, TNI Main Headquarters, *TNI History Volume IV (1966-1983)*], Jakarta, 2000, hal. 145; Conboy, hal. 199
- ³³ *Surat Keputusan Menhankam/Pangab Skep/1063/VIII/1975, yang ditandatangani oleh Jenderal M. Panggabean.*
- ³⁴ *Surat Keputusan Menhankam/Pangab Skep/1063/VIII/1975.*
- ³⁵ *Ibid.*
- ³⁶ *Kementerian Pertahanan dan Keamanan , "Nomor: KEP/03/II/1977 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Komando Daerah Pertahanan-Keamanan Timor-Timur (Kodahankam Tim-Tim," tanggal 18 Februari 1977.*
- ³⁷ *Menhankam/Pangab dan Mendagri, "Nomor KEP/35/X/1976 – Nomor 261, Tahun 1976 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Staf Kordinasi Kewilayahan Propinsi Timor-Leste," tanggal 26 Oktober 1976.*
- ³⁸ *Telegram Menhankam/Pangab Minister of Defense and Security/ABRI Command telegram "Nomor: STR/969/1978 tanggal 11 September 1978 tentang Persiapan Likwidasi Kodahankam Tim-Tim."*
- ³⁹ *Jiwa Atmadja, TNI Kembali ke Jatidiri: Profesionalisme Kodam IX/Udayana, Penerbit Tabloid Mingguan Taksu, Denpasar, 2000, hal. 65.*
- ⁴⁰ *Kementerian Pertahanan dan Keamanan, "Nomor: Kep/23/X/1978 tentang Normalisasi Penyelenggaraan Pertahanan-Keamanan di Daerah Timor-Timur dan pembubaran Kodahankam Tim-Tim," tanggal 12 Oktober 1978.*
- ⁴¹ *Kolakops Timor-Leste Dalam Gambar dan Peristiwa Tahun 1992-1993 (Dili: tanpa penerbit, 1993), hal. 182.*
- ⁴² *Tapol, Occasional Report No. 26, Oct 98, East Timor Under The Indonesian Jackboot , An Analysis of Indonesian Army Documents.*
- ⁴³ *Dokumen yang dikirim oleh Komandan Korem (Danrem) 164/Wiradarma kepada Komandan Kodim (Dandim) nomor 1627 sampai dengan 1639: TR Dan Kolak Ops No: TR/661/IX/1983 tanggal 28 September 1983, seperti dapat dibaca, misalnya, dalam berkas pengadilan terhadap David Dias Ximenes (No. 22/PID/B/84/PN.DIL).*
- ⁴⁴ *Department of Defense and Security, "Petunjuk Pelaksanaan Nomor: Juklak/01/IV/1979 tentang Kegiatan Bidang Operasi Tempur Tahun 1979-1980," tanggal 23 April 1979.*
- ⁴⁵ *"Surat Keputusan Pangab Nomor Kep/17/P/IX/1984," tanggal 19 September, 1984, dikutip dalam Tahun Dharma Bakti Kostrad , hal. 84.*

-
- ⁴⁶ 35 Tahun darma Bakti Kostrad (tidak ada informasi bibliografi), hal. 91.
- ⁴⁷ Douglas Kammen, "Notes on the Transformation of the East Timor Military Command and its Implications for Indonesia," *Indonesia* No. 73, April 2002, hal. 61-76.
- ⁴⁸ Kepala Tim Analisis Intelijen to Panglima Kolakops, Memo Intelijen nomor R/63/MI/VIII/1992, tertanggal 11 Agustus 1992, yang dikutip dalam Samuel Moore, "The Indonesian Military's Last Years in East Timor. An Analysis of Its Secret Documents," *Indonesia* 72, October 2001, hal. 28-29.
- ⁴⁹ Moore, hal. 28.
- ⁵⁰ Moore, hal. 26-29.
- ⁵¹ Tapol, Occasional Report No. 26.
- ⁵² Douglas Kammen, "The Trouble with Normal", in *Violence and the State in Suharto's Indonesia, South East Asia Program, Cornell University, 2001, hal. 11.*
- ⁵³ Komando Daerah Militer IX/Udayana, Komando Resort Militer 164, *Rekapitulasi Kekuatan Personil Organik dan Penugasan Posisi*, Nopember 1997; Komando Daerah Militer IX/Udayana, Komando Resort Militer 164, *Rekapitulasi Kekuatan Personil Organik dan Penugasan*, Juli 1998.
- ⁵⁴ Tapol, Occasional Report No. 26.
- ⁵⁵ Tapol, Occasional Report No. 26.
- ⁵⁶ Catriona Drew, "The East Timor Story: International Law on Trial", *European Journal of International Law*, 1990-2004, Academy of European Law, New York.
- ⁵⁷ "Surat Menhankam/Panglima TNI kepada Presiden RI tentang Perkembangan Lanjut Situasi Timtim dan Saran Kebijaksanaan Penanganannya," No. R/511/P-01/03/14 Set, ditandatangani oleh Jenderal Wiranto, tertanggal 6 September, 1999.
- ⁵⁸ "Direktif Panglima TNI," No. 02/P/IX/1999, yang ditandatangani oleh Jenderal Wiranto, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tanpa tanggal tapi rupanya dikeluarkan tanggal 6 September September 6.
- ⁵⁹ Surat "R/544/P/IX/1999," yang ditandatangani Jenderal Wiranto, tertanggal 20 September 1999.
- ⁶⁰ Tomas Goncalves, kesaksian lisan kepada CAVR, *Audiensi Publik tentang Konflik Internal 1974-76* , 15-18 Desember 2003.
- ⁶¹ Pidato Uskup Belo saat penandatanganan Kesepakatan Kesatuan Nasional, bertepatan dengan persiapan kampanye pemilihan umum 2001 buat Konstituante, , Juli 2001, arsip UNDP Timor-Timur Civic Education.
- ⁶² Mário Carrascalão and Tomás Gonçalves, kesaksian lisan kepada CAVR, *Audiensi Publik tentang Konflik Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁶³ José Ramos-Horta, kesaksian lisan kepada CAVR, *Audiensi Publik tentang Konflik Internal 1974-76* , 15-18 Desember 2003.
- ⁶⁴ Xanana Gusmão, João Carrascalão and Mári Alkatiri, kesaksian lisan kepada CAVR, *Audiensi Publik tentang Konflik Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁶⁵ Mário Carrascalão and Mári Alkatiri, kesaksian lisan kepada CAVR, *Audiensi Publik tentang Konflik Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003.
- ⁶⁶ Tomas Goncalves, kesaksian lisan kepada CAVR, *Audiensi Publik tentang Konflik Internal 1974-76* , 15-18 Desember 2003; wawancara dengan Tomás Gonçalves, Dili, 23 Oktober 2003.
- ⁶⁷ Wawancara dengan Tomas Goncalves, anggota pendiri Apodeti, Dili, 23 Oktober 2003; Conboy, *Kopassus*, hal. 206.
- ⁶⁸ Pernyataan HRVD # 04599, dan 02491.

-
- ⁶⁹ Wawancara SCU dengan Tomás Gonçalves, 8 Agustus 2000, hal. 4.
- ⁷⁰ Wawancara SCU dengan with Tomás Gonçalves, 8 Agustus 2000, hal. 5; Conboy, *Kopassus*, hal. 240.
- ⁷¹ Tomas Goncalves, kesaksian lisan kepada CAVR, *Audiensi Publik tentang Konflik Internal 1974-76* , 15-18 Desember 2003.
- ⁷² Pernyataan HRVD #01689; wawancara CAVR dengan Manuel de Oliveira, 19 Oktober, 2003.
- ⁷³ Wawancara SCU dengan Tomás Gonçalves, 8 Agustus 2000, hal. 5; pernyataan HRVD nomor 01108-01; 01123-01; 01794-01; 04470-01; 02525-01; 06410-08; 01748-03; 05018-01; 03551-01.
- ⁷⁴ Rekaman wawancara dengan Joao Vietja Carrascalao [sic] SI, oleh Mr T. Sherman, pewawancara, 13 Maret 1996, hal. 128-129, 132.
- ⁷⁵ Jolliffe, hal. 164; Helen Hill, *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae* , Yayasan HAK & Sahe Institute for Liberation, Dili 2000, halp. 195.
- ⁷⁶ Wawancara SCU dengan Thomas Goncalves, 8.8.2000; Conboy, *Kopassus*, hal. 246.
- ⁷⁷ Dr Asvi Warman Adam, kesaksian lisan kepada CAVR, Audiensi Publik tentang Penentuan Nasib Sendiri serta Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2003.
- ⁷⁸ Tomas Goncalves, kesaksian lisan kepada CAVR, *Audiensi Publik tentang Konflik Internal 1974-76* , 15-18 Desember 2003.
- ⁷⁹ Wawancara CAVR dengan Manuel de Oliveira, 19 Oktober 2003; wawancara CAVR dengan Rui Lopes, 31 Oktober 2003; wawancara CAVR dengan Tomás Gonçalves, 23 Oktober 2003. Narasi yang berbeda dapat dibaca dalam pernyataan tertulis Olandino Luis Maia Guterres, Partisan, kepada CAVR.
- ⁸⁰ Geoffrey Robinson, *East Timor 1999 - Crimes Against Humanity*, A Report Commissioned by the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Los Angeles, UCLA, Juli 2003, hal. 160, Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004.
- ⁸¹ Wawancara dengan Manuel de Oliveira, 10 Oktober, 2003, Alas; wawancara dengan Bonifacio Guterres, 10 Mei, 2003, Baucau; informasi yang bertentangan terdapat di wawancara dengan Antonio do Rosário, 23 Juni 2003, Hera.
- ⁸² Wawancara CAVR dengan Miguel Sanches, Manbara (Liquiça), 2003.
- ⁸³ Tapol, Occasional Report No. 26, hal. 4.
- ⁸⁴ Wawancara SCU dengan Tomás Gonçalves, 8 Agustus, 2000, hal. 21.
- ⁸⁵ Kodam IX Udayana/Korem 164, Rekapitulasi PA/BA/TA ABRI Putra Daerah Timor-Leste, Dili, Juli 1998
- ⁸⁶ Conboy, *Kopassus*, hal. 269.
- ⁸⁷ Pernyataan HRVD nomor #02281, #00706, #02130, #01619, #01632, dan #01633.
- ⁸⁸ Wawancara CAVR dengan Antonio Babo Calsinha, Ermera, 28 Mei, 2003.
- ⁸⁹ Wawancara dengan Geraldo da Cruz, 28 Juni 2004; pernyataan HRVD nomor #03039 dan #00643; wawancara dengan Bonifacio Guterres, 10 Mei, 2003, Baucau.
- ⁹⁰ Wawancara dengan Geraldo da Cruz, staf CAVR, 28 Juni 2004; pernyataan HRVD #00663.
- ⁹¹ Wawancara dengan Sebastião da Cunha, Manatuto, 12 Mei 2004; wawancara dengan Geraldo da Cruz, 28 Juni 2004.
- ⁹² Korem 164, Seksi-Intel, “Rencana Penyusunan Kembali Rakyat Terlatih”.
- ⁹³ Pernyataan HRVD #07336-02; 07735-09.
- ⁹⁴ Pernyataan HRVD # 06797-02; 07081-03; 07059-01.

-
- ⁹⁵ General Prosecutor of the United Nations Transitional Administration in East Timor, Indictment against Joni Marques et al, hal. 6; transkrip pembelaan Joni Marques, Case 9-PID.C.G/2000, hal. 38.
- ⁹⁶ Wawancara dengan João da Silva, 14 Juni, 2003.
- ⁹⁷ Robinson, *East Timor 1999*, Submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 84.
- ⁹⁸ “Tinjauan Strategis Pembangunan Kekuatan dan Kemampuan Komando Antar Resort Kepolisian 15.3 Timor-Leste Tahun 1978-1983,” Dili, Maret 1978, Lampiran C, hal. 4
- ⁹⁹ Timor-Lestelbid.
- ¹⁰⁰ *Korps Marinir TNI AL, 1970-2000*, Dinas Penerangan Korps Marinir, Jakarta, 2000, hal. 219; wawancara dengan Aleixo Ximenes, 2 Februari, 2004.
- ¹⁰¹ Dokumen rahasia *Daerah Pertahanan Keamanan Komando Antara Resort Kepolisian 15.3 Timor-Leste*, “Laporan Komando Komtarres 15.3 Timor-Leste Dalam Rangka Kunjungan Kapolri Beserta Rombongan Ke Daerah Operasi Timor-Leste,” Lampiran 17.
- ¹⁰² Dokumen rahasia Komando Daerah Militer XVI/Udayana, Komando Resort Militer 164/Wira Dharma, “Instruksi Operasi No. INSOP/03/II/1982, p. 5. [Catatan: karena tidak ada catatan tentang *Wanra* sebelumnya, maka dokumen ini barangkali menunjuk kepada *Hansip* yang bertugas sebagai *Wanra*]
- ¹⁰³ Dokumen rahasia Komando Daerah Militer XVI/Udayana, Komando Resort Militer 164/Wira Dharma, “Instruksi Operasi No. INSOP/03/II/1982, hal. 7-8.
- ¹⁰⁴ Dokumen rahasia Komando Daerah Militer XVI/Udayana, Komando Resort Militer 164/Wira Dharma, “Instruksi Operasi No. INSOP/03/II/198, hal. 6.
- ¹⁰⁵ Petunjuk Teknis No. JUKNIS/06/IV/1982, Babinsa/TPD Activity in developing and phasing out Trained People’s Resistance Forces, dikutip dalam Budiardjo dan Liem, hal. 223.
- ¹⁰⁶ Petunjuk Teknis No. JUKNIS/06/IV/1982, Babinsa/TPD Activity in developing and phasing out Trained People’s Resistance Forces, dikutip dalam Budiardjo and Liem, hal. 223; Dokumen rahasia Komando Daerah Militer XVI/Udayana, Komando Resort Militer 164/Wira Dharma, “Instruksi Operasi No INSOP/03/II/198, hal. 5; Lowry, =hal. 111.
- ¹⁰⁷ Pernyataan HRVD # 00626-02; 00796; 0626-02.
- ¹⁰⁸ Wawancara dengan Marcelino Soares, 8 Juli 2003; Budiardjo dan Liem hal. 134; pernyataan HRVD # 06018-05, 00429-05.
- ¹⁰⁹ *Korps Marinir TNI AL 1970-2000*, Dinas Penerangan Korps Marinir, Jakarta, 2000, hal. 219.
- ¹¹⁰ Pernyataan HRVD # 07273, 03113-02, 07392, 07037,07273.
- ¹¹¹ Lowry, hal. 111.
- ¹¹² Lowry, hal. 112.
- ¹¹³ Laporan KPP HAM Timor-Leste, 31/01/2000, alinea 38.
- ¹¹⁴ Wawancara dengan Jose Sales dos Santos, 25 Juli 2003, Bazartete, Liquica; wawancara dengan Pedro dos Santos, 9 Juli 200, Liquica.
- ¹¹⁵ Moore, hal. 25.
- ¹¹⁶ Instruksi-Operasi No: Insop/03/II/1982, al. 8.
- ¹¹⁷ Pernyataan HRVD # 07455-02.
- ¹¹⁸ Laporan Komando, Komtarbes 15.3 Timor-Leste Dalam Rangka Kunjungan Kapolri beserta rombongan ke daerah operasi Timor-Leste, Juni 1978, hal. 15.
- ¹¹⁹ Alfredo Alves, kesaksian lisan kepada CAVR, *Audiensi Publik tentang Anak dan Konflik*, 29 Maret 2004.

¹²⁰ Tomás Gonçalves, kesaksian lisan kepada CAVR, *Audiensi Publik tentang Konflik Internal 1974-76*, 15-18 Desember 2003; wawancara dengan Tomás Gonçalves, 23 Oktober 2003.

¹²¹ “Petunjuk Tehnis Nomor: Juknis/05/I/1982 tentang Sistem Keamanan Kota dan Daerah Pemukiman,” tanpa tandatangan, tanpa tanggal (halaman terakhir hilang).

¹²² HRVD # 07092-04.

¹²³ “Petunjuk Tehnis Nomor: Juknis/05/I/1982 tentang Sistem Keamanan Kota dan Daerah Pemukiman,” hal. 5.

¹²⁴ Dokumen rahasia Komando Daerah Militer XVI/Udayana, Komando Resor [sic] Militer 164/Wira Dharma “Instruksi Operasi No. INSOP/03/II/1982, hal. 1 (tidak lengkap).

¹²⁵ “Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: KEP/03/II/1977,” hal. 45; Departemen Pertahanan Keamanan, “Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan /Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: KEP/23/X/1978, hal. 20; Komando Resor [sic] Militer 164, “Petunjuk Tehnis Nomor: JUKNIS/01-A/IV/1982,” tandatangan Willièm da Costa, tanggal 10 september 1982, tetapi dihasilkan April 1982; Komando Operasi Keamanan Timor-Leste, “Prosedure Operasi Tetap Nomor: PROTAP/3/IV/1988 Tanggal 30 April 1988,” Lampiran E-2, hal. 3; Kodam IX Kolakops, “Rencana Operasi ‘Halo Kapaz,’” tanggal 31 August 1991, rahasia), dikutip dalam Moore, hal. 21.

¹²⁶ Robinson, *East Timor 1999*, Submisi OHCHR kepada CAVR hal. 30.

¹²⁷ Dokumen rahasia Daerah Pertahanan Keamanan Komando Antara Resort Kepolisian 15.3 Timor-Leste, “Laporan Komando Komtarres 15.3 Timor-Leste Dalam Rangka Kunjungan Kapolri Beserta Rombongan Ke Daerah Operasi Timor-Leste,” Lampiran 17; an Kantor Statistik Propinsi Timor-Leste, *Timor-Leste Dalam Angka 1981*, hal. 56.

¹²⁸ Lowry, hal. 112.

¹²⁹ Wawancara dengan Joaquim Fonseca, Dili, 23 Mei 2004.

¹³⁰ Robinson, Submisi OHCHR kepada CAVR, “Chapter 6. Militias: History, Formation, and Legal Recognition,” hal. 85.

¹³¹ “Gada Paksi Tegakkan Integrasi Timtim”, *Suara Timor-Leste*, Agustus 12, 1996; Robinson, Submisi OHCHR kepada CAVR, “Chapter 6. Militias: History, Formation, and Legal Recognition,” hal. 86.

¹³² “Gada Paksi Kembangkan 17 Bidang Usaha di Timtim”, *Suara Timor-Leste*, Februari 14, 1996; dan “HUT Kopassus Memiliki Makna Refleksi dan Introspeksi”, *Suara Timor-Leste*, April 17, 1996.

¹³³ “Mengaku Anggota Gada Paksi, Empat Pemuda Ditangkap Polisi”, *Suara Timor-Leste*, Agustus 12, 1997.

¹³⁴ Komando Daerah Militer IX Udayana/Komando Resor Militer 164, Rekapitulasi Unsur Perlawanan Wilayah Propinsi Timor-Leste, Periode Tahun 1997/98, April 1998.]

¹³⁵ Robinson, Submisi OHCHR kepada CAVR hal. 98.

¹³⁶ *Ibid*, hal 87.

¹³⁷ Gugatan terhadap Wiranto dan lain-lain, 22 Februari 2003.

¹³⁸ Dikutip dalam Robinson, Submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 98.

¹³⁹ *Ibid*, hal 98.

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 102-103.

¹⁴¹ Laporan KPP HAM Timor-Leste, 31/01/2000, alinea 51.

¹⁴² Robinson, *East Timor 1999*, OHCHR Submission to the CAVR, hal. 92-93, 104-105.

¹⁴³ *Ibid*, hal. 93

-
- ¹⁴⁴ Ibid, hal. 94
- ¹⁴⁵ Ibid, hal. 100.
- ¹⁴⁶ Ibid, hal. 100.
- ¹⁴⁷ Ibid, hal. 95.
- ¹⁴⁸ Ibid, hal. 101-103
- ¹⁴⁹ Ibid, hal. 106-113
- ¹⁵⁰ Ibid.
- ¹⁵¹ Ibid.
- ¹⁵² Ibid, hal. 107
- ¹⁵³ Ibid, hal. 103
- ¹⁵⁴ Ibid, hal. 104-105.
- ¹⁵⁵ Robinson hal. 129.
- ¹⁵⁶ Ibid, hal. 125, 129.
- ¹⁵⁷ Ibid, hal. 36.
- ¹⁵⁸ Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary-General, 31 January 2000, A/54/726, S/2000/59, Alinea 136-140.
- ¹⁵⁹ Ian Martin, Audiensi Publik tentang Penentuan Nasib Sendiri serta Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2003.
- ¹⁶⁰ Laporan KPP HAM Timor-Leste, , alinea 177, 180.
- ¹⁶¹ Ibid, alinea 185, 191.
- ¹⁶² Ibid, para 180.
- ¹⁶³ Ross Coulthart, 'Timor on the brink', *Sunday*, Channel 9, Sydney, Australia. Ditayangkan Juni 1999.
- ¹⁶⁴ Laporan KPP HAM Timor-Leste, alinea 184, 185.
- ¹⁶⁵ Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, mantan gubernur, Dili, 30 Juni 2004.
- ¹⁶⁶ Ibid.
- ¹⁶⁷ Arnaldo dos Reis Araujo, menjawab pertanyaan Saudara Yayat Handayana, Jakarta, 10 September 1980.
- ¹⁶⁸ Dunn, hal. 71.
- ¹⁶⁹ Dokumen rahasia “Daerah Pertahanan Keamanan–Komando Antar Resort Kepolisian 15.3 Timor-Leste”, A Strategic Look at the Development of Power and Ability Year 1978-1983
- ¹⁷⁰ Pakpahan, Timor-Lestehal. 16.
- ¹⁷¹ Wawancara CAVR dengan Armindo Soares Mariano, mantan Bupati Dili, Kupang, 20 July 2004; Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 June 2004.
- ¹⁷² Roy Pakpahan, Solidaritas [Solidaritas Indonesia untuk Perdamaian Timor-Leste], *Mengenal Timor-Timur Dulu dan Sekarang*, September 1998, hal. 18.
- ¹⁷³ Mario Carrascalão, kesaksian lisan di CAVR, *Audiensi Publik tentang Perempuan dan Konflik* , April 2003.
- ¹⁷⁴ Monis da Maia, kesaksian lisan di CAVR, *Audiensi Publik tentang Konflik*.
- ¹⁷⁵ Pakpahan, Timor-Lestehal. 19

-
- ¹⁷⁶ Wawancara dengan Mario Carrascalão, Dili, 12 September 2003.
- ¹⁷⁷ Jon Pedersen and Marie Arnberg, *Social and Economic Conditions in East Timor*, International Conflict Resolution Program, Columbia University, New York, [tanpa tahun penerbitan], hal. 117.
- ¹⁷⁸ Ibid, hal. 116.
- ¹⁷⁹ Wawancara CAVR dengan Armindo Soares Mariano, mantan Bupati Dili, Kupang, 20 Juli 2004.
- ¹⁸⁰ Kantor Statistik Propinsi Timor-Leste, *Timor-Leste Dalam Angka*, Dili, 1981.
- ¹⁸¹ Laporan DPRD Tingkat I Timor-Leste kepada Bapak President Republik Indonesia Tentang Masalah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Timor-Leste, Dili, 3 Juni 1981.
- ¹⁸² ‘DPRD complains’, Report 102/DPRD/VII/1981, 3 Juni 1981, diterjemahkan dalam *Timor Information Service* No 32, Sept/Oct 1981, hal. 6.
- ¹⁸³ Dunn, hal. 290.
- ¹⁸⁴ “Radiogram Menhankam/Pangab No. RDG/Siaga/240/B/VIII/1976,” tertanggal 14 Agustus 1976 [arsip CAVR].
- ¹⁸⁵ Kementerian Pertahanan dan Keamanan “Nomor: KEP/03/II/1977 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Komando Daerah Pertahanan-Keamanan Timor-Timur, Kodahankam Tim-Tim,” tanggal 18 Februari 1977 [arsip CAVR].
- ¹⁸⁶ Pemerintah Daerah Tingkat 1 Timor-Leste, *20 Tahun Timor-Leste Membangun*, CV Rimbo, 1995, hal. 97.
- ¹⁸⁷ Wawancara CAVR dengan iMario Viegas Carrascalão, former Governor, Dili, 30 Juni 2004.
- ¹⁸⁸ Australian Parliamentary Delegation Report, 1983, hal. 66; lihat juga wawancara dengan Mario Viegas Carrascalão, mantan gubernur, Dili, 30 Juni 2004.
- ¹⁸⁹ Pemerintah Daerah Tingkat 1 Timor-Leste, *20 Tahun Timor Timu rMembangun*, CV Rimbo, 1995, hal. 100.
- ¹⁹⁰ Timor-Leste *Timor-Leste* Ibid, hal. 99
- ¹⁹¹ Jon Pedersen dan Marie Arnberg, *Social and Economic Conditions in East Timor*, International Conflict Resolution Program, Columbia University, New York, [tanpa tahun penerbitan], hal. 117.
- ¹⁹² Ibid, hal. 116.
- ¹⁹³ TAPOL, Occasional Report No. 26; Taudevin, hal. 77-78.
- ¹⁹⁴ Pedersen dan Arnberg, hal. 116.
- ¹⁹⁵ Ibid, hal. 118.
- ¹⁹⁶ Ibid, hal. 117.
- ¹⁹⁷ Wawancara CAVR dengan Claudio Vieira, mantan Bupati Lautem, Dili, 10 Juni 2004.
- ¹⁹⁸ Wawancara dengan Armindo Soares Mariano, mantan Bupati Dili, Kupang, 20 Juli 2004 ; Wawancara dengan Claudio Vieira, mantan Bupati Lautem, Dili, 10 Juni 2004.
- ¹⁹⁹ Wawancara dengan Armindo Soares Mariano, 20 Juli 2004
- ²⁰⁰ Pedersen dan Arnberg, hal. 116.
- ²⁰¹ Prof Dr Mubyarto, Dr Loekman Soetrisno, et al, *East Timor: The Impact of Integration*, Gadjah Madah University, Yogyakarta 1990, diterjemahkan oleh Indonesia Resources and Information Program, Australia, 1991, hal. 50.
- ²⁰² Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, 30 Juni 2004.

²⁰³ Pemerintah Daerah Tingkat 1 Timor-Leste, *20 Tahun Timor-Leste Membangun*, CV Rimbo, 1995, hal. 163.

²⁰⁴ Mubyarto et al, hal. 61.

²⁰⁵ Kantor Statistik Timor-Leste, *Timor-Leste Dalam Angka 1983*, hal. 32; Kantor Statistik Timor-Leste, *Timor-Leste Dalam Angka 1997*, hal. 57.

²⁰⁶ Mubyarto et al, hal. 60.